

LAPORAN KEGIATAN

Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Bappenas

2017





DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D. PETA BISNIS PROSES PUSBINDIKLATREN.....	8
E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PUSBINDIKLATREN.....	9
BAB II. KERJA SAMA PUSBINDIKLATREN DENGAN LEMBAGA/INSTITUSI.....	18
A. PROGRAM PHRD-IV.....	18
B. PROGRAM SPIRIT.....	22
C. PROGRAM <i>SPLIT-SITE</i> DAN GPLP.....	29
BAB III. INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN.....	30
A. RENCANA KEGIATAN.....	30
B. ANGGARAN.....	32
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	33
A. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	33
B. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANAAN....	51
C. BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN GELAR.....	65
D. BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN NON-GELAR.....	75
E. SUB-BAGIAN TATA USAHA.....	83
BAB V. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	86
A. PERMASALAHAN.....	86
B. REKOMENDASI.....	91
BAB VI. PENUTUP.....	95
LAMPIRAN.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma pembangunan dari yang terpusat menuju desentralisasi menuntut pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan manajemen pembangunan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), rencana strategis, dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, prasyarat keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tersebut, perlu didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah yang bertugas mempersiapkan, menyusun, dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan.

Kualitas ini penting, selain sebagai prasyarat untuk menjamin kualitas keluaran (*output*) perencanaan, juga diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan yang dituntut oleh masyarakat yang semakin kritis dalam merespons pengelolaan pembangunan. Peningkatan kualitas SDM diarahkan tidak saja hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian perencana, tetapi juga diarahkan pada perilaku perencana yang profesional.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka salah satu tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) perencanaan pembangunan;
- b. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di pusat dan daerah;

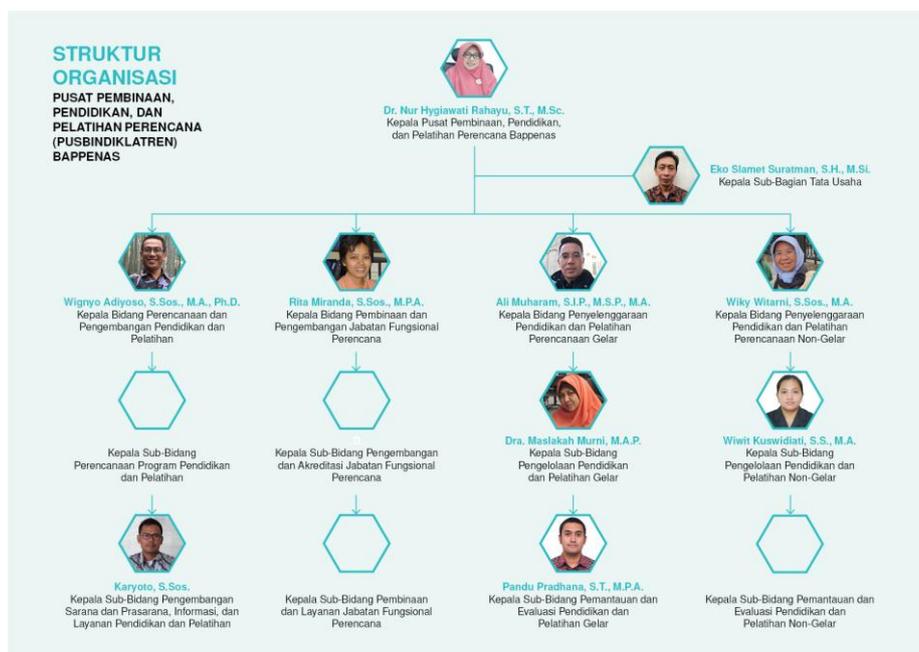


- c. pembinaan profesi widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- e. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- f. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- g. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan;
- h. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan
- j. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana dan widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- k. pelaksanaan administrasi pusat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Organisasi Struktural

Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren membentuk struktur organisasi yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Pusat dengan 4 (empat) bidang yang tiap-tiap bidang terdiri atas 2 (dua) Sub-Bidang dan 1 (satu) Sub-Bagian Tata Usaha. Struktur organisasi Pusbindiklatren sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1.1.** di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusbindiklatren Bappenas 2017



Selain pejabat struktural tersebut di atas, Pusbindiklatren juga didukung oleh 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 10 Pejabat Fungsional Perencana, 8 Widyaiswara, 2 Arsiparis, dan 7 Staf Pelaksana serta dibantu oleh 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Non-ASN. Sesuai dengan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas dan fungsi tiap-tiap bidang adalah sebagai berikut.

a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar, serta pengembangan sarana, prasarana, dan sistem informasi perencanaan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- 2) perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan
- 3) pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, program dan materi, pendidikan dan pelatihan
- 4) penyusunan laporan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) **Sub-Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan.** Sub-bidang ini bertugas melakukan melakukan penyusunan rencana, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- 2) **Sub-Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.** Sub-bidang ini bertugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan.

b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana;
- 2) pelaksanaan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah;
- 3) pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah;
- 4) pelaksanaan layanan dan konsultasi Jabatan Fungsional Perencana;
- 5) fasilitasi pembinaan Widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- 6) pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:

- 1) **Sub-Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana.** Sub-bidang ini bertugas melakukan pengembangan kelembagaan dan regulasi Jabatan Fungsional Perencana dan pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit bagi perencana pusat dan daerah, serta pelaksanaan akreditasi dan penilaian pengajar dan lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, dan melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya;
- 2) **Sub-Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana.** Sub-bidang ini bertugas melakukan pembinaan profesi, fasilitasi, pelayanan informasi dan konsultasi bagi perencana pusat dan daerah; serta memfasilitasi pembinaan Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas.

c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan gelar di bidang perencanaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan gelar;
- 2) pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan gelar;
- 3) pelaksanaan penempatan peserta di perguruan tinggi pelaksana pendidikan dan pelatihan gelar;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan gelar; dan
- 5) penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan gelar baik di dalam maupun luar negeri.



Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar terdiri atas:

- 1) **Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar.** Sub-bidang ini bertugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan di luar negeri, dan penyusunan laporan;
- 2) **Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar.** Sub-bidang ini bertugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

d. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan non-gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan non-gelar;
- 2) pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan non-gelar;
- 3) pelaksanaan penempatan peserta dipelaksana pendidikan dan pelatihan non-gelar;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non-gelar; dan
- 5) penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non-gelar baik di dalam maupun luar negeri.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar terdiri atas:

- 1) **Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar.** Sub-bidang ini bertugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non-gelar di dalam dan luar negeri, dan penyusunan laporan;
- 2) **Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar.** Sub-bidang ini bertugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan non-gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

e. Sub-Bagian Tata Usaha

Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusbindiklatren Bappenas.



2. Organisasi Non-Struktural

Selain tugas fungsi sebagaimana tersebut di atas, Pusbindiklatren juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan program beasiswa yang berasal dari pinjaman (*loan*) dan hibah (*grant*) yang bekerja sama dengan intitusi internasional, di antaranya adalah:

a. Tim Pelaksana Kegiatan (*Project Implementing Unit*) Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi atau SPIRIT (*Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions*) periode 2010–2017

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas No. KEP. 16/SES/HK/03/2011 Tahun 2011, tugas tim secara garis besar adalah (1) menyusun pedoman dan petunjuk teknis; (2) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan; (3) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengarah; (4) melaksanakan koordinasi dengan konsultan; (5) melaksanakan koordinasi untuk kegiatan *pre-departure*; (6) melaksanakan sosialisasi kegiatan program; (7) melaksanakan proses sosialisasi; (8) penempatan peserta; (9) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kegiatan; (10) melaksanakan *tracer study*; (11) mengelola dan mengadministrasikan keuangan; (12) mengelola *database*; (13) mengelola publikasi dan informasi; serta (14) melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek.

Dalam rangka mendukung organisasi, PIU didukung oleh *Project Management Unit* (PMU) yang terdiri atas 8 (delapan) orang konsultan individual, yaitu *Financial Management Consultant* (1 orang); *Assistant Financial Management Consultant* (2 orang); *Education and Placement Degree Consultant* (1 orang); *Education and Placement Non-Degree Consultant* (1 orang); *Monitoring and Evaluation Consultant* (1 orang); *Assistant Monitoring and Evaluation Consultant* (1 orang); dan *Information System Officer* (1 orang).

b. Tim Pelaksana Kegiatan (*Project Implementing Unit*) untuk Beasiswa PHRD-IV (*Professional Human Resources Development IV*) periode 2014–2020

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas No. KEP.15/SES/2013 Tahun 2013, tugas tim secara garis besar adalah (1) menyusun pedoman dan petunjuk teknis; (2) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan; (3) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengarah; (4) melaksanakan koordinasi dengan konsultan; (5) melaksanakan koordinasi untuk kegiatan *pre-departure*; (6) melaksanakan sosialisasi kegiatan program; (7) melaksanakan proses sosialisasi; (8) penempatan peserta; (9) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kegiatan; (10) melaksanakan *tracer study*.

c. Pengelola Beasiswa *Split-Site*

Program *Split-Site* adalah program beasiswa kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Australia Awards Scholarship (AAS) untuk program S2 *Linkage*, yaitu 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun di Australia. AAS membiayai pendidikan di Australia dan persiapan bahasa, sedangkan Pusbindiklatren membiayai pendidikan selama di Indonesia. Program *Split-Site* ini pada tahun 2017 dilaksanakan di Universitas Hasanuddin dan Griffith University Australia.



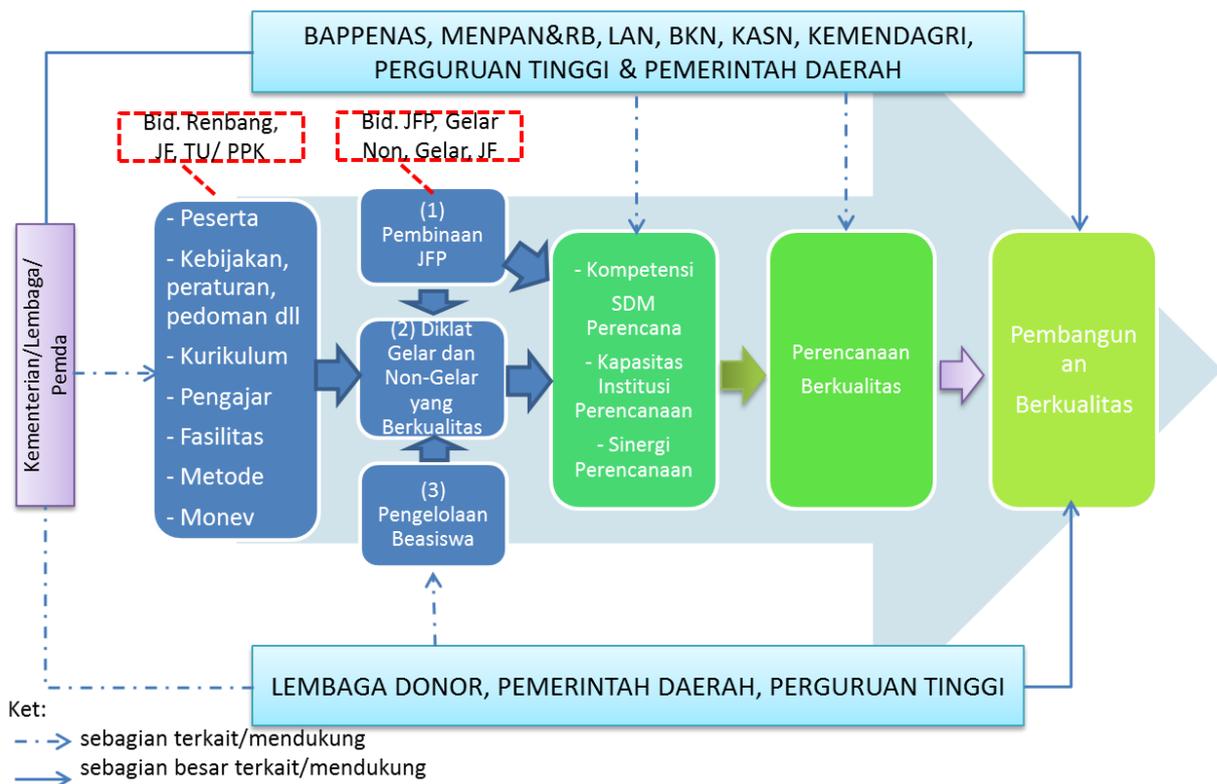
d. Pengelola Beasiswa GPLP

Program *Global Public Leadership Program* (GPLP) adalah program beasiswa gelar dan non-gelar dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang. Fokus program ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian pemerintah Jepang dan Indonesia seperti bidang Penanggulangan Bencana, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Keuangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hubungan Internasional, Kemaritiman, dan Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. PETA BISNIS PROSES PUSBINDIKLATREN

Untuk menerjemahkan hubungan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Pusbindiklatren maka perlu adanya peta bisnis proses yang menggambarkan proses dan hubungan antara bidang/sub-bidang/sub-bagian dalam organisasi Pusbindiklatren. Secara umum, sesuai dengan tugas dan fungsi Pusbindiklatren adalah menjalankan peran Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan, pengendalian dan *monitoring* serta evaluasi pembangunan nasional. Kualitas perencanaan pembangunan memerlukan adanya sinergi perencanaan yang fokus pada pembangunan prioritas dan adanya SDM Perencana dan kapasitas institusi perencanaan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka fungsi Pusbindiklatren adalah (1) sebagai pengelola beasiswa; (2) penyelenggara diklat gelar dan non-gelar; (3) dan pembinaan JFP. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka proses kegiatan yang dilaksanakan Pubsindiklatren terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu (1) perencanaan, koordinasi dan persiapan; (2) pelaksanaan diklat dan pembinaan JFP; (3) pengendalian; serta (4) *monitoring* dan evaluasi. Kegiatan perencanaan, koordinasi, dan persiapan dapat berupa kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pembina kepagawiaian (MenPANRB, BKN, KASN, dan LAN) dan pembina daerah, lembaga donor atau *lender*, pelaksana diklat, unit kerja perencanaan di pusat dan daerah, maupun pembina pengelolaan keuangan. Kegiatan perencanaan dan persiapan termasuk penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, panduan, *standard operating procedure* (SOP), serta penyusunan publikasi dan informasi. Sementara itu, kegiatan pelaksanaan adalah penyelenggaraan diklat, baik gelar maupun non-gelar. Dalam pelaksanaan diklat tersebut juga dilaksanakan pengendalian serta *monitoring* dan evaluasi. Hasil *monitoring* dan evaluasi akan digunakan untuk bahan masukan penyusunan rencana kerja selanjutnya. **Gambar 1.2.** menunjukkan gambaran proses bisnis Pusbindiklatren Bappenas.



Gambar 1.2. Peta Proses Bisnis Pusbindiklatren

E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PUSBINDIKLATREN

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Pusbindiklatren didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Peta SDM Pusbindiklatren ini sangat penting karena akan memengaruhi kinerja Pusbindiklatren Bappenas.

1. SDM PNS

Jumlah PNS di Pusbindiklatren tahun 2017 terdiri atas PNS struktural, fungsional, arsiparis, widyaiswara, dan staf pelaksana. Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural terdiri atas 10 orang dari 14 jabatan yang ada, yaitu Kepala Pusbindiklatren, 4 Kepala Bidang, 4 Kepala Sub-Bidang, dan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha (TU) sebagaimana tercantum dalam **Tabel 1.1**. Adapun 4 (empat) jabatan struktural yang masih belum terisi adalah Kepala Sub-Bidang Perencanaan Diklat, Kepala Sub-Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana, Kepala Sub-Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana, dan Kepala Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar.



Tabel 1.1. Daftar PNS Struktural Pusbindiklatren

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
1	Nur Hygiawati Rahayu	Kepala Pusbindiklatren	S3	Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional
2	Wignyo Adiyoso	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	S3	Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar, serta pengembangan sarana, prasarana, dan sistem informasi perencanaan
3	Ali Muharam	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar	S2	Melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya
4	Wiky Witarni	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar	S2	Melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan non-gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya
5	Rita Miranda	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	S2	Melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6	Karyoto	Kepala Sub-Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	S1	Melakukan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
7	Maslakah Murni	Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar	S2	Melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan di luar negeri, dan penyusunan laporan
8	Pandu Pradhana	Kepala Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar	S2	Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan
9	Wiwit Kuswidiati	Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar	S2	Melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non-gelar di dalam dan di luar negeri, dan penyusunan laporan
10	Eko Slamet Suratman	Kepala Sub-Bagian Tata Usaha	S2	Melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan, melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusbindiklatren

Adapun PNS lainnya menduduki Jabatan Fungsional Perencana (JFP), widyaiswara, arsiparis, dan staf pelaksana sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 1.2** dan **Tabel 1.3**.

Tabel 1.2. Daftar PNS Fungsional (Perencana, Widyaiswara, dan Arsiparis) Pusbindiklatren

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
1	Zamilah Chairani	JFP Madya	S2	Menyusun perencanaan pengembangan SDM perencana jangka menengah, menetapkan alternatif kebijakan, menyusun kurikulum diklat, mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPJMN/Renstra, menyusun konsep pemantauan dan evaluasi diklat
2	Hari Nasiri	JFP Madya	S2	Menyusun perencanaan pengembangan SDM perencana jangka menengah, menetapkan alternatif kebijakan, menyusun kurikulum diklat, mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPJMN/Renstra, menyusun konsep pemantauan dan evaluasi diklat
3	Sugiyanti	JFP Pertama	S2	Mengidentifikasi dan menyusun alternatif solusi permasalahan pelaksanaan diklat, menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pelaporannya, melakukan <i>review</i> kelengkapan data serta mengumpulkan dan mengolah data sekunder terkait diklat



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
4	Wahyu Pribadi	JFP Muda	S2	Menyusun perencanaan tahunan (merumuskan, mengkaji dan menentukan alternatif kebijakan dan rencana diklat; serta pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan diklat perencanaan
5	Shri Mulyanto	JFP Muda	S2	Menyusun perencanaan tahunan (merumuskan, mengkaji dan menentukan alternatif kebijakan dan rencana diklat; serta pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan diklat perencanaan (gelar, non-gelar dan JFP)
6	Edy Susanto	JFP Pertama	S2	Mengidentifikasi dan menyusun alternatif solusi permasalahan pelaksanaan diklat, menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pelaporannya, melakukan <i>review</i> kelengkapan data serta mengumpulkan dan mengolah data sekunder terkait diklat.
7	Teresna Murti	JFP Madya	S2	Menyusun perencanaan pengembangan SDM perencana jangka menengah, menetapkan alternatif kebijakan, menyusun kurikulum diklat, mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPJMN/Renstra, menyusun konsep pemantauan dan evaluasi diklat
8	Lilly Widayati	JFP Madya	S2	Menyusun perencanaan pengembangan SDM perencana jangka menengah, menetapkan alternatif kebijakan, menyusun kurikulum diklat, mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPJMN/Renstra, menyusun konsep pemantauan dan evaluasi diklat
9	Erwin Fahrudin	Perencana Pertama	S1	Menyusun perencanaan dan memantau proses panganggaran dan kegiatan Pusbindiklatren.
10	Dwi Harini Septaning Tyas	Staf Perencana	S2	Menyusun kriteria pemilihan alternatif kebijakan dan merumuskan alternatif kebijakan diklat, merumuskan metode dan desain serta menjadi tim pemantauan dan evaluasi diklat, membantu perencanaan dan pengembangan diklat
11	Christian Dwi Prasetijaningsih	Widyaiswara Madya	S2	Mengikuti diklat dan seminar/lokakarya, melaksanakan dikjartih, menulis artikel sesuai spesialisasi, evaluasi dan pengembangan diklat
12	Deddy Supriadi Bratakusumah	Widyaiswara Utama	S3	Merancang kurikulum dan sistem diklat, merumuskan inovasi sistem diklat, dan melaksanakan evaluasi sistem diklat



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
13	Setia Budi	Widyaiswara Utama	S2	Mengikuti diklat dan seminar/lokakarya, fasilitator dan coach Diklatpim, fasilitator/pengajar TOT/TOF dan diklat teknis atau fungsional, evaluasi dan pengembangan diklat, penyusunan/penyempurnaan kurikulum diklat, dan menyusun analisis kebutuhan diklat
14	Dida Heryadi Salya	Widyaiswara Utama	S3	Merancang kurikulum dan sistem diklat, merumuskan inovasi sistem diklat, dan melaksanakan evaluasi sistem diklat
15	Slamet Seno Adji	Widyaiswara Utama	S3	Merancang kurikulum dan sistem diklat, merumuskan inovasi sistem diklat, dan melaksanakan evaluasi sistem diklat
16	Yohandarwati	Widyaiswara Utama	S3	Merancang kurikulum dan sistem diklat, merumuskan inovasi sistem diklat, dan melaksanakan evaluasi sistem diklat
17	Asep Kususanto	Widyaiswara Madya	S3	Merancang kurikulum dan sistem diklat, merumuskan inovasi sistem diklat, dan melaksanakan evaluasi sistem diklat
18	Edy Purwanto	Widyaiswara Muda	S2	Mengikuti diklat dan seminar/lokakarya, melaksanakan dikjartih, menulis artikel sesuai spesialisasi, evaluasi dan pengembangan diklat
19	Niken Wardani	Arsiparis Pertama	S1	Penataan bahan dan berkas terkait pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan JFP dan Widyaiswara
20	Suroyo	Arsiparis Terampil	D3	Penataan bahan, berkas, dan laporan pelaksanaan diklat

Tabel 1.3. Daftar PNS Staf Pelaksana Pusbindiklatren

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
1	Nita Agustin	Tata Usaha	D3	Mengelola dokumen keluar di bidang perencanaan dan pengembangan diklat dan mengatur jadwal pimpinan
2	Yuliarni	Tata Usaha	S1	Mengelola berkas masuk dan keluar, mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan dan laporan kegiatan di bidang penyelenggaraan diklat gelar
3	Mulyani Rachmiyati	Tata Usaha	S1	Melakukan pengumpulan bahan persiapan dan pelaporan kegiatan seleksi dan penempatan calon peserta diklat non-gelar



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
4	Ch. Nunik Ispriyanti	Tata Usaha	S1	Mengelola berkas masuk dan keluar, mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan dan laporan kegiatan di bidang penyelenggaraan diklat non-gelar
5	Agustin Setyaningsih	Tata Usaha	S1	Melakukan penatausahaan dan pencatatan pembukuan transaksi keproyekan PPN X
6	Jajang Muhari	Tata Usaha	SMA	Melakukan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan pelaksanaan kegiatan kantor, menyediakan jamuan rapat untuk tamu, pimpinan dan staf, penggandaan berkas, penyiapan ruang rapat dan peralatannya, dan pengadministrasian lainnya sesuai kebutuhan pimpinan dan staf.
7	Uki Dasuki	Pramubakti	SMA	Melakukan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di kantor Pusbindiklatren, menyediakan jamuan rapat, menggandakan berkas, dan menyiapkan ruang rapat.

2. SDM PTT

Selain PNS, Pusbindiklatren juga didukung oleh PTT yang bertugas membantu PNS melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengingat masih belum terisinya beberapa jabatan struktural di Pusbindiklatren, beberapa PTT juga mendukung pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan struktural yang kosong tersebut. Uraian tugas tiap-tiap PTT Pusbindiklatren tercantum pada **Tabel 1.4**.

Tabel 1.4. Daftar PTT Pusbindiklatren

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
1	Dwiyanto Bambang Purwanto	Pengelola <i>Database</i> dan Sistem Informasi	D3	Merancang struktur <i>database</i> dan perencanaan sistem, mengelola <i>database</i> karyawan, pengajar, dan materi diklat serta memberikan informasi terkait program Pusbindiklatren
2	Rizka Pemy Hasyim	Pengelola Teknologi Informasi	S1	Membuat aplikasi Simdiklat JFP, aplikasi berbasis <i>web</i> tentang pendaftaran <i>online</i> diklat JFP dan mengelola data perencanaan
3	Hafidh Aditama	Penyusun Bahan Informasi, Publikasi, dan Perancang Grafis	S1	Mengumpulkan bahan informasi, publikasi terkait program-program Pusbindiklatren dan mempublikasikan ke dalam <i>website</i> , mendesain buku/poster/ <i>leaflet</i> , dan penerbitan Majalah Simpul Perencana



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
4	Roseiga Retno Anggarani	Pengelola <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Diklat JFP	S1	Membantu kegiatan pengelolaan kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi diklat JFP yang meliputi penyiapan bahan dan koordinasi dengan prodi universitas/center pelaksana diklat JFP, menganalisis hasil tabulasi kuesioner para peserta diklat JFP, dan menganalisis hasil tabulasi kuesioner para peserta diklat JFP
5	Ivan Budi Susetyo	Pengelola Penilaian Angka Kredit JFP dan Anggaran	S2	Pengelola berkas DUPAK, BAPAK, dan SK PAK Diklat JFP, menerima usulan dan memverifikasi DUPAK, serta mengagendakan dan menginventarisasikan berkas-berkas DUPAK tersebut dan mengatur jadwal pengerjaannya kepada Tim Sekretariat Pusat
6	Fuad Setiawan	Pengelola Penyelenggaraan Diklat JFP dan Anggaran	S2	Membantu dalam pelaksanaan seleksi Diklat JFP mulai dari pemilihan peserta, pemetaan tes materi sampai dengan penempatan peserta diklat dan membantu berkoordinasi dengan PPK PPN X terkait dengan penganggaran di Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP
7	Ikah	Pengelola Penyelenggaraan Diklat Non-Gelar	D3	Membantu mengecek dan memverifikasi peserta yang mendaftar secara <i>online</i> serta membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat non-gelar
8	Reza Satrya Arjakusuma	Pengelola Penyelenggaraan Program Gelar	S2	Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan seleksi diklat gelar, pra keberangkatan, sampai dengan penempatan karyasiswa serta membantu proses pelamaran karyasiswa dengan berkoordinasi dengan pihak terkait
9	Irna Suwanti Indrayani	Pengelola Penyelenggaraan Diklat Gelar	S1	Membantu mengecek dan memverifikasi peserta yang mendaftar secara <i>online</i> serta membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat gelar
10	Dendi Mukti Putranto	Pengelola Sistem Informasi	S1	Membantu pengelolaan dan sistem informasi dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan



NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	URAIAN TUGAS
11	Yusriati Yusuf	Pengelola Program SPIRIT	S2	Membantu pengelolaan Sekretariat PCU SPIRIT mulai dari koordinasi, pengadministrasian, serta penyiapan bahan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan

Menyadari masih kurangnya SDM yang mendukung tugas Pusbindiklatren Bappenas terutama untuk mengisi jabatan struktural maka Pusbindiklatren Bappenas telah mengusulkan formasi CPNS 2018 sebagaimana tercantum pada **Tabel 1.5** berikut.

Tabel 1.5. Jumlah Usulan CPNS 2018 Usulan Pusbindiklatren

NO.	FORMASI (CALON PERENCANA)	PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN	URAIAN PEKERJAAN
1	Calon Perencana di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar	S2 Manajemen	1	Membantu penyusunan strategi pengelolaan, pengembangan, dan perencanaan diklat gelar
2	Calon Perencana di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	S1 Ilmu Ekonomi/ S1 Hubungan Internasional	1	Membantu penyusunan rencana, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan
3	Calon perencana di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	S1 Ilmu Ekonomi	1	Membantu persiapan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4	Calon perencana di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar	S1 Manajemen	1	Membantu pengelolaan diklat non-gelar, meliputi kurikulum, modul, pengajar, dan pengembangannya



NO.	FORMASI (CALON PERENCANA)	PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN	URAIAN PEKERJAAN
5	Calon perencana di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	S1 Teknik Informatika	1	Membantu pengembangan diklat, pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan pelayanan informasi terkait diklat perencanaan





BAB II

KERJA SAMA PUSBINDIKLATREN DENGAN LEMBAGA/INSTITUSI

Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, bahwa kegiatan utama Pusbindiklatren adalah mengelola beasiswa, penyelenggaraan diklat gelar dan non-gelar dan pembinaan JFP. Untuk pengelolaan beasiswa tahun 2017, selain mengelola program PHRD-IV dan SPIRIT, Pusbindiklatren juga melaksanakan program beasiswa Australia Awards dari pemerintah Australia untuk program *Split-Site* dan *Global Public Leadership Program* (GPLP) dari JICA. Sementara untuk penyelenggaraan diklat, karena keterbatasan SDM dan fasilitas, Pusbindiklatren melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Di bawah ini disampaikan lembaga/institusi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas program SPIRIT dan PHRD-IV.

A. PROGRAM PHRD-IV

Selain dilakukan di dalam negeri, pelaksanaan diklat program PHRD-IV juga dilakukan di luar negeri, khususnya Jepang. Dalam pelaksanaan program diklat PHRD-IV, Pusbindiklatren dibantu oleh konsultan manajemen, yaitu PT Trippcons Internasional. Dalam rangka penyelenggaraan program S2 dan S3 dalam negeri, Pusbindiklatren melakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam negeri. Sementara itu, untuk penyelenggaraan program S2 Linkage dilakukan melalui penandatanganan Technical Academic Agreement (TAA) antara perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi di Jepang, dan Pusbindiklatren. Tabel 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di bawah ini adalah jumlah perguruan tinggi sebagai pelaksana gelar dan non-gelar program PHRD-IV.

Tabel 2.1. Perguruan Tinggi Pelaksana S2 Dalam Negeri

NO.	PROGRAM STUDI (PRODI)	UNIVERSITAS
1	Magister Ilmu Ekonomi	Universitas Syiah Kuala
2	Magister Perencanaan Pembangunan	Universitas Andalas
3	Magister Administrasi Publik	Universitas Sriwijaya
4	Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik	Universitas Indonesia
5	Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
6	Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah	Institut Pertanian Bogor
7	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	Institut Teknologi Bandung
8	Magister Studi Pembangunan	Institut Teknologi Bandung
9	Magister Ekonomi Terapan	Universitas Padjadjaran
10	Magister Ilmu Lingkungan	Universitas Padjadjaran



NO.	PROGRAM STUDI (PRODI)	UNIVERSITAS
11	Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota	Universitas Diponegoro
12	Magister Ilmu Lingkungan	Universitas Diponegoro
13	Magister Perencanaan Kota dan Daerah	Universitas Gadjah Mada
14	Magister Ekonomi Pembangunan	Universitas Gadjah Mada
15	Magister Administrasi Publik	Universitas Gadjah Mada
16	Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi	Universitas Brawijaya
17	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan	Universitas Hasanuddin
18	Magister Ilmu Ekonomi	Universitas Brawijaya
19	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	Universitas Gadjah Mada
20	Magister Transportasi	Institut Teknologi Bandung

Tabel 2.2. Perguruan Tinggi Pelaksana S2 *Linkage*

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG
1	Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia	Graduate School of International Relation/International University of Japan (IUJ): <i>International Development Program Economics, Development Economics, Public Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning</i>
		Hiroshima University: <i>Economic and Economic Development</i>
		International Graduate School of Social/Yokohama National University: <i>Economic and Economic Development</i>
		National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS): <i>Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning</i>
		Kobe University: <i>Development Economics, Development Management, Political Development</i>
2	Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada	GRIPS: <i>Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning</i>
		IUJ: <i>International Development Program Economics, Development Economics, Public Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning</i>
		Hiroshima University: <i>Economic and Economic Development</i>
		Takushoku University: <i>International Development Studies, Economic and Development Economics, Urban and Regional Planning, Development Planning and Public Administration</i>



NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG
		<p>Kobe University: <i>Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations and Public Administration</i></p> <p>International Graduate School Of Social/Yokohama National University: <i>Economic and Economic Development</i></p>
3	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung	<p>GRIPS: <i>Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning</i></p> <p>Ritsumeikan University: <i>Economics, International Relations, Public Service, Environmental and Urban Engineering, Accounting and Management</i></p> <p>Kobe University: <i>Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations and Public Administration</i></p> <p>Graduate School of Media and Governance, Keio University: <i>Media and Governance, Public Administration</i></p>
4	Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada	<p>GRIPS: <i>Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning</i></p> <p>Ritsumeikan University: <i>Economics, International Relations, Public Service, Environmental and Urban Engineering, Accounting and Management</i></p> <p>Takushoku University: <i>International Development Studies, Economic and Development Economics, Urban and Regional Planning, Development Planning and Public Administration</i></p> <p>Kobe University: <i>Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations and Public Administration</i></p> <p>Graduate School of Media and Governance, Keio University: <i>Media and Governance, Public Administration</i></p>
5	Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	<p>GRIPS: <i>Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning</i></p> <p>Ritsumeikan University: <i>Economics, International Relations, Public Service, Environmental and Urban Engineering, Accounting and Management</i></p> <p>Takushoku University: <i>International Development Studies, Economic and Development Economics, Urban and Regional Planning, Development Planning and Public Administration</i></p> <p>Graduate School of Media and Governance, Keio University: <i>Media and Governance, Public Administration</i></p> <p>Kobe University: <i>Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations and Public Administration</i></p>



NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG
6	Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran	IUJ: <i>International Development Program Economics, Development Economics, Public Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning</i>
7	Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada	Takushoku University: <i>International Cooperation Studies</i>
		Kobe University: <i>International Cooperation Studies</i>
		GRIPS: <i>Economics, Planning, and Public Policy</i>
		Ritsumeikan University: <i>International Relations and Policy Science</i>
8	Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia	GRIPS: <i>Economics, Planning, and Public Policy</i>
9	Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya	Graduate School of Business, Rikkyo University: <i>Public Management and Administration</i>

Tabel 2.3. Perguruan Tinggi/Lembaga Pelaksana Diklat Bahasa (EAP dan BJLT)

NO.	PELAKSANA DIKLAT
1	Lembaga Bahasa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
2	Pusat Pelatihan Bahasa, Universitas Gadjah Mada
3	Lembaga Bahasa Internasional, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
4	UPT Pusat Bahasa, Institut Teknologi Bandung
5	Pusat Bahasa, Universitas Padjadjaran

Tabel 2.4. Perguruan Tinggi/Lembaga Pelaksana Diklat Non-Gelar Dalam Negeri

NO.	PELAKSANA DIKLAT	NO.	PELAKSANA DIKLAT
1	LPEM UI	12	PWK UNDIP
2	MPWK ITB	13	FE UNAND
3	LP3E FE UNPAD	14	FE UNS
4	MPKD UGM	15	GEO INFO UGM
5	P3KM UNHAS	16	FE UTM
6	FE UNSYIAH	17	MIL UNPAD
7	MAP UGM	18	MIL UNDIP



NO.	PELAKSANA DIKLAT	NO.	PELAKSANA DIKLAT
8	RCCP UB	19	LEMTEK UI
9	PPS UNSYIAH	20	FE UNIPA
10	MEP UGM	21	PSKMPD UNCEN
11	PPS UNSRI	22	PRESIDENT UNIVERSITY

B. PROGRAM SPIRIT

Dalam program SPIRIT, perguruan tinggi yang dapat dipilih oleh peserta tidak dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta yang berasal dari 10 *Participating Agencies* (PA), yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, KemenPANRB, BKN, LAN, Kemlu, BKPM, Kemendagri, BPK, dan BPKP. Pilihan jurusan dan perguruan tinggi dibuka secara bebas, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan syarat perguruan tinggi dalam negeri minimal terakreditasi A dan perguruan tinggi luar negeri diutamakan yang masuk dalam peringkat 400 terbaik dunia versi Times Higher Education (THE). Sebaran perguruan tinggi luar negeri yang berada di hampir seluruh dunia tersebut menghadirkan tantangan dan masalah dalam koordinasi, persiapan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi diklat SPIRIT tahun 2017. Tabel di bawah ini adalah jumlah perguruan tinggi sebagai pelaksana diklat gelar dan non-gelar program SPIRIT.

Tabel 2.4. Jumlah dan Sebaran Perguruan Tinggi/Lembaga Pelaksana Diklat Gelar SPIRIT

NO.	NEGARA	GELAR	NON-GELAR
1	Australia	19	9
2	Belgium	1	-
3	Canada	-	1
4	Denmark	-	1
5	France	2	4
6	Germany	6	2
7	Indonesia	14	20
8	Italy	1	2
9	Japan	6	1
10	Korea	-	2
11	Malaysia	2	1
12	Netherlands	10	4



NO.	NEGARA	GELAR	NON-GELAR
13	New Zealand	3	-
14	Poland	1	1
15	Singapore	1	1
16	Sweden	5	-
17	Swiss	-	1
18	Slovakia	-	1
19	Thailand	-	1
20	United Kingdom	52	5
21	United States	41	3
Total Universitas/Lembaga		164	60

Tabel 2.5. Perguruan Tinggi/Lembaga Pelaksana Diklat Non-Gelar SPIRIT Luar Negeri

NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
1	LAN	<i>Strategic Dialogue on Reform of Civil Service Leadership Training and Education System: Experience Francaise and Neerlandais</i>	Groupe IGS - Institut De Gestion Sociale	Prancis dan Belanda
2	KEMENPANRB	<i>Strategic Dialogue on Reform of Civil Service Leadership Training and Education System: Experience Francaise and Neerlandais</i>	Groupe IGS - Institut De Gestion Sociale	Prancis dan Belanda
3	LAN	<i>Talent Management</i>	The Australian Institute of Management Western Australia-The University of Western Australia	Australia
4	LAN	<i>IIAS International Congress</i>	The International Institute of Administrative Sciences (IIAS)	Marseille, Prancis
5	BAPPENAS	<i>Leader in Development: Managing Change in Dynamic World</i>	Harvard Kennedy School Executive Education	Massachusetts, Amerika Serikat
6	BPK	<i>Critical Perspective on Accounting Conference 2017</i>	Elsevier CPA Canada	Canada



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
7	KEMENDAGRI	<i>Decentralization and Inter-Administrative Relation</i>	The Hague University	Belanda
8	KEMLU	<i>Leading Performance Analysis and Measurement (Training Needs Analysis)</i>	The Australian Institute of Management Western Australia-The University of Western Australia	Perth, Australia
9	BAPPENAS	<i>Boulder Microfinance Training Program</i>	International Training Centre of The ILO	Turin, Italy
10	KEMENDAGRI	<i>Public Administration and Civil Registration</i>	Hertie School of Governance	Jerman
11	LAN	<i>Management Strategic on Career Development in The Public Sector</i>	The Asia Development Institute (ADI)	Korea
12	BPKP	<i>Human Resources Development and Management</i>	Japan International Cooperation Center (JICE)	Jepang
13	BKPM	<i>Strategic Public Relations Management</i>	LCT (London Corporate Training)	London, Inggris
14	KEMLU	<i>Effective Performance Management in a Learning Organization</i>	Melbourne Bussines School	Melbourne, Australia
15	BKPM	<i>Leading and Managing Talent</i>	Accredited Training International (ATI)	London, Inggris
16	BPKP	<i>Leading and Managing Talent</i>	Accredited Training International (ATI)	Inggris
17	KEMENPANRB	<i>Formulating Effective Government Organisations and Business Process Policy in Indonesia</i>	Civil Service College	London, Inggris
18	BKPM	<i>Performance Management in Learning Organization</i>	Accredited Training International (ATI)	London, Inggris
19	BAPPENAS	<i>Performance Management in Learning Organization</i>	Accredited Training International (ATI)	London, Inggris
20	KEMLU	<i>Leading Human Capital</i>	The Australian Institute of Management Western Australia-The University of Western Australia	Perth, Australia
21	KEMLU	<i>Leading with Big Data Analytics</i>	National University of Singapore (NUS)	Singapura
22	KEMENDAGRI	<i>Talent Management</i>	CBS Executive	Denmark



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
23	BPK	<i>Developing and Implementing Talent Management at Public Sector Organizations</i>	Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)	London, Inggris
24	BAPPENAS	<i>Managing Global Governance (MGG) Academy 2017</i>	The German Development Institute/Deutsches Institut for Entwicklungspolitik (DIE)	Bonn, Jerman
25	KEMENPANRB	<i>Effectiveness in Ethics and Integrity:Public Sector Accountability</i>	Victoria University Wellington	New Zealand
26	BAPPENAS	<i>Effectiveness in Ethics and Integrity:Public Sector Accountability</i>	Victoria University Wellington	New Zealand
27	BPK	<i>Role of Audit: Fraud, Investigation and State Loss</i>	Macquarie University	Sydney, Australia
28	BPKP	<i>Data Analytic, Fraud Investigation and Forensic Auditing</i>	MIS Training Institute	Inggris
29	LAN	<i>The Role of Public Governance in Achieving Sustainable Development Goals: Transforming, Empowering and Network-Building</i>	Eropa	Korea
30	BAPPENAS	<i>European Program for Development Evaluation Training (EPDET) 2017</i>	The Slovak Evaluation Society (SES) and Development Worldwide (DWW)	Bratislav, Slovakia
31	BAPPENAS	<i>ECIIA Basel 2017 Conference and Paris Workshop</i>	The Institute of International Auditors Indonesia	Paris, Prancis dan Basel, Swiss
32	BAPPENAS	<i>Summerschool: Cost Benefit Analysis of Investment Projects</i>	University of Milan	Milan, Italia
33	BAPPENAS	<i>Identity World 2017, Conference and Exhibition</i>	Quo Vadis World Events	Marseille, Prancis
34	BAPPENAS	<i>Rethinking Financial Inclusion Innovation for Policy and Practice</i>	Harvard Kennedy School Executive Education	Amerika Serikat
35	KEMENPANRB	<i>Public Service Monitoring Indonesia Workshop Australia</i>	UTS:IPPG (Institute for Public Policy and Government)	Sydney, Australia



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
36	BPK	<i>Strategic Thinking in Operational Planning Towards Effective Organization</i>	Maastricht School of Management (MSM)	Belanda
37	LAN	<i>Training Program on Policy Implementation Strategy and Evaluation</i>	JICE	Jepang
38	KEMENPANRB	<i>Public Service Performance Management Program: Using Performance Systems for Assessing the Merit and Worth Reforms</i>	University of Technology Sydney	Sydney, Australia
39	BKPM	<i>Leading Change and Organizational Renewal</i>	Stanford GSB	Stanford, California, Amerika Serikat
40	KEMLU	<i>Advanced Arbitration and Mediation</i>	International Law Institute	Washington, Amerika Serikat
41	BAPPENAS	<i>Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Think Tank)</i>	Harvard	Massachusetts, Amerika Serikat
42	BAPPENAS	<i>Monitoring and Evaluation</i>	IMA International	Bangkok
43	KEMLU	<i>The Trade Facilitation Agreement, and Regional Trade Agreements</i>	International Law Institute	Amerika Serikat
44	BAPPENAS	<i>Managing People for Better Performance</i>	Australian Awards managed by Coffey International Development	Canberra, Australia
45	KEMENDAGRI	<i>Executive Training Programme in Public Services and Digital Population</i>	Len Middelbeek Communication Support	Belanda
46	KEMLU	<i>Enhancing Leadership for Peacebuilding</i>	Geneva Centre for Security Policy	Jenewa
47	BAPPENAS, KEMENPAN, KEMENKEU, LAN, BKN	<i>Building Indonesia Civil Service Talent</i>	Korn Ferry-Hay Group	Indonesia - Malaysia
48	SEMUA PA	<i>Report Writing</i>	Queensland University	Brisbane, Australia
49	SEMUA PA	<i>Financial Audit</i>	Macquarie University	Sydney, Australia



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
50	SEMUA PA	<i>Talent Management for the Leaders</i>	USC (University of Southern California)	Los Angeles, California, Amerika
51	SEMUA PA	<i>Change Management</i>	New South Wales University	Sydney, Australia

Tabel 2.5. Perguruan Tinggi/Lembaga Pelaksana Diklat Non-Gelar SPIRIT Dalam Negeri

NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
1	BPKP	<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>	LSPMR	Jakarta, Indonesia
2	BPKP	<i>Pengembangan Human Resources Information System (HRIS)</i>	Brain Matics	Jakarta, Indonesia
3	BPKP	<i>Training Need Analysis (TNA)</i>	PT Trans Manajemen Integrasi	Yogyakarta, Indonesia
4	BPKP	<i>Legal Audit</i>	Jimly School Law and Government	Jakarta, Indonesia
5	BPN	<i>Workshop Assesor Training</i>	PT AG Indonesia	Bali, Indonesia
6	BPKP	<i>Negotiation and Mediation Skill</i>	Pusat Mediasi Nasional	Jakarta, Indonesia
7	BPKP	<i>Penyusunan Peta Proses Bisnis (SOP Makro)</i>	PT AG Indonesia	Jakarta, Indonesia
8	BKN	<i>Customer Service Enhancement (CSE)</i>	PPM Manajemen	Jakarta, Indonesia
9	BKPM	<i>Investment Marketing</i>	PT. Triniti Solusi Kreatifindo (TSK Consulting), Bandung	Bandung, Indonesia
10	BPKP	<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Jakarta, Indonesia
11	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan I)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
12	KEMLU	<i>Training for Diplomats: Introduction to Market Intelligence and Trade Related Support Services</i>	International Trade Centre	Bali, Indonesia



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
13	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan II)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
14	KEMENPANRB	<i>Workshop Penyusunan Model Kompetensi Kementerian PANRB (dan pendampingan)</i>	Refresh Indonesia	Malang
15	KEMENDAGRI	<i>Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Jakarta
16	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan III)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
17	LAN	<i>Developing Competency-Based People Management</i>	PT Trans Manajemen Integrasi	Yogyakarta, Indonesia
18	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan IV)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
19	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan V)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
20	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan VI)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
21	BKN	<i>Investigation Training Service</i>	PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia	Jakarta, Indonesia
22	LAN	<i>Penyusunan Pedoman Implementasi Integrated Human Resources Management</i>	PPM	Bandung, Indonesia
23	BAPPENAS	<i>Human Capital Development Plan</i>	PT Sinergi Pakarya Sejahtera	Bandung, Indonesia
24	BPN	<i>Competency Standards</i>	PT AG Indonesia	Indonesia
25	BKPM	<i>International Negotiation and Intercultural Communication</i>	Universitas Indonesia	Batam, Indonesia
26	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan VII)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
27	BKN	<i>Talent Management</i>	PT Daya Dimensi Indonesia	Jakarta, Indonesia
28	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan VIII)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
29	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan IX)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
30	BPN	<i>Workshop Pengelolaan Assesment Centre</i>	PT AG Indonesia	Cikeas, Bogor



NO.	PA	TOPIK DIKLAT	PROVIDER	NEGARA
31	BAPPENAS	<i>Project Appraisal and Project Valuation (Angkatan X)</i>	LPEM FEB UI	Jakarta, Indonesia
32	KEMENPANRB	Diklat Analisis Kebijakan	Gama Multi Yogyakarta	Yogyakarta, Indonesia
33	BAPPENAS	<i>Nurturing Leadership</i>	Motekar Prakarsa Daya	Indonesia
34	SEMUA PA	<i>Training Need Analysis and Training Evaluation</i>	PT Trans Manajemen Integrasi	Yogyakarta, Indonesia
35	SEMUA PA	<i>Competency Based Human Resource Management</i>	SGPP (School of Government and Public Policy)	Bogor, Indonesia

C. PROGRAM *SPLIT-SITE* DAN GPLP

Program *Split-Site* adalah program beasiswa kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan *Australia Awards Scholarship (AAS)* untuk program *S2 Linkage*, yaitu 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun di Australia. AAS membiayai pendidikan di Australia dan persiapan bahasa, sedangkan Pusbindiklatren membiayai pendidikan selama di Indonesia. Pada tahun 2017, program *Split-Site* ini dilaksanakan di Universitas Hasanuddin dan Griffith University, Australia.

Tahun 2017 juga menjadi awal dari pelaksanaan *Global Public Leadership Program (GPLP)* dari JICA. Program GPLP ini adalah beasiswa bagi ASN yang bekerja di bidang-bidang tertentu seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Diklat hanya dilaksanakan di Jepang untuk program S2, S3, dan pelatihan. Beberapa perguruan tinggi pelaksana diklat di Jepang, yaitu (1) National Graduate Institute for Policy Studies/GRIPS; (2) Waseda University; (3) Sophia University; (4) International University of Japan; (5) Kyoto University; (6) Hitotsubashi University; dan (7) University of Tsukuba (tentatif).





BAB III

INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN

A. RENCANA KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pusbindiklatren Bappenas dalam rangka meningkatkan kapasitas perencana di seluruh Indonesia, pada tahun 2016, Pusbindiklatren Bappenas mengelola beasiswa Diklat Gelar, non-Gelar dan Diklat penjurangan perencana. Program beasiswa Pusbindiklatren dikhususkan bagi perencana serta calon perencana yang berada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sasaran strategis Pusbindiklatren adalah tercapainya jumlah SDM perencana di Pusat dan Daerah yang berkualitas. Indikator ini diukur dengan melihat persentase jumlah SDM perencana pusat dan daerah yang berhasil mendapatkan sertifikasi dalam tahun berjalan. Pengertian sertifikasi di sini adalah jumlah peserta Diklat Gelar yang lulus pada tahun berjalan dan untuk Diklat non-Gelar adalah peserta yang telah lulus atau mendapatkan sertifikat Diklat tertentu.

Dalam tahun 2017, beberapa program/kegiatan yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1. Indikator Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualias, Sinergis, dan Kredibel	Persentase jumlah perencana yang dibina sesuai rencana	100 %	12 bulan
		Jumlah orang terdidik dan terlatih	1.300 orang	12 bulan
		Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi	15	12 bulan
2.	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih)	Nilai kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan Pusbindiklatren	Baik	12 bulan



Keterangan Tabel 3.1.:

1. **Persentase (%) jumlah SDM perencana pusat dan daerah yang mendapatkan sertifikasi dalam tahun berjalan.** Pencapaian indikator kinerja persentase jumlah SDM perencana pusat dan daerah yang berhasil mendapatkan sertifikasi dalam tahun berjalan dapat dilihat dari tingkat kelulusan peserta diklat gelar dan non-gelar.
2. **Jumlah orang terdidik dan terlatih (1.300 orang).** Jumlah orang terdidik dan terlatih adalah jumlah kelulusan karyasiswa pada tahun 2017 dan jumlah orang yang mengikuti dan lulus diklat non-gelar substantif pada tahun 2017.
3. **Jumlah dokumen kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi dan instansi lain.** Dalam menyelenggarakan kegiatan gelar dan non-gelar, Pusbindiklatren bekerja sama dengan universitas atau penyelenggara diklat gelar dan non-gelar untuk program PHRD-IV dan SPIRIT.
4. **Nilai kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan Pusbindiklatren.** Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan Pusbindiklatren dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan survei kepuasan peserta khususnya penerima beasiswa Pusbindiklatren. Survei kepuasan peserta dilakukan sesuai dengan siklus penyelenggaraan diklat, yaitu penyampaian informasi, seleksi, penempatan, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk mencapai target kinerja tersebut di atas, Pusbindiklatren menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa diklat gelar, diklat non-gelar, dan diklat JFP dengan rincian seperti ditunjukkan pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2. Kegiatan Diklat Pusbindiklatren 2017

PROGRAM GELAR PHRD-IV	DIKLAT NON-GELAR PHRD-IV	DIKLAT NON-GELAR SUBSTANTIF	DIKLAT JFP
<ul style="list-style-type: none"> ▪ S2 Dalam Negeri ▪ S2 Linkage Jepang ▪ S2 Jepang ▪ S3 Dalam Negeri ▪ S3 Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Training of Trainers Monitoring and Evaluation</i> ▪ <i>Training of Trainers Planning and Budgeting</i> ▪ <i>Staff Enhancement</i> ▪ Magang Dalam Negeri ▪ <i>Academic Exchange</i> untuk pengajar di Jepang ▪ <i>Academic Exchange</i> untuk pengajar di Indonesia ▪ <i>International Conference</i> ▪ <i>Government Think Tank Training</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan ▪ Kelayakan Proyek/<i>Project Assessment</i> ▪ Pengelolaan Bencana/<i>Disaster Management</i> ▪ PPD RPJMD ▪ <i>Public Private Partnership (PPP)</i> ▪ <i>Local Economic Resources Development (LERD)</i> ▪ <i>Monitoring dan Evaluasi</i> ▪ <i>Planning and Budgeting</i> ▪ <i>City Planning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FP Pertama ▪ FP Muda ▪ FP Madya ▪ FP Utama ▪ Penilaian Angka Kredit (PAK) ▪ Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK)



B. ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusbindikatren didukung dana sebesar Rp369.978.661.000 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dari sisi sumber pendanaan, anggaran sebesar ini terdiri atas APBN sebesar Rp47.266.745.000 (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); *loan* JICA sebesar Rp143.457.385.000 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan dana dari World Bank sebesar Rp179.254.531.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pada bulan Juli 2017, Kementerian PPN/Bappenas mengambil kebijakan untuk mengadakan kegiatan baru yang berimplikasi pada penghematan pagu anggaran Pusbindiklatren. Anggaran Pusbindiklatren sebesar Rp7.733.255.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) dialokasikan untuk kegiatan baru Bappenas tersebut.

Total realisasi anggaran Pusbindiklatren sebesar **Rp333.862.446.015 (90,24%)**, rincian realisasi dapat dilihat dalam **Tabel 3.3** di bawah ini.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Pusbindiklatren

SUMBER DANA	PAGU			REALISASI	
	AWAL	PENGHEMATAN	AKHIR	JUMLAH	% PAGU AKHIR
RM	Rp 55.000.000.000	Rp 6.418.255.000	Rp 19.911.745.000	Rp 16.534.674.226	83,04%
RMP	Rp 28.670.000.000	Rp 1.315.000.000	Rp 27.355.000.000	Rp 26.500.491.986	96,88%
SPIRIT	Rp 179.254.531.000	Rp -	Rp 179.254.531.000	Rp 175.543.040.610	97,93%
PHRD	Rp 143.457.385.000	Rp -	Rp 143.457.385.000	Rp 115.284.239.193	80,36%
JUMLAH	Rp 406.381.916.000	Rp 7.733.255.000	Rp 369.978.661.000	Rp 333.862.446.015	90,24%





BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil pelaksanaan kegiatan dari tiap-tiap bidang di lingkungan Pusbindiklatren. Dalam uraian hasil pelaksanaan kegiatan ini dijelaskan tentang gambaran umum/tujuan program/kegiatan, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tujuan program/kegiatan tersebut, realisasi hasil kegiatan beserta penjelasan atas penyebab realisasi anggaran tercapai atau tidaknya. Sementara itu, masalah-masalah yang muncul dalam program kegiatan diuraikan dalam bab selanjutnya termasuk rekomendasinya sebagai upaya perbaikan untuk tahun berikutnya.

A. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Hasil kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan diklat diuraikan ke dalam 6 (enam) bagian, yaitu (1) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknis, Program, Materi, dan Standar Pendidikan dan Pelatihan Perencana; (2) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Pendidikan; dan (3) Kegiatan Evaluasi Kebijakan Teknis, Program, serta Materi Pendidikan dan Pelatihan Perencana; (4) Penugasan Khusus; (5) Kegiatan Kesekretariatan PHRD-IV; dan (6) Kegiatan Kesekretariatan SPIRIT.

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknis, Program, Materi, dan Standar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencana

Kegiatan ini terbagi kembali menjadi lima sub-kegiatan, yaitu (a) Pelaksanaan Rintisan Program; (b) Pelaksanaan Rapat Koordinasi SPIRIT; (c) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non-Gelar; (d) *Training of Facilitator/TOF* Bagi Calon Pengajar Diklat Perencanaan; dan (e) *Sharing Session* SPIRIT dan PHRD-IV.

a. Pelaksanaan Rintisan Program

Fokus utama Pusbindiklatren dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah pada tahun 2017 adalah strategi mencapai pemerataan pembangunan Indonesia, terutama mendongkrak kapasitas pemerintah daerah kawasan tertinggal di Indonesia (KTI). Sementara itu, kendala yang dihadapi Pusbindiklatren selama ini adalah rendahnya partisipasi peserta yang berasal dari daerah KTI, khususnya wilayah Indonesia bagian Timur.

Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan kompetensi perencana yang multidisiplin, Pusbindiklatren juga melakukan kerja sama dengan program studi baru seperti Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebagai pelaksana diklat.



1) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

a) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PPN/Bappenas dan Pusbindiklatren bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun lingkup kerja sama tersebut melingkupi pengiriman peserta program pendidikan dan pelatihan gelar maupun non-gelar di bidang perencanaan pembangunan, penyelenggaraan seminar/*workshop*/penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan pembangunan, serta memberikan bantuan pendampingan ataupun asistensi tenaga ahli untuk mendukung kegiatan di Papua dan Papua Barat.

Dari kerja sama tersebut, Pusbindiklatren akan memberikan informasi tentang kebijakan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenis dan sifat program berdasarkan kebijakan di instansi masing-masing dan berdasarkan ketersediaan dana, serta menyediakan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan pembiayaan *cost sharing* dan akan diatur di dalam buku *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*.

b) Pemerintah Kabupaten Soppeng

Sejalan dengan kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Papua, Pusbindiklatren juga bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Soppeng. Adapun lingkup kerja sama tersebut melingkupi pengiriman peserta program pendidikan dan pelatihan gelar maupun non-gelar di bidang perencanaan pembangunan, penyelenggaraan seminar/*workshop*/penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di bidang perencanaan pembangunan, serta memberikan bantuan pendampingan ataupun asistensi tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini adalah diselenggarakannya Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada tanggal 24–28 Juli 2017 yang bertempat di ruang rapat A dan B Gedung Pusbindiklatren Bappenas. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat membekali para peserta pengetahuan dan kemampuan mengenai sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan.

2) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

a) Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua

Pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan perencana Aparatur Sipil Negara Papua dan Papua Barat dilaksanakan melalui beberapa metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pusat pendidikan pelatihan oleh masing-



masing K/L berkaitan dengan pemetaan program pendidikan dan pelatihan dari Pemda Papua dan Papua Barat serta dan BKN Papua dan Papua Barat. Selain FGD, juga dilakukan *in-depth interview* dengan beberapa ASN di dua kabupaten terpilih serta *workshop* yang telah dilaksanakan pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan gelar dan non-gelar bagi ASN Papua dan Papua Barat, dilakukan kerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa). Oleh karena itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan kedua universitas tersebut oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan rektor dari universitas yang bersangkutan, dan diketahui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. NKB tersebut mencakup kerja sama secara umum (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Selanjutnya dokumen kerja sama yang bersifat lebih teknis diatur melalui perjanjian kerjasama teknis (*technical agreement*) yang ditandatangani oleh kepala Pusbindiklatren Bappenas dan Kepala Program Pascasarjana Uncen dan Unipa.

b) Magister Ilmu Ekonomi (MIE) Universitas Brawijaya

Kerja sama antara Pusbindiklatren dengan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya bertujuan untuk pelaksanaan diklat *double degree linkage*. Pada tahun pertama, perkuliahan akan dilaksanakan di MIE UB dan pada tahun kedua akan dilaksanakan di Rikkyo University.

c) Magister Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada

Kerja sama antara Pusbindiklatren dengan program studi Magister Teknik Geomatika UGM dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan meningkatkan kapasitas ASN perencana pada bidang geospasial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengumpulan informasi geospasial.

d) Rikkyo University, Jepang

Penandatanganan kerja sama dengan Rikkyo University pada tahun 2017 merupakan perpanjangan kerja sama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya untuk pelaksanaan diklat S2 *linkage*.

Memorandum of Understanding (MoU) telah ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2017. Di dalam perjanjian disepakati bahwa Rikkyo University akan melaksanakan diklat gelar S2 *linkage* di bidang *Public Management and Administration*, sedangkan pada tahun pertama diklat gelar akan dilaksanakan di Universitas Indonesia atau Universitas Padjadjaran dengan bidang ekonomi.



e) Sekolah Vokasi UGM

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan program studi D4 P2EK yang disesuaikan dengan kebutuhan di bidang perencanaan pembangunan agar menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil, siap kerja, dan dapat dikembangkan kompetensinya.

Ruang lingkup kerja sama di antaranya adalah penyusunan dan penyempurnaan kurikulum program Studi D4 P2EK, sosialisasi program Sekolah Vokasi D4 P2EK, kesempatan ajar sebagai dosen tamu, kesempatan magang bagi mahasiswa P2EK, penawaran lulusan sebagai tenaga kerja di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan Laboratorium Perencanaan Ekonomi Kewilayaan, serta penelitian dan kajian bersama.

Melalui kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Sekolah Vokasi P2EK ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan perencana yang berkualitas dan menghasilkan *smart planner* yang dapat mengurangi kesenjangan di Indonesia.

3) Kerja Sama dengan Organisasi Internasional

Pada tahun 2017 sempat dilakukan pembahasan rencana kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Pemerintah Jerman, Pemerintah Prancis, Pemerintah Selandia Baru, serta Nuffic Neso untuk memfasilitasi karyasiswa Pusbindiklatren yang menjalani studi di luar negeri. Namun, dikarenakan para pihak belum mencapai kesepakatan dalam skema pembiayaan kegiatan maka kerja sama ini tidak dapat direalisasikan.

4) Kelanjutan Program SPIRIT (HRDBR/SPIRIT II)

Dengan akan berakhirnya proyek SPIRIT pada Desember 2017, Pusbindiklatren mulai menginisiasi pelaksanaan kegiatan baru bernama *Human Resource Development for Bureaucratic Reform* (HRDBR). Kegiatan persiapan yang dilakukan mencakup pembahasan desain proyek seperti kegiatan dan komponen pelaksanaan, pembahasan administrasi kegiatan seperti pencantuman kegiatan dalam *green book*, serta persiapan teknis lainnya. Adapun *output* yang dihasilkan dari kegiatan persiapan kelanjutan program SPIRIT ini adalah dokumen kesiapan atau *readiness criteria* kegiatan HRDBR yang merupakan dokumen persyaratan pengusulan kegiatan dalam *Green Book* 2017.

HRDBR/SPIRIT II didesain tidak hanya diperuntukkan bagi 11 kementerian/lembaga (K/L) seperti pada program SPIRIT. Target HRDBR diprioritaskan bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia (*Human Capital Development Plan/HCDP*). Selain itu, lingkup kegiatan HRDBR akan lebih luas dengan menambah kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi, selain pemberian beasiswa.



b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi SPIRIT

Rapat koordinasi SPIRIT selama tahun 2017 diselenggarakan melalui rapat koordinasi di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kegiatan di antaranya: instansi sasaran (*Participating Agency/PA*), *Project Implementing Unit* (PIU), *Project Coordinating Unit* (PCU), dan *Steering Committee* (SC).

1) Rapat Koordinasi PIU-PA

Rakor dilaksanakan di Ballroom Hotel Crowne Plaza, Semarang, pada tanggal 14 Maret 2017 dan pada tanggal 10 – 12 Desember 2017 di Hotel BW Suite, Belitung. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusbindiklatren selaku Sekretaris PCU SPIRIT dan dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan PA, PIU, dan konsultan.

Beberapa pokok bahasan pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Sistem *monitoring* karyasiswa gelar selama tahun 2017;
- Mekanisme pengembalian dana dari karyasiswa gelar yang gagal studi;
- Status *living allowance* untuk karyasiswa di luar negeri yang menyelesaikan studi di Indonesia dalam masa Nota Persetujuan masih berlaku;
- Pemanfaatan sisa dana pada kegiatan tahun 2017;
- HCD dan *Annual Working Plan 2017* untuk non-gelar; dan
- Kebijakan provider pelaksana program non-gelar:

2) Rapat Koordinasi SC

Rapat koordinasi *Steering Committee* (SC) SPIRIT diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di Hotel Pullman, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Ketua SC SPIRIT dan dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi sasaran, PCU, PIU Bappenas, serta PIU Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk membahas mengenai *update* Pelaksanaan Program SPIRIT 2011–2017, persiapan *closing project* SPIRIT, serta persiapan SPIRIT *Project Review Mission* (*Closing Project*).

Beberapa pokok pembahasan rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut:

- Masa studi karyasiswa yang membutuhkan perpanjangan dikarenakan melebihi tanggal *closing date* dapat dikomunikasikan kembali dengan pihak Bank Dunia untuk diminatakan izin perpanjangan studi sampai dengan bulan Juni 2018 atau Oktober 2018. Karyasiswa yang akan diberikan perpanjangan studi melebihi Maret 2018 harus diidentifikasi oleh PIU terlebih dahulu (*case by case*) mengenai alasan perpanjangan hingga perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Apabila pihak Bank Dunia tidak menyetujui perpanjangan tersebut, maka pembiayaan karyasiswa dikembalikan ke masing-masing PA;
- Terkait *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan *Re-entry Program*, setiap PA diminta melakukan *update* sebelum *closing date* (bisa dilakukan juga pada saat *mission*);
- Fokus pada *talent management* setelah program SPIRIT ini berakhir, dengan HCDP yang harus dimiliki oleh setiap instansi sasaran proyek, baik instansi pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi;
- Tiap-tiap PIU harus mulai menyiapkan data dan dokumen untuk kegiatan *mission* penutupan proyek dari Bank Dunia.



3) Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara PIU, konsultan, PCU, pihak lainnya dalam pelaksanaan program SPIRIT. Adapun rapat yang dilakukan adalah dalam rangka pembahasan rencana kerja (*Annual Working Plan*) dan *alumni survey*.

c. Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non-Gelar (PHRD-IV)

Rapat koordinasi diklat gelar dan non-gelar dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun untuk menyampaikan rencana kerja maupun jadwal pelaksanaan dan penyampaian kebijakan tahunan (awal tahun) dan evaluasi pelaksanaan diklat pada tahun berjalan (akhir tahun).

Rapat Koordinasi pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama adalah Rapat Koordinasi Non-Gelar awal tahun dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di Ruang Rapat A-B lantai 1 Gedung Pusbindiklatren Bappenas. Rapat ini dihadiri oleh para center pelaksana pelatihan Non-Gelar, staf Pusbindiklatren, PFP, dan para widyaiswara. Beberapa kesepakatan rakor adalah sebagai berikut:

- Tiap program studi/*center* pelaksana pelatihan substantif harus mengirimkan tanggal pelaksanaan pelatihan;
- Pusbindiklatren sedang menjalankan tahap seleksi peserta;
- Perlunya ditambahkan riwayat kesehatan peserta dalam data pribadi pendaftaran peserta;
- Pusbindiklatren perlu mengkaji sanksi-sanksi yang akan ditetapkan bagi peserta yang menyalahi prosedur pelatihan ataupun yang didapati ketidaksesuaian data;
- Pusbindiklatren dapat menyediakan acuan penentuan *unit cost* untuk *center* dalam menyusun RAB pelatihan.

Kedua adalah Rapat Koordinasi Program Studi Gelar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat A-B lantai 1 Gedung Pusbindiklatren Bappenas. Rapat ini dihadiri oleh para kepala atau perwakilan program studi, staf Pusbindiklatren, PFP, dan para widyaiswara.

d. Training of Facilitator (ToF) Bagi Calon Pengajar Diklat Perencanaan

Terdapat tiga kelompok jabatan yang dapat ditugaskan untuk mengajar diklat non-gelar yang diselenggarakan Pusbindiklatren, yaitu widyaiswara (WI), Pejabat Fungsional Perencana (PFP), dan pejabat struktural (administrator, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama). Agar para *trainer/fasilitator* memiliki kompetensi yang tinggi, diperlukan *training of facilitator* sebagai salah satu hal yang wajib diikuti oleh *trainer/fasilitator*.

Keikutsertaan dalam ToF tersebut merupakan salah satu kriteria utama/wajib. Kriteria lainnya, keikutsertaan dalam penyusunan modul diklat non-gelar dimaksud, pengalaman bekerja yang relevan di bidang diklat non-gelar, dan tingkat pendidikan. Agar penugasan para *trainer/fasilitator* dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel maka keempat kriteria tersebut perlu diatur dan masuk dalam mekanisme penunjukan *trainer/fasilitator* dalam aplikasi WiFAST.



Tujuan kegiatan ini adalah :

- meningkatkan dan menyamakan kompetensi para *trainer/fasilitator* diklat non-gelar yang diselenggarakan Pusbindiklatren;
- menjamin kualitas diklat non-gelar khususnya dari sisi pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi); dan
- mengatur penunjukan *trainer/fasilitator* berdasarkan kriteria dan mekanisme WiFast.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Ruang Kelas A dan B, Gedung Pusbindiklatren, Jalan. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat.

e. **Sharing Session Program Gelar SPIRIT dan PHRD-IV**

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyebarluasan (*sharing*) hasil tesis dan disertasi alumni Program Gelar SPIRIT dan PHRD-IV. Hasil penelitian tesis dan disertasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, rekomendasi kebijakan atau bahkan dapat langsung diaplikasikan di tiap-tiap unit atau di lembaga. Secara rinci, kegiatan *Sharing Session* Program Gelar SPIRIT dan PHRD-IV ini bertujuan:

- menyebarkan hasil penelitian tesis dan disertasi alumni SPIRIT dan PHRD-IV kepada *stakeholders* terkait melalui seleksi, penerbitan ringkasan, serta presentasi tesis dan disertasi alumni SPIRIT dan PHRD-IV yang terpilih;
- mendiskusikan hasil tesis dan disertasi alumni SPIRIT dan PHRD-IV untuk dapat diimplementasikan dalam unit kerja alumni atau lembaga pemerintah lainnya; dan
- mendokumentasikan hasil tesis dan disertasi alumni SPIRIT dan PHRD-IV sebagai bagian dari kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- **Sharing Session I** bagi alumni program gelar SPIRIT diselenggarakan tanggal 25 September 2017 di Ruang Rapat SS 1-3, Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat;
- **Sharing Session II** bagi alumni program gelar PHRD-IV diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2017 di Ruang Kelas A-B lantai 1, Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat; dan
- **Sharing Session III** bagi alumni program gelar SPIRIT dan PHRD-IV diselenggarakan tanggal 27 November 2017 di Ruang Kelas A-B lantai 1, Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;

2. **Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Pendidikan**

Kegiatan ini terbagi menjadi 8 (delapan) sub-kegiatan, yaitu (a) Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana dan Diklat Perencana; (b) Pameran Beasiswa dan JFP; (c) Penerbitan Majalah Simpul Perencana; (d) Penyusunan Buku Pedoman, Panduan, dan SOP; (e) Penerbitan Informasi dalam Bentuk Buku dan Publikasi Lainnya; (f) Pengelolaan Situs/*Website*; (g) Pengelolaan Perangkat *Distance Learning System /DLS*; (h) Seminar Nasional dan Temu Alumni; serta (i) Pengembangan Kompetensi Staf Pusbindiklatren.



a. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Diklat Perencana

Dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai program dan kebijakan Pusbindiklatren mengenai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan penyelenggaraan diklat gelar dan non-gelar maka Pusbindiklatren melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan K/L di seluruh Indonesia. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk (1) menyampaikan kebijakan dan program pusbindiklatren; (2) memberikan informasi mengenai mekanisme beasiswa diklat gelar dan non-gelar; dan (3) mendapatkan masukan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan pembinaan JFP dan penyelenggaraan diklat perencanaan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan pegawai di instansi perencanaan tempat sosialisasi. Pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah melakukan Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana dan Program Diklat Perencanaan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung; serta 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Pameran Beasiswa dan JFP

Dalam rangka memberikan informasi diklat perencanaan dan JFP sebanyak dan seluas-luasnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah, Pusbindiklatren melakukan berbagai kegiatan secara berkala dan terencana. Salah satu kegiatan tersebut adalah dengan mengikuti Pameran Program Beasiswa yang dilaksanakan oleh kedutaan, instansi, serta Lembaga Donor Pemberi Beasiswa. Pusbindiklatren juga mengadakan pameran dalam agenda rutin yang sudah terjadwalkan setiap tahunnya seperti Sosialisasi Program Beasiswa dan JFP atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah mengikuti 3 (tiga) kegiatan Pameran Beasiswa atas undangan dari kedutaan dan instansi pemberi beasiswa, yaitu: *Java Education Festival 2017* (JEF 2017), *Holland Scholarship Day* (HSD), dan Pameran Pendidikan Pusdiklat *Edufair*.

c. Penerbitan Majalah Simpul Perencana

Seperti tahun-tahun sebelumnya, majalah Simpul Perencana terbit 2 (dua) volume setahun, yaitu Vol. 29 (bulan April 2017) dan Vol. 30 (bulan September 2017). Majalah Simpul Perencana adalah majalah *inhouse* yang ditujukan sebagai media bagi perencana dan alumni program gelar dan non-gelar di pemerintahan pusat dan daerah untuk menyalurkan ide maupun pemikiran mereka berkaitan dengan perencanaan pembangunan sekaligus ajang untuk menulis artikel di media cetak. Majalah Simpul Perencana juga sebagai sarana sosialisasi isu-isu pembangunan yang sedang berkembang maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembinaan maupun pengembangan JFP.

Majalah Simpul Perencana adalah majalah yang telah terakreditasi oleh LIPI dengan nomor akreditasi ISSN 1693–4229. Dalam setiap penerbitannya, majalah Simpul Perencana mempunyai rubrik tetap, yaitu Gerbang, Cakrawala, Informasi Beasiswa, Liputan, Sosok Alumni, Akademika, Opini, dan Selingan.

Kegiatan penerbitan majalah Simpul Perencana dilaksanakan dengan rapat koordinasi (untuk menentukan tema, tokoh/pejabat/narasumber) dan perjalanan dinas untuk peliputan/wawancara. Tahun 2017, telah diterbitkan 2 (dua) volume sebagai berikut:



1. Volume 29 (terbit bulan April 2017) dengan tema “Mengukur Perkembangan dan Kemajuan Perencanaan Pembangunan dalam Menerjemahkan Dua Tahun Pelaksanaan Nawa Cita”. Tema ini diambil untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang penerjemahan dan pelaksanaan nawa cita.
2. Volume 30 (terbit bulan September 2017) dengan tema “Inovasi Kepala Daerah Dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah”. Tema ini diambil untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang inovasi di daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

d. Penyusunan Buku Pedoman, Panduan, *Standard Operating Procedure* (SOP)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholders* dan menjaga kualitas pelaksanaan diklat perencanaan bagi ASN di instansi pusat dan daerah, pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah menyusun buku pedoman dan panduan bagi pelaksanaan diklat perencanaan yang dipergunakan oleh Pusbindiklatren sebagai penyelenggara diklat maupun kepada program studi sebagai pelaksanaan diklat, baik gelar maupun non-gelar.

Di samping itu, sebagai penyelenggara diklat, Pusbindiklatren ingin senantiasa memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* dengan menyusun 3 (tiga) SOP yaitu (1) SOP Pelayanan Publik Pusbindiklatren; (2) SOP Pengaduan Pelayanan Publik; dan (3) SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi Terhadap Pelayanan Publik.

e. Penerbitan Informasi dalam Bentuk Buku dan Publikasi Lainnya

Dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para masyarakat khususnya ASN pusat dan daerah tentang program-program Pusbindiklatren dan informasi yang terkait dengan program-program tersebut, Pusbindiklatren telah menyusun media informasi dalam format cetak yang dikirimkan kepada para Pimpinan Pengelola Pengembangan SDM di instansi pusat dan daerah. Pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah mencetak berbagai informasi dalam bentuk brosur/*leaflet* dan poster diklat gelar dan non-gelar serta Buku Bunga Rampai Tesis/Disertasi Program Gelar SPIRIT dan PHRD-IV.

f. Pengelolaan Situs (*Website*)

Kegiatan pengelolaan situs (*website*) Pusbindiklatren meliputi (1) pemutakhiran tampilan situs; (2) pemasangan tautan situs; (3) pengelolaan aplikasi Sipena; (4) pengelolaan koordinasi dan integrasi situs, *database*, aplikasi; serta (5) pengelolaan sarana dan prasarana.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi seluas-seluasnya selain melalui alat peraga atau konvensional, Pusbindiklatren juga telah mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa pengembangan situs Pusbindiklatren yang setiap tahun diperbaharui, melakukan kerja sama dengan instansi daerah dengan memasang tautan situs Pusbindiklatren di situs pemda, dan juga kegiatan koordinasi terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan berbagai pihak.



g. Pengelolaan Perangkat *Distance Learning System* (DLS)

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pusbindiklatren di bidang teknologi dan informasi serta meningkatkan efisiensi, baik waktu dan anggaran, Pusbindiklatren telah menggunakan DLS dalam pelaksanaan diklat (ajar-mengajar). DLS adalah perangkat yang dipergunakan untuk komunikasi jarak jauh untuk mendukung pelaksanaan diklat secara *online*. Untuk menjaga agar perangkat tersebut dapat lebih baik pada saat pemakaian, Pusbindiklatren telah melakukan pengelolaan perangkat DLS berupa rapat koordinasi dengan prodi yang memanfaatkan perangkat DLS, peninjauan pemanfaatan perangkat, dan sinkronisasi pemanfaat perangkat DLS.

h. Seminar Nasional dan Temu Alumni

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Pusbindiklatren dalam pengelolaan program beasiswa bagi ASN Pusat dan Daerah, serta untuk dapat mengetahui peran para penerima program beasiswa baik bagi instansinya khususnya maupun Negara pada umumnya, maka Pusbindiklatren tahun 2017 telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan Temu Alumni pada tanggal 1-2 November 2017 di Jakarta dengan mengambil tema “Kebijakan dan strategi peningkatan kualitas SDM Aparatur ASN serta Peran dan kontribusi Alumni dalam Pembangunan” serta Diskusi kelompok Temu Alumni dengan tema “Pentingnya Jejaring Alumni dan Pembentukan Forum Alumni”

i. Pengembangan Kompetensi Staf Pusbindiklatren

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren kepada para *stakeholders* dan meningkatkan kompetensi pimpinan dan staf Pusbindiklatren guna meningkatkan tugas dan fungsi Pusbindiklatren, pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah menyelenggarakan diklat *Public Speaking* dan Penggunaan Aplikasi Komputer. Diklat tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Star Training yang dilaksanakan dalam 2 angkatan di Bogor. Angkatan I bagi pimpinan tanggal 13–14 Juni 2017 dan Angkatan II bagi staf tanggal 15–19 Juni 2017.

3. Kegiatan Evaluasi Kebijakan Teknis, Program dan Materi Diklat Perencana

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu (a) Penyempurnaan Desain Kurikulum Diklat; (b) Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pusbindiklatren; dan (c) Penyusunan dan Evaluasi Program Pusbindiklatren.

a. Penyempurnaan Desain Kurikulum Diklat

Pusbindiklatren memegang peranan penting di dalam mengembangkan kapasitas para perencana, dan memperkecil gap antara para perencana pusat dan daerah, sehingga perlu dikembangkan diklat perencanaan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan khususnya kebutuhan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pusbindiklatren secara rutin melakukan penyempurnaan/reviu kurikulum pelatihan yang telah ada maupun pelatihan baru sesuai dengan dinamika kebutuhan.

Proses penyempurnaan kurikulum diklat non-gelar melibatkan JFP dan Widyaiswara serta direktorat teknis Bappenas terkait dengan topik pelatihan. Kegiatan penyempurnaan



kurikulum ini bertujuan untuk mereviu 8 kurikulum dan modul diklat yang ada serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan ataupun peraturan baru. Aspek penyempurnaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) pengintegrasian prinsip berbasis HAM atau (*Human Rights Based Approach* - HRBA) dalam kurikulum dan modul diklat PPD RPJMD, diklat *planning and budgeting*, serta diklat penjenjangan JFP tingkat pertama dan muda.
- 2) Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam kurikulum dan modul diklat non-gelar substantive maupun diklat penjenjangan JFP.

Selain itu, Pusbindiklatren mendapatkan mandat untuk mereview kurikulum diklat *city planning* yang dalam pembahasannya melibatkan JFP dan Widyaiswara Pusbindiklatren, serta direktorat teknis Bappenas terkait yang diantaranya adalah Direktorat DTTP, Direktorat PPP, Renortala, dan lainnya.

b. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pusbindiklatren

Rapat koordinasi evaluasi kinerja Pusbindiklatren merupakan forum bagi seluruh staf dan pimpinan di Pusbindiklatren dalam menyampaikan program capaian target kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Rangkaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Survey lokasi rapat koordinasi
- 2) Rapat koordinasi gelombang I yang merupakan rapat untuk mengevaluasi capaian target kinerja Pusbindiklatren pada semester I tahun 2017. Rapat ini diselenggarakan di Grage Hotel Cirebon pada tanggal 2 – 4 Agustus 2017. Kegiatan ini meliputi:
 - Rapat dan diskusi seluruh staf, JFP, dan widyaiswara dengan pimpinan.
 - Team building.
- 3) Rapat Koordinasi gelombang II yang merupakan rapat untuk mengevaluasi capaian target kinerja Pusbindiklatren pada semester II tahun 2017. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Jayakarta, Banten pada November 2017.

c. Penyusunan dan Evaluasi Program Pusbindiklatren

1) Koordinasi Penyusunan Program Pusbindiklatren

Koordinasi penyusunan program diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan persiapan penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren yang meliputi pembahasan anggaran dan kegiatan, koordinasi internal, rapat pembagian dan rencana kerja, dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan Pusbindiklatren.

2) Survei Alumni dan PA SPIRIT

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program SPIRIT, Pusbindiklatren dibantu oleh konsultan melakukan kegiatan survei alumni untuk mengukur keberhasilan program tersebut selama periode pelaksanaan 2011–2017. *Participating agency*



(PA) atau instansi sasaran survei meliputi 10 kementerian/lembaga di bawah koordinasi PIU Bappenas dan 11 Direktorat Jenderal/Unit Kerja Eselon II di bawah koordinasi PIU Kementerian Keuangan. Adapun tujuan dari *Alumni and Participating Agency Staff Survey* adalah:

- a) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Alumni SPIRIT yang meliputi alumni program *egree* maupun *non-degree*; dan
- b) Untuk mengevaluasi dampak program SPIRIT terhadap pengembangan kapasitas PA dengan didaparkannya alumni pada program degree maupun non-degree.

Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah responden program gelar yang menyatakan puas terhadap keseluruhan program SPIRIT adalah sebesar 96%, sedangkan hasil survei 2015 sebesar 86%. Sementara itu, responden program non-gelar yang menyatakan puas terhadap keseluruhan program SPIRIT adalah sebesar 94%. Secara umum, hasil survey menunjukkan lebih tingginya persentase kepuasan responden pada tahun 2017 dibanding survei 2015 untuk di seluruh kegiatan Program SPIRIT.

Persentase responden alumni program gelar yang menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi individu alumni adalah sebesar 92% dan 90% menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi lembaga (Unit Kerja). Salah satu manfaat Program Gelar bagi lembaga antara lain diperlihatkan oleh seorang alumni berasal dari Badan Kepegawaian Negara yang berkontribusi melalui keanggotaannya dalam tim penyusunan Peraturan Kepala Badan, dimana 8 buah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil telah berhasil disusun.

Sementara itu, responden program diklat non-gelar yang menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi individu alumni adalah sebesar 97% dan 95% menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi lembaga/institusi. Salah satu manfaat program non-gelar bagi lembaga adalah kontribusi salah satu alumni dalam pengelolaan *Assessment Center* di Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengkaji standar biaya bagi asesor serta mengusulkan adanya payung hukum dalam melaksanakan asesmen.

Dari 178 orang responden yang mengembalikan kuesioner, didapatkan bahwa sebanyak 50 orang (28,1%) telah mendapatkan promosi di Unit Kerja mereka. Dari 126 orang responden yang ada di bawah PIU Bappenas, yang sudah mendapat promosi adalah sebanyak 31,0%, sedangkan di PIU Kemenkeu dari 52 orang yang sudah mendapat promosi sebanyak 21,2%.

Dari hasil survei didapatkan bahwa ada peningkatan kinerja di unit kerja alumni program gelar antara sebelum dan sesudah alumni mengikuti Program SPIRIT. Berdasarkan analisis SEM diketahui bahwa nilai t-observasi sebesar 11.91 yang berarti lebih besar dibandingkan dengan nilai t-table sebesar 1.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata kinerja alumni terhadap Kinerja Unit Kerja program gelar SPIRIT. Besaran sumbangan pengaruh variabel kinerja alumni program gelar terhadap kinerja unit kerja alumni dapat dilihat pada hasil R^2 sebesar 0,6314 atau 63,14%, sedangkan sisanya sebesar 36,86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.



Dari hasil survei didapatkan bahwa ada peningkatan kinerja di unit kerja alumni diklat non-gelar antara sebelum dan sesudah alumni mengikuti program. Berdasarkan analisis SEM diketahui bahwa nilai t-observasi sebesar 8.97 yang berarti lebih besar dibandingkan dengan nilai t-table sebesar 1.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata kinerja alumni terhadap kinerja unit kerja program non-gelar SPIRIT. Besaran sumbangan pengaruh variabel kinerja alumni program non gelar terhadap kinerja unit kerja alumni dapat dilihat pada hasil R^2 sebesar 0,5528 atau 55,28%, sedangkan sisanya sebesar 44,72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3) Survei Kepuasan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusbindiklatren melakukan survei kepuasan penerima beasiswa Pusbindiklatren, yaitu karyasiswa yang sedang menempuh studi diklat gelar dan peserta diklat non-gelar. Survei dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin kepuasan karyasiswa dan peserta diklat, selain sebagai indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Survei dilakukan sesuai dengan siklus penyelenggaraan diklat, yaitu pada saat penyampaian informasi (sosialisasi), seleksi, penempatan, pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah melakukan survei kepuasan peserta yang mengikuti diklat gelar dan non-gelar. Survei telah dilakukan terhadap sejumlah 1.218 responden. Pencapaian nilai rata-rata kepuasan peserta diklat gelar dan non-gelar tahun 2017 adalah 92 atau sangat baik.

Penilaian terhadap pelayanan Pusbindiklatren oleh peserta program gelar mencapai 93,4 persen dan peserta program non-gelar mencapai 92%. Aspek pelayanan yang dinilai dalam survey ini yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, pendaftaran dan seleksi, dan tunjangan; seperti yang dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Diklat Tahun 2017

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI CAPAIAN (%)	
		KARYASISWA GELAR	PESERTA NON-GELAR
1	Penyebaran Informasi	94	92
2	Pelayanan Staf	97	93
3	Penempatan	94	91
4	Pendaftaran dan seleksi	99	93
5	Tunjangan	83	N/A
	RATA-RATA	93,4	92

Secara keseluruhan, nilai kepuasan peserta diklat gelar dan non-gelar tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan transparansi dan reformasi yang dilakukan oleh Pusbindiklatren serta pemanfaatan



dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan diklat baik gelar maupun non-gelar yang secara teknis diimplementasikan melalui peningkatan: (1) Inovasi pelayanan yang dilakukan dalam hal pendaftaran, seleksi, penempatan, pemantauan dan evaluasi diklat gelar dan non-gelar dengan menggunakan teknologi informasi (*web* atau *online*) seperti *e-registration* dan *e-monev*; (2) pelayanan informasi kepada karyasiswa dan peserta diklat melalui berbagai media seperti internet, email, telepon, leaflet, brosur dan *WhatsApp*; (3) adanya perbaikan sistem dan kebijakan pembayaran biaya hidup karyasiswa sehingga tidak adanya lagi keterlambatan pengiriman biaya hidup kepada karyasiswa.

Di sisi lain, penilaian untuk pelayanan peserta diklat-non gelar khususnya aspek penempatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7% yang disebabkan oleh 1). penempatan diklat tidak sesuai dengan prioritas pilihan peserta, 2). pemanggilan peserta cadangan yang mendadak, dan 3). jadwal yang diberikan oleh prodi pelaksana bertepatan dengan kesibukan instansi peserta.

Secara umum, dengan pencapaian target kinerja tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kinerja Pusbindiklatren pada tahun 2017 sangat baik. Namun, pencapaian target kinerja tersebut bentuknya masih bersifat *output* kegiatan atau keluaran yang bersifat jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja dalam jangka panjang akan dilakukan juga pengukuran dampak atau *outcome* dari kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan Diklat. Kegiatan ini biasanya disebut survei alumni atau *tracer study*. Survei alumni ditujukan untuk melihat manfaat Diklat bagi kinerja instansi asal peserta dan terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas individu peserta. Untuk program SPIRIT survei alumni telah dilakukan pada tahun 2015 2016 sebagai *baseline* (pra) dan dilanjutkan pada survei lanjutan (pasca) pada tahun 2017 ini. Sedangkan untuk program PHRD-IV survei alumni dilakukan pada tahun 2017 sebagai *baseline* (pra) dan akan dilanjutkan pada survei lanjutan (pasca) pada tahun 2018 atau 2019.

4. Penugasan Khusus

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu (a) Penyusunan Laporan Kerja Pusbindiklatren 2017; (b) Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi; dan (c) Penyusunan e-Monev.

a. Penyusunan Laporan Kinerja Pusbindiklatren 2017

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan yang dihasilkan oleh keseluruhan kegiatan Pusbindiklatren Tahun 2017 yang meliputi pelaksanaan indikator kinerja utama (IKU) Pusbindiklatren berupa:

- 1) **Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualias, Sinergis, dan Kredibel**, terdiri atas:
 - Persentase jumlah rencana yang dibina sesuai rencana (telah melebihi target dari 100% menjadi 121%);
 - Jumlah orang terdidik dan terlatih (telah melibih target dari 1.300 orang menjadi 1.728 orang);



- Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi (telah melebihi target dari 15 dokumen menjadi 22 dokumen).
- 2) Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih),** terdiri atas:
- Nilai kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan Pusbindiklatren (telah melebihi target dari penilaian baik menjadi sangat baik).

b. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren telah melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu penelaahan terhadap kebijakan dan standar pelayanan, *Standard Operating Procedure* (SOP) pengaduan, tindak lanjut pengaduan, peningkatan budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat, dan peningkatan penggunaan teknologi. Dalam rangka mendukung penerapan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas maka perlu disusun laporan perkembangan pelayanan publik Pusbindiklatren tahun 2017.

Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pusbindiklatren meliputi (1) Kebijakan Standar Pelayanan; (2) Budaya Pelayanan Prima; (3) Pengelolaan Pengaduan; (4) Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik; dan (5) Pemanfaatan Teknologi Informasi.

1) Kebijakan Standar Pelayanan

Hasil yang telah dicapai adalah diterbitkannya Buku Panduan Karyasiswa 2017, SOP Pelayanan, Pengaduan, dan Penghargaan dan Sanksi 2017, Pedoman dan Panduan Pelaksanaan Diklat 2017, serta Penyempurnaan Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat Non-Gelar 2017.

- a) Maklumat Standar Pelayanan (sudah dipublikasikan dalam situs Pusbindiklatren)
- b) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan (SOP Pelayanan, Pengaduan, dan Penghargaan dan Sanksi 2017),

2) Budaya Pelayanan Prima

- a) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
- b) Informasi tentang pelayanan telah mudah diakses dari berbagai media (*website, leaflet*, Majalah Simpul Perencana, dan Migrasi Transpar SPIRIT)

3) Pengelolaan Pengaduan

- a) Terdapat media pengaduan pelayanan (e-tamu)
- b) Terdapat SOP Pengaduan Pelayanan (SOP Pengaduan Pelayanan Publik Pusbindiklatren 2017/2018)



4) **Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kepuasan publik**

- a) Survei kepuasan terhadap pelayanan pelaksanaan JFP dengan hasil baik.
- b) Survei kepuasan terhadap pelayanan pelaksanaan diklat dengan hasil sangat baik.

5) **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Hasil yang telah dicapai adalah sistem pendaftaran *online*, monev *online*, situs Sipena, JFP *Account*, dan aplikasi WiFast.

c. **Penyusunan e-Monev**

Dalam kegiatan ini dilakukan *input* hasil pelaksanaan kegiatan triwulanan yang meliputi realisasi pelaksanaan diklat gelar dan non-gelar serta realisasi anggaran 2017. Hasil yang dicapai adalah telah terinputnya hasil kegiatan triwulanan sepanjang tahun 2017.

5. **Kegiatan Kesekretariatan SPIRIT**

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu (a) Rapat Koordinasi; (b) Migrasi Data Transpar; (c) *Alumni Survey*; (d) *Technical Review*; dan (e) Penyusunan *Project Completion Report*.

a. **Rapat Koordinasi**

Rapat koordinasi SPIRIT selama tahun 2017 diselenggarakan melalui rapat koordinasi di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kegiatan diantaranya: instansi sasaran (*Participating Agency/PA*), *Project Implementing Unit* (PIU), *Project Coordinating Unit* (PCU), dan *Steering Committee* (SC). Kegiatan rapat ini dirangkum sebagai berikut:

1) **Rapat Koordinasi Internal PIU-PMU**

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi bagi PIU – konsultan – PCU – pihak lainnya dalam pelaksanaan program SPIRIT. Adapun rapat yang dilakukan adalah dalam rangka pembahasan rencana kerja (*annual working plan*), *alumni survey*, *technical review*, migrasi transpar, *implementation support mission* dari Bank Dunia dan lainnya.

2) **Rapat Koordinasi PIU-PA**

Rakor dilaksanakan di Ballroom Hotel Crowne Plaza, Semarang pada tanggal 14 Maret 2017 dan pada tanggal 10 – 12 Desember 2017 di Hotel BW Suite, Belitung. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusbindiklatren selaku Sekretaris PCU SPIRIT, dan dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan PA, PIU, dan konsultan. Rapat ini bertujuan untuk memonitor dan evaluasi perkembangan capaian *annual working plan* maupun akumulasi pelaksanaan dari awal proyek serta merumuskan rekomendasi ataupun kebijakan tertentu.



3) Rapat Koordinasi SC

Rapat koordinasi *Steering Committee* (SC) SPIRIT diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di Hotel Pullman, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Ketua SC SPIRIT dan dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi sasaran, PCU, dan PIU Bappenas serta PIU Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk membahas mengenai *update* Pelaksanaan Program SPIRIT 2011 – 2017, persiapan *closing project* SPIRIT, serta persiapan SPIRIT *Project Review Mission* (*Closing Project*).

b. Migrasi Data Transpar

Migrasi data Transpar dilatarbelakangi oleh adanya risiko penyimpanan dan pemeliharaan database yang timbul menjelang berakhirnya pelaksanaan SPIRIT di akhir tahun 2017. Saat ini Transpar didukung oleh sistem cloud database Caspio sebagai platform aplikasi daa secara online berbayar. PIU memutuskan akan memindahkan seluruh database tersebut ke server Pusbindiklatren Bappenas untuk menjamin aksesibilitas dan ketersediaan data di masa mendatang setelah proyek berakhir. Kegiatan migrasi data ini akan dilakukan oleh tenaga ahli dengan pembiayaan pada komponen 3 SPIRIT.

Sistem database baru yang *web-based* dipilih oleh PIU untuk diintegrasikan pada server Bappenas yang tak berbayar dan selanjutnya dipastikan dapat diakses setelah proyek berakhir. Modul pengguna yang akan dikembangkan adalah untuk seluruh pemangku kepentingan SPIRIT termasuk peserta, PA, PIU, PMU, dan PPK.

c. Alumni Survey

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program SPIRIT, Pusbindiklatren dibantu oleh konsultan melakukan kegiatan survei alumni untuk mengukur keberhasilan program tersebut selama periode pelaksanaan 2011 – 2017. *Participating agency* (PA) atau instansi sasaran survei meliputi 10 kementerian/lembaga di bawah koordinasi PIU Bappenas dan 11 Direktorat Jenderal/Unit Kerja Eselon II di bawah koordinasi PIU Kementerian Keuangan. Adapun tujuan dari *Alumni and Participating Agency Staff Survey* adalah:

- 1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Alumni SPIRIT yang meliputi alumni program *degree* maupun *non-degree*; dan
- 2) Untuk mengevaluasi dampak program SPIRIT terhadap pengembangan kapasitas PA dengan didatarkannya alumni pada program *degree* maupun *non-degree*.

Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah responden program gelar yang menyatakan puas terhadap keseluruhan program SPIRIT adalah sebesar 96%. Sementara itu, responden program non-gelar yang menyatakan puas terhadap keseluruhan program SPIRIT adalah sebesar 94%.

Persentase responden alumni program gelar yang menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi individu alumni adalah sebesar 92% dan 90% menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi lembaga (Unit Kerja). Sementara itu, responden program diklat non-gelar yang menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi individu alumni adalah sebesar 97% dan 95% menyatakan bahwa program SPIRIT bermanfaat bagi lembaga/institusi. Selain itu, didapatkan bahwa sebanyak 28,1% responden telah mendapatkan promosi di Unit Kerja mereka.



Dari hasil survei didapatkan bahwa terdapat peningkatan kinerja di unit kerja alumni program gelar antara sebelum dan sesudah alumni mengikuti Program SPIRIT. Besaran sumbangan pengaruh variabel kinerja alumni program gelar terhadap kinerja unit kerja alumni dapat dilihat pada hasil R^2 sebesar 0,6314 atau 63,14%, sedangkan sisanya sebesar 36,86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Dari hasil survei didapatkan bahwa ada peningkatan kinerja di unit kerja alumni diklat non-gelar antara sebelum dan sesudah alumni mengikuti program. Besaran sumbangan pengaruh variabel kinerja alumni program non gelar terhadap kinerja unit kerja alumni dapat dilihat pada hasil R^2 sebesar 0,5528 atau 55,28%, sedangkan sisanya sebesar 44,72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

d. Technical Review

Kegiatan *technical review* yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren dengan bantuan konsultan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan proses seleksi dengan kriteria dan prosedur yang telah disepakati dalam Project Operation Manual (POM) serta untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan proyek dengan standar yang telah ditetapkan dalam pedoman, POM, Loan Agreement, aide Memoires, dan dokumen proyek lainnya. Nilai capaian reviu untuk pelaksanaan tahun 2017 adalah 100% sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah disepakati dalam POM.

e. Penyusunan Project Completion Report

Dengan berakhirnya pelaksanaan SPIRIT di Desember 2017, maka Pusbindiklatren sebagai kepala PIU dan juga sekretaris PCU diharuskan menyusun Laporan Akhir Proyek SPIRIT (*Project Completion Report – PCR*). PCR ini merupakan laporan pelaksanaan SPIRIT dari tahun 2011 – 2017 yang dilengkapi dengan capaian indikator kegiatan, laporan keuangan, laporan pengadaan barang dan jasa, laporan pemeliharaan database dan website, serta pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek. Adapun struktur PCR adalah sebagai berikut:

- *Executive Summary;*
- *Introduction;*
- *Review of Project Performance Against Agreed Indicators;*
- *Project Institutional and Implementation Arrangements;*
- *Overview of Financial Management;*
- *Review of Procurement Management;*
- *Review of Transpar Database and Website Management;*
- *Lessons Learned.*

6. Kegiatan Kesekretariatan PHRD-IV

Program PHRD-IV ini dilaksanakan dan melibatkan berbagai pihak seperti Panitia Pengarah (*Steering Comitte*), Pelaksana Kegiatan (*Project Implementation Unit*), PPK,



Perguruan Tinggi di Indonesia dan Jepang, Kementerian Keuangan, Konsultan dan peserta penerima besiswa itu sendiri. Berbagai kegiatan juga dilaksanakan seperti penyusunan pedoman persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat, penyusunan petunjuk teknis administrasi dan keuangan, penyusunan dan penyebaran informasi, seleksi, pelaksanaan Diklat, pemantauan dan evaluasi Diklat, pencairan dana, pengiriman biaya karyasiswa, pengendalian dan pelaporan. Dengan mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak dan terdiri dari berbagai macam kegiatan dalam pelaksanaan PHRD IV ini maka dibutuhkan Tim Koordinasi Sekretariat

Bidang Renbang sebagai sekretariat PHRD IV berperan dalam pengelolaan dan administrasi pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dibiayai dari PHRD IV. Adapun keluaran dari kegiatan Koordinasi Sekretariat PHRD IV adalah Buku Panduan Operasional Manual (POM) PHRD IV, adendum kontrak konsultan *Planning, Management, and Fellowship Support (PMFS)*, Buku Bunga Rampai. Sementara itu, ruang lingkup kegiatan kesekretariatan ini meliputi:

- Rapat;
- Konsinyering;
- *Sharing Session*;
- *Focus Group Discussion (FGD)*;
- Seminar dan Temu Alumni;
- Pemantauan; dan
- Evaluasi.

B. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pendaftaran dan Seleksi Calon Peserta Diklat Fungsional Perencana

Untuk memastikan calon peserta diklat fungsional perencana sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pusbindiklatren telah melakukan proses mulai dari penawaran diklat yang dipublikasikan di situs Pusbindiklatren, sosialisasi, pameran, dan kegiatan lainnya. Proses tersebut telah dimulai pada bulan September tahun 2016 dan ditutup pada bulan Februari 2017. Selain itu, telah pula dilakukan seleksi (administrasi dan kepangkatan),



sebagai syarat utama bagi calon peserta Diklat Fungsional Perencana untuk mengikuti tes materi bagi calon peserta dengan berpangkat minimal III/c yang baru pertama kali mengikuti diklat fungsional perencana. Untuk tahun 2017, tes materi dilaksanakan serentak pada tanggal 18 Maret 2017 yang diikuti 207 orang dari 305 orang yang memenuhi syarat.

Tabel 4.2. Hasil Pendaftaran dan Seleksi JFP 2017

NO.	LOKASI	KEHADIRAN				
		UNDANGAN	HADIR	TIDAK HADIR	% HADIR	% TIDAK HADIR
1	SUMATERA UTARA	25	18	7	72,00	28,00
2	DKI JAKARTA	94	55	39	58,51	41,49
2	JAWA BARAT	40	35	5	87,50	12,50
3	JAWA TENGAH	22	17	5	77,27	22,73
4	JAWA TIMUR	17	13	4	76,47	23,53
5	JAMBI	12	6	6	50,00	50,00
6	SULAWESI SELATAN	25	17	8	68,00	32,00
7	RIAU	24	12	12	50,00	50,00
8	SUMATERA BARAT	13	10	3	76,92	23,08
9	SUMATERA SELATAN	21	19	2	90,48	9,52
10	NUSA TENGGARA BARAT	12	12	0	100,00	0,00
	TOTAL	305	214	91	70,16	29,84

2. Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana untuk Jenjang Pertama, Muda, Madya, dan Utama

Agar dalam pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan dalam Permen PAN No. 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, yang salah satunya adalah harus mengikuti dan lolos dalam pelatihan Fungsional Perencana, pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah melaksanakan Diklat Fungsional Perencana dan telah meloloskan sebanyak 510 peserta dari jenjang Pertama, Muda, Madya, dan Utama.



Tabel 4.3. Hasil Pelaksanaan Diklat Fungsional Penjurangan Perencana 2017

NO.	JENJANG DIKLAT	PRODI/CENTER	PERIODE	REALISASI	PERSEN-TASE
1.	Diklat FP Pertama	LPEM FEB UI	20 Maret–5 Mei 2017	20	100 %
2.	Diklat FP Pertama	MAP UGM	27 Maret–13 Mei 2017	20	100 %
3.	Diklat FP Pertama	MET FEB Unpad	3 April–19 Mei 2017	20	100 %
4.	Diklat FP Pertama	SAPPK ITB	10 April–26 Mei 2017	20	100 %
5.	Diklat FP Pertama	FEB Unsyiah	3 April–19 Mei 2017	20	100 %
6.	Diklat FP Pertama	P3KM Unhas	10 April–27 Mei 2017	20	100 %
7.	Diklat FP Pertama	RCCP FIA UB	3 April–20 Mei 2017	20	100 %
8.	Diklat FP Pertama	PPs Unsri	10 Juli–26 Agustus 2017	20	100 %
9.	Diklat FP Pertama II	SAPPK ITB	14 Agustus–29 September 2017	20	100 %
10.	Diklat FP Pertama II	MET FEB Unpad	11 September–27 Oktober 2017	20	100 %
JUMLAH PESERTA DIKLAT FP PERTAMA (A)				200	100 %
1.	Diklat FP Muda	LPEM FEB UI	3 April–5 Mei 2017	20	100 %
2.	Diklat FP Muda	P3KM Unhas	25 April–27 Mei 2017	20	100 %
3.	Diklat FP Muda	MAP UGM	3 April–5 Mei 2017	20	100 %
4.	Diklat FP Muda	MET FEB Unpad	17 Juli–18 Agustus 2017	20	100 %
5.	Diklat FP Muda	FEB Unsyiah	17 Juli–19 Agustus 2017	20	100 %
6.	Diklat FP Muda	RCCP FIA UB	31 Juli–1 September 2017	20	100 %
7.	Diklat FP Muda II	P3KM Unhas	7 Agustus–9 September 2017	20	100 %
8.	Diklat FP Muda	SAPPK ITB	11 September–13 Oktober 2017	20	100 %



NO.	JENJANG DIKLAT	PRODI/CENTER	PERIODE	REALISASI	PERSEN-TASE
9.	Diklat FP Muda II	FEB Unsyiah	4 September–7 Oktober 2017	20	100 %
10.	Diklat FP Muda II	MET FEB Unpad	16 Oktober–17 November 2017	20	100 %
JUMLAH PESERTA DIKLAT FP MUDA (B)				200	100 %
1.	Diklat FP Madya	LPEM FEB UI	6–24 Maret 2017	20	100 %
2.	Diklat FP Madya	MAP UGM	8–27 Mei 2017	20	100 %
3.	Diklat FP Madya	P3KM Unhas	17 Juli–4 Agustus 2017	20	100 %
4.	Diklat FP Madya II	LPEM FEB UI	21 Agustus–8 September 2017	20	100 %
5.	Diklat FP Madya	MPKD UGM	25 September–13 Oktober 2017	20	100 %
JUMLAH PESERTA DIKLAT FP MADYA (C)				100	100 %
1.	Diklat FP Utama	LPEM-FEB UI	2 Mei–31 Agustus 2017	10	100 %
JUMLAH PESERTA DIKLAT FP UTAMA (D)				10	100 %
JUMLAH KESELURUHAN PESERTA DIKLAT FP TAHUN 2017 (A+B+C+D)				510	100 %

3. Penilaian Angka Kredit Perencana

Sesuai dengan tugas fungsinya, Tim Penilai Angka Kredit Perencana memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan perencanaan ke dalam angka kredit serta membantu tugas-tugas pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat fungsional perencana. Adapun Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perencana bertugas membantu Tim Penilai dalam pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana. Selama tahun 2017, Pusbindiklatren telah menerbitkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebanyak 61 BAPAK dan 31 surat yang terkait dengan Angka Kredit.



Tabel 4.4. Hasil Penilaian Angka Kredit Perencana 2017 Berdasarkan Diklat PFP

NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	NO. SURAT	NO. BAPAK
1	JFP MADYA EKONOMI	LPEM FEB UI	548/P.01/05/2017	14/BAPAK-LPEM FEB UI/JFP MADYA EKONOMI/05/2017
2	JFP MUDA	MAP UGM	871/P.01/06/2017	19/BAPAK-MAP UGM/JFP MUDA/06/2017
3	JFP PERTAMA	MAP UGM	873/P.01/06/2017	20/BAPAK-MAP UGM/JFP PERTAMA/06/2017
4	JFP MADYA SOSIAL	MAP UGM	880/P.01/06/2017	21/BAPAK-MAP UGM/JFP MADYA-SOSIAL/06/2017
5	JFP PERTAMA	MET FEB UNPAD	870/P.01/06/2017	22/BAPAK-MAP UGM/JFP MADYA-PERTAMA/06/2017
6	JFP PERTAMA	FEB UNSYIAH	872/P.01/06/2017	23/BAPAK-FE UNSYIAH/JFP PERTAMA/06/2017
7	JFP MUDA	LPEM FEB UI	958/P.01/06/2017	28/BAPAK-LPEM FEB UI/JFP MUDA/06/2017
8	JFP PERTAMA	P3KM UNHAS	965/P.01/06/2017	29/BAPAK-P3KM UNHAS/JFP PERTAMA/06/2017
9	JFP MUDA	P3KM UNHAS	966/P.01/06/2017	30/BAPAK-P3KM UNHAS/JFP MUDA/06/2017
10	JFP PERTAMA	RCCP FIA UB	1043/P.01/07/2017	32/BAPAK/JFP PERTAMA/07/2017
11	JFP MADYA SOSIAL	P3KM UNHAS	1120/P.01/08/2017	36/BAPAK-P3KM UNHAS/JFP MADYA SOSIAL/08/2017
12	JFP MUDA	FEB UNSYIAH	1295/P.01/09/2017	41/BAPAK-FEB UNSYIAH/JFP MUDA/09/2017
13	JFP MUDA	RCCP FIA UB	1296/P.01/09/2017	42/BAPAK-RCCP FIA UB/JFP MUDA/09/2017
14	JFP PERTAMA	PPS UNSRI	1302/P.01/09/2017	43/BAPAK-PPS UNSRI/JFP PERTAMA/09/2017
15	JFP PERTAMA	SAPPK ITB	1315/P.01/09/2017	44/BAPAK-SAPPK ITB/JFP PERTAMA/09/2017
16	JFP MADYA EKONOMI	LPEM FEB UI	1421/P.01/10/2017	51/BAPAK-LPEM FEB/ JFP MADYA EKONOMI/10/2017
17	JFP MUDA	MET FEB UNPAD	1621/P.01/11/2017	52/BAPAK-MET UNPAD/ JFP MUDA/11/2017



NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	NO. SURAT	NO. BAPAK
18	JFP MUDA	FEB UNSYIAH	1630/P.01/11/2017	53/BAPAK-FEB UNSYIAH/ JFP MUDA/11/2017
19	JFP MUDA	P3KM UNHAS	1631/P.01/11/2017	54/BAPAK-P3KM UNHAS/ JFP MUDA/11/2017
20	JFP MADYA SPASIAL	MPKD UGM	1721/P.01/12/2017	56/BAPAK-MPKD UGM/JFP MADYA SPASIAL/12/2017
21	JFP PERTAMA	MET UNPAD	1722/P.01/12/2017	57/BAPAK-MET UNPAD/JFP PERTAMA/12/2017
22	JFP MUDA	MET UNPAD	1723/P.01/12/2017	58/BAPAK-MET UNPAD/JFP MUDA/12/2017
23	JFP MUDA	SAPPK ITB	1724/P.01/12/2017	59/BAPAK-SAPPK ITB/JFP MUDA/12/2017
24	JFP PERTAMA	SAPPK ITB	1725/P.01/12/2017	60/BAPAK-SAPPK ITB/JFP PERTAMA/12/2017

Tabel 4.5. Penilaian Angka Kredit JFP Berdasarkan mengajukan DUPAK ke Tim Penilai Pusat

NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	NO. SURAT	NO BAPAK
1	Dr. Ir. Budhi Santoso, MA	Deputi Polhukhankam/Bappenas	115/P.01.ND/02/2017	01/BAPAK JFP UTAMA/02/2017
2	Ida Ayu Suartini, SE	Disbun/Pemprov Bali	114/P.01/02/2017	02/BAPAK/JFP PERTAMA/02/2017
3	Gunawan, SH	Birorencor/Mahkamah Agung	115/P.01.ND/02/2017	03/BAPAK/JFP PERTAMA/02/2017
4	Sri Handiman Supyansuri, SS, ME	Dirjen Informasi & Komunkasi Publik/Kominfo	127/P.01/02/2017	04/BAPAK/JFP PERTAMA/02/2017
5	Yusnal Irvan Donna, S.Si	Bappeda/Pemkab Tapanuli Tengah	137/P.01/02/2017	05/BAPAK/JFP PERTAMA/02/2017
6	Faisal Alfiansyah, S.AP	Biroren/Kemen Setneg	165/P/01/03/2017	06/BAPAK/JFP PERTAMA/03/2017
7	Mokhammad Ali Rouf, S.Pi, MP	Birore/Kemen KKP	166/P/01/03/2017	07/BAPAK/JFP MUDA/03/2017
8	Ir. Setyo Adhie, MM	Biroren/Kementan	202/P.01/03/2017	08/BAPAK/JFP MADYA/03/2017
9	Ir. Kusno Hadiutomo, MM	Biroren/Kementan	427/P.01/04/2017	09/BAPAK/JFP MADYA/04/2017



NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	NO. SURAT	NO BAPAK
10	Drs. Hamid, M.Si	Deputi PKT/BPPT	428/P.01/04/2017	10/BAPAK/JFP MADYA/04/2017
11	Tezy Mellowin, SKM, MKM	Biroren & Anggaran/Kemenkes	464/P.01/04/2017	11/BAPAK/JFP MUDA/04/2017
12	I Made Indra Wijaya, ST	Biro Kepegawaian & Pengemb SDM	470/P.01/04/2017	12/BAPAK/JFP PERTAMA/04/2017
13	Dr. Ir. Hasto Soebagia, M.Eng	Birorenkeu/BPPT	553/P.01/05/2017	13/BAPAK/JFP MADYA/05/2017
14	Naning Krisyuli Astuti, S.Kep, Ns., MAP	Dinkes/Pemprov Bali	549/P.01/05/2017	15/BAPAK/JFP MUDA/05/2017
15	Ni Luh Putu Lely Karnia Dewi, SKM, M.H.Kes	Dinkes/Pemprov Bali	842/P.01/05/2017	16/BAPAK/JFP PERTAMA/05/2017
16	Drs. Sifri Mandak, M.Si, MAP	Bappeda/Pemkot Bitung	843/P.01/05/2017	17/BAPAK/JFP MADYA/05/2017
17	Made Andayani, S.Sos	Dinkes/Pemprov Bali	838/P.01/06/2017	18/BAPAK/JFP MADYA/06/2017
18	Iswansyah, S.Sos	Bappeda/Pemkab Kutai Kartanegara	869/P.01/06/2017	24/BAPAK/JFP PERTAMA/06/2017
19	Dr. Kundofir, ST, M.Pd	Bappeda/Pemkab Banyuwangi	883/P.01/06/2017	25/BAPAK/JFP MADYA/06/2017
20	Tina Safaria, SE, MPH	Biroren & Anggaran/Kemenkes	884/P.01/06/2017	26/BAPAK/JFP MUDA/06/2017
21	Dr. Haryanto, SE, MA	Deputi Bidang Ekonomi/Bappenas	974/P.01/06/2017	27/BAPAK/JFP UTAMA/06/2017
22	Lisa Rosiana, SE	Biroren Keu & TU/BSN	1059/P.01/07/2017	31/BAPAK/JFP MUDA/07/2017
23	Drs. Johny Juanda, MM	Deputi Bidang Kependudukan & Ketenagakerjaan/Bappenas	730/P.01.ND/07/2017	33/BAPAK/JFP UTAMA/07/2017
24	Ir. Hermani Wahab, MS	Deputi Bidang Pengemb Regional/ Bappenas	730/P.01.ND/07/2017	34/BAPAK/JFP UTAMA/07/2017
25	Drs. I Dewa Gede Sugihamretha, MPM	Deputi Bidang Ekonomi/Bappenas	730/P.01.ND/07/2017	35/BAPAK/JFP UTAMA/07/2017
26	Ir. Falikul Fikri	Biroren/BATAN	1241/P.01/09/2017	37/BAPAK/JFP MADYA/09/2017



NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	NO. SURAT	NO BAPAK
27	Faisal Alfiansyah, S.AP	Biroren/Kemen Setneg	1242/P.01/09/2017	38/BAPAK/JFP PERTAMA/09/2017
28	Sy. Ismail, SP, MM	Bappeda/Pemkab Pesawaran	1243/P.01/09/2017	39/BAPAK/JFP MADYA/09/2017
29	Sugiyanto, SAP	Biroren & Humas/ANRI	1244/P.01/09/2017	40/BAPAK/JFP MADYA/09/2017
30	Sigit Novianto Suhardi, SE, MMT	Dirjen Perikanan Budidaya/Kemen KKP	1314/P.01/09/2017	45/BAPAK/JFP PERTAMA/09/2017
31	Yuhelemni, SP, M.Si	Bappeda/Pemprov Jambi	1359/P.01/10/2017	46/BAPAK/JFP MADYA/10/2017
32	Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, ST, MM	Bappelitbang/Pemprov Bali	1358/P.01/10/2017	47/BAPAK/JFP PERTAMA/10/2017
33	Tina Safaria, SE, MPH	Birorenc & Anggaran/Kemenkes	1357/P.01/10/2017	48/BAPAK/JFP MUDA/10/2017
34	I Putu Wira Utama, S.Si	Bappelitban/Pemkab Bangli	1423/P.01/10/2017	49/BAPAK/JFP PERTAMA/10/2017
35	Tezy Mellowin, SKM, MKM	Biroren & Anggaran/Kemenkes	1422/P.01/10/2017	50/BAPAK/JFP PERTAMA/10/2017
36	Ir. Windriarti Hendrojogi, MRTP	PKT/BPPT	1699/P.01/12/2017	55/BAPAK/JFP MADYA/12/2017
37	Rahmi Suryaningrum, S.TP	Biroren/BNPB	1536/P.01/11/2017	61/BAPAK/JFP PERTAMA/11/2017

Tabel 4.6. Surat Dan Nota Dinas Kepala Pusbindiklatren Berdasarkan Komposisi Angka Kredit:

NO	NAMA	UNIT / INSTANSI	NO SURAT/NOTA DINAS
1	JFP MADYA EKONOMI	LPEM FEB UI	445/P.01.ND/05/2017
2	JFP MADYA EKONOMI	LPEM FEB UI	1067/P.01.ND/10/2017
3	JFP MADYA SOSIAL	MAP UGM	598/P.01.ND/06/2017
4	JFP MUDA	LPEM FEB UI	608/P.01.ND/06/2017
5	JFP MUDA	MET UNPAD	1650/P.01/11/2017
6	JFP MUDA II	MET UNPAD	1719/P.01/12/2017
7	JFP PERTAMA	SAPPK ITB	1270/P.01.ND/12/2017



NO	NAMA	UNIT / INSTANSI	NO SURAT/NOTA DINAS
8	JFP PERTAMA RIAU	LPEM FEB UI	1707/P.01/12/2017
9	JFP PERTAMA	LPEM FEB UI	543/P.01.ND/05/2017
10	JFP PERTAMA	MET UNPAD	1718/P.01/12/2017
11	JFP UTAMA	LPEM FEB UI	1068/P.01.ND/10/2017
12	JFP MADYA EKONOMI	LPEM FEB UI	555/P.01/05/2017
13	JFP MADYA EKONOMI II	LPEM FEB UI	1484/P.01/10/2017
14	JFP MADYA SOSIAL	MAP UGM	1053/P.01/07/2017
15	JFP MADYA SPASIAL	MPKD UGM	1706/P.01/12/2017
16	JFP MUDA	SAPPK ITB	1717/P.01/12/2017
17	JFP MUDA	LPEM FEB UI	957/P.01/06/2017
18	JFP MUDA KEMENAG	LPEM FEB UI	1036/P.01/07/2017
19	JFP MUDA	P3KM UNHAS	1638/P.01/11/2017
20	JFP MUDA	RCCP FIA UB	1299/P.01/09/2017
21	JFP MUDA II	FEB UNSYIAH	1632/P.01/11/2017
22	JFP MUDA	FEB UNSYIAH	1297/P.01/09/2017
23	JFP PERTAMA II	SAPPK ITB	1720/P.01/12/2017
24	JFP PERTAMA	SAPPK ITB	1317/P.01/09/2017
25	JFP PERTAMA ESDM I	LPEM FEB UI	834/P.01/05/2017
26	JFP PERTAMA ESDM II	LPEM FEB UI	836/P.01/05/2017
27	JFP PERTAMA	LPEM FEB UI	845/P.01/05/2017
28	JFP PERTAMA PUPR	LPEM FEB UI	837/P.01/05/2017
29	JFP PERTAMA	RCCP FIA UB	1042/P.01/07/2017
30	JFP PERTAMA	PPS UNSRI	1298/P.01/09/2017
31	JFP UTAMA	LPEM FEB UI	1420/P.01/10/2017



4. Penyusunan Soal Tes Kompetensi Bidang CPNS Formasi Perencana

Pada tahun 2017, Pusbindiklatren telah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Bappenas dalam pembuatan 500 butir soal tes kompetensi bidang (TKB) perencana yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan telah diserahkan menjadi kumpulan bank soal kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Biro Sumber Daya Manusia Bappenas. Adapun perincian soal tes materi CPNS formasi perencana adalah Kompetensi Teknis (125 soal), Kompetensi Bidang Ekonomi (125 soal), Kompetensi Sosial (125 soal), dan Kompetensi Bidang Spasial (125 soal) dengan total keseluruhan 500 soal.

Tabel 4.7. Penyusunan Soal Tes Kompetensi CPNS Formasi Perencana

NO.	URAIAN	JUMLAH SOAL
1	Kompetensi Teknis	125 soal
2	Kompetensi Bidang Ekonomi	125 soal
3	Kompetensi Bidang Sosial	125 soal
4	Kompetensi Bidang Spasial	125 soal
	TOTAL	500 soal

5. Pembuatan dan Penyusunan Soal Uji Kompetensi *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Perencana

Pasca-terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana. Bappenas dalam hal ini Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JFP telah mengundang para tenaga ahli dari 4 (empat) spesifikasi bidang yang telah menjadi *core* dalam Jabatan Fungsional Perencana, yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, bidang spasial, dan bidang teknis untuk membuat dan menyusun soal uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam JFP melalui penyesuaian/*inpassing*. Sesuai dengan DIPA Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP tahun 2017, jumlah soal yang harus disusun adalah sebanyak 520 butir soal.

Tabel 4.8. Penyusunan Soal Uji Kompetensi *Inpassing* dalam JFP

NO.	URAIAN	JUMLAH SOAL
1	Kompetensi Teknis	130 soal
2	Kompetensi Bidang Ekonomi	130 soal
3	Kompetensi Bidang Sosial	130 soal
4	Kompetensi Bidang Spasial	130 soal
	TOTAL	520 soal

6. *Workshop* Penilaian Angka Kredit (PAK)

Workshop Penilaian Angka Kredit Perencana diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota tim penilai maupun bagi para pejabat perencana dan pejabat struktural yang berpotensi untuk menjadi anggota tim penilai instansi di Kementerian/Lembaga untuk pusat maupun Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk daerah. Pada tahun anggaran 2017, *workshop* PAK diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan di Kota Bogor, Jawa Barat. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 15–19 Mei 2017 dan angkatan II dilaksanakan pada tanggal 4–8 September 2017.

Tabel 4.9. Pelaksanaan *Workshop* PAK 2017

NO.	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	<i>Workshop</i> PAK Angkatan I	15–19 Mei 2017	25 orang	Sebanyak 8 peserta dari K/L dan 17 peserta dari instansi daerah.
2	<i>Workshop</i> PAK Angkatan II	4–8 September 2017	25 orang	Sebanyak 7 peserta dari K/L dan 18 peserta instansi daerah.
TOTAL			50 orang	

7. *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK);

Workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit diperuntukkan bagi para calon dan anggota yang telah dan akan menduduki sebagai anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit baik di instansi pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sama halnya dengan *Workshop* PAK, selama tahun anggaran 2017, *Workshop* APAK diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan juga di Kota Bogor, Jawa Barat. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 17–19 Mei 2017 dan Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 6–8 September 2017.

Tabel 4.10. Pelaksanaan *Workshop* APAK 2017

NO.	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	<i>Workshop</i> APAK Angkatan I	17–19 Mei 2017	25	Sebanyak 9 peserta dari K/L dan 16 peserta dari instansi daerah.
2	<i>Workshop</i> APAK Angkatan II	6–8 September 2017	25	Sebanyak 7 peserta dari K/L dan 18 peserta instansi daerah.
TOTAL			50 ORANG	

8. Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana (Semreg JFP)

Semreg JFP diadakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan peran perencana sekaligus mendorong profesionalisme dan integritas yang tinggi, mempunyai kemampuan berpikir strategis, selalu berorientasi pada kualitas perencanaan, memiliki kemampuan untuk membangun jejaring kerja, serta pemahaman bersama (persamaan persepsi) seiring munculnya berbagai permasalahan terkait dengan peran para perencana baik di pusat maupun di daerah. Pada tahun 2017 ini, Semreg JFP diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4–6 Desember 2017 dan diikuti oleh 541 (lima ratus empat puluh satu) orang peserta yang berasal dari Instansi pusat dan daerah, baik para pemangku jabatan fungsional perencana dari semua jenjang, para Tim Penilai JFP, calon perencana, serta para pejabat struktural baik dari instansi pusat maupun daerah se-Indonesia yang berkompeten atau membidangi bidang perencanaan di tiap-tiap instansi.

9. Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana

Kegiatan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional perencana bertujuan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi di instansi, baik pusat maupun daerah, terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional perencana serta permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan diklat fungsional perencana di program studi/*center* penyelenggara diklat fungsional perencana. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan bisa menghasilkan rumusan-rumusan bagi penyempurnaan pelaksanaan jabatan fungsional perencana pada masa depan. Selama tahun 2017, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional perencana dilakukan terhadap 6 (enam) instansi daerah dan 9 (sembilan) program studi pelaksana diklat.



Tabel 4.11. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana 2017

NO.	INSTANSI/UNIVERSITAS	UNIT KERJA/PRODI
I. Instansi daerah:		
1.	Pemda Provinsi Jawa Timur	Bappeda dan BKD
2.	Pemda Provinsi Bengkulu	Bappeda dan BKD
3.	Pemda Provinsi Lampung	Bappeda dan BKD
4.	Pemda Provinsi Kalimantan Selatan	Bappeda dan BKD
5.	Pemda Provinsi Riau	Bappeda dan BKD
6.	Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bappeda dan BKD
II. Prodi Pelaksana Diklat JFP		
1.	Universitas Indonesia, Jakarta	LPEM FEB
2.	Universitas Hasanuddin, Makassar	P3KM
3.	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	MPKD dan MAP
4.	Universitas Syiah Kuala	FEB
5.	Universitas Padjadjaran	MET FEB
6.	Institut Teknologi Bandung	SAPPK PWK
7.	Universitas Brawijaya	RCCP FIA
8.	Universitas Syah Kuala	FEB
9.	Universitas Sriwijaya	Program Pascasarjana

10. Pengendalian Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana

Pada dasarnya pengendalian dilakukan untuk mengarahkan agar suatu program dan kegiatan mencapai sasaran yang ditentukan. Pengendalian pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional perencana bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan JFP. Selain hal itu, pengendalian pelaksanaan JFP juga dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan kegiatan JFP agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun keluaran yang diharapkan dari pengendalian pelaksanaan JFP adalah (1) informasi tentang pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional perencana di pusat dan daerah; (2) diketahuinya kendala dan tantangan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional perencana di pusat dan daerah; dan (3) tersusunnya rekomendasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jabatan fungsional perencana. Untuk tahun 2017, kegiatan pengendalian jabatan fungsional perencana difokuskan kepada program studi/*center* pelaksana diklat fungsional perencana dengan jumlah sebanyak 6 (enam) program studi.



Tabel 4.12. Pengendalian Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana 2017

NO.	UNIVERSITAS	PRODI/CENTER
1	Universitas Indonesia, Jakarta	LPEM FEB
2	Universitas Padjadjaran	MET FEB
3	Institut Teknologi Bandung	SAPPK PWK
4	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	MAP dan MPKD
5	Universitas Brawijaya	RCCP FIA
6	Universitas Sriwijaya	Program Pascasarjana

11. Fasilitas Pembinaan Widyaiswara

Widyaiswara sebagai salah satu pejabat fungsional juga perlu difasilitasi dalam hal pembinaan dan pemberdayaannya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai peraturan terkait widyaiswara yang telah diterbitkan, antara lain Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Pusbindiklatren melakukan fasilitasi pembinaan kepada pejabat fungsional widyaiswara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas antara lain dengan pemberian tugas seperti mengajar/mengampu dalam pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklatren, penyusunan kurikulum diklat, *monitoring* dan evaluasi diklat, serta penyelenggaraan orasi ilmiah.

Tujuan fasilitasi pembinaan widyaiswara sebagai berikut:

- Memberdayakan Widyaiswara Ahli Utama antara lain dengan menugaskan dalam kegiatan Pusbindiklatren sesuai kompetensinya;
- Meningkatkan kompetensi para widyaiswara Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan jenjang jabatannya;
- Memenuhi proses kenaikan pangkat dan jabatan bagi Widyaiswara Ahli Utama sesuai peraturan, seperti proses melakukan kunjungan lapangan (observasi data), mengolah data, penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) dan orasi ilmiah.

Adapun sasaran fasilitasi pembinaan widyaiswara sebagai berikut:

- Meningkatnya peran Widyaiswara Ahli Utama dalam kegiatan Pusbindiklatren sesuai dengan kompetensinya, dan dalam kegiatan kewidyaiswaraan di instansi lain sesuai penugasan;
- Meningkatnya kompetensi Widyaiswara Ahli Utama sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



C. BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN GELAR

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, serta penempatan peserta pendidikan dan pelatihan gelar di bidang perencanaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Seleksi

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan calon karyasiswa yang memenuhi persyaratan/kualifikasi beasiswa Pusbindiklatren dan program studi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi Tes Potensi Akademik (TPA), seleksi bahasa Inggris (TOEFL ITP), wawancara tertulis, dan penempatan. Seleksi dilakukan dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang II dilaksanakan pada Desember 2016–Mei 2017, sedangkan gelombang I (intake 2018) berlangsung pada Juli–Desember 2017. Seleksi dilaksanakan di 12 kota di Indonesia.

Pada tahun 2017, jumlah peserta yang mengikuti seleksi gelar Pusbindiklatren sebanyak 3.241 orang dan sebanyak 2.084 yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti proses seleksi akademik. Dari hasil seleksi akademik, diperoleh 548 calon peserta yang siap ditempatkan untuk program beasiswa gelar.

Mekanisme seleksi terbagi menjadi empat tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi Tes Potensi Akademik, Seleksi Bahas Inggris, dan Seleksi Penempatan.

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Pusbindiklatren untuk melihat kesesuaian data calon karyasiswa dengan persyaratan program beasiswa Pusbindiklatren. Dari hasil pelaksanaan seleksi gelombang II, peserta yang mendaftar sebanyak 1.546 orang, dan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 859 orang (54%). Sementara itu, dari hasil pelaksanaan seleksi gelombang I peserta yang mendaftar sebanyak 2.457 orang, dan peserta yang mengirimkan berkas pendaftaran sebanyak 1.752, namun hanya 1.007 yang lulus seleksi administrasi.

b. Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA)

Peserta yang dapat mengikuti seleksi TPA adalah calon karyasiswa yang telah lulus seleksi administrasi. Peserta yang dipanggil untuk mengikuti seleksi TPA adalah sebanyak 859 orang dan yang hadir dalam seleksi sebanyak 579 orang (67%). Dari 579 orang yang hadir TPA, sebanyak 352 peserta yang lulus TPA atau sebesar 60 persen.

Seleksi TPA gelombang II ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di 15 kota yaitu Ambon, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Kupang, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Semarang, serta Yogyakarta sebagaimana dalam **Tabel 4.13** di bawah ini.



Tabel 4.13. Lokasi dan Jumlah Peserta TPA Gelombang II

NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
1	Ambon	13
2	Banda Aceh	22
3	Bandung	31
4	Depok	322
5	Jayapura	15
6	Kupang	23
7	Makasar	41
8	Malang	51
9	Manado	34
10	Medan	27
11	Padang	87
12	Palembang	77
13	Pontianak	21
14	Semarang	43
15	Yogyakarta	52
TOTAL		859

Untuk gelombang I tahun 2017, peserta yang dipanggil untuk mengikuti seleksi TPA adalah sebanyak 1.007 orang. Seperti halnya pada Gelombang II, pelaksanaan TPA diadakan di 15 kota. Dari hasil TPA ini terjdading jumlah peserta yang lulus seleksi TPA sebanyak 509 orang atau sekitar 50 persen dari jumlah peserta. Seleksi TPA gelombang I ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan sebaran kota dan jumlah peserta seperti ditampilkan dalam **Tabel 4.14** di bawah ini.

Tabel 4.14. Lokasi tes TPA Gelombang I

NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
1	Banda Aceh	24
2	Bandung	64
3	Depok I	280
4	Depok II	177



NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
5	Jayapura	7
6	Kupang	9
7	Makassar	62
8	Manado	21
9	Medan	24
10	Padang	82
11	Palembang	64
12	Pontianak	25
13	Semarang	67
14	Surabaya	54
15	Yogyakarta	47
TOTAL		1.007

c. Seleksi Bahasa Inggris (*Test for English for Foreign Language*/TOEFL)

Seleksi TOEFL diikuti oleh peserta yang telah lulus seleksi TPA gelombang II dan peserta gelombang I *intake* tahun 2017. Total peserta yang dipanggil untuk mengikuti seleksi TOEFL gelombang II sebanyak 533 peserta (peserta gelombang II sebanyak 352 dan peserta gelombang I sebanyak 181 orang), dari 533 peserta yang dipanggil untuk mengikuti tes, hanya 456 orang atau sekitar 86 persen yang hadir dan mengikuti tes TOEFL.

Untuk lokasi penyelenggaraan tes TOEFL tersebar di 8 (delapan) kota yaitu Bandung, Depok, Makassar, Malang, Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Yogyakarta. Dari sebanyak 456 peserta yang mengikuti TOEFL sebanyak 176 orang atau sekitar 39 persen dinyatakan yang lulus TOEFL. Seleksi TOEFL gelombang II ini pada tanggal 8 April 2017 di 8 tempat, sebagaimana dalam **Tabel 4.15**.

Tabel 4.15. Lokasi dan Jumlah Peserta TOEFL Gelombang II

NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
1	Bandung	23
2	Depok	211
2	Makasar	53
3	Malang	28



NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
4	Medan	22
5	Padang	80
6	Palembang	16
7	Semarang	44
8	Yogyakarta	56
Total		533

Seleksi TOEFL gelombang I diikuti oleh peserta yang telah lulus seleksi TPA gelombang I, yaitu sebanyak 509 orang, dan berhasil meloloskan 318 orang calon karyasiswa atau sebesar 62 persen dari jumlah peserta. Pelaksanaan TOEFL Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017 pada 9 lokasi tes yaitu Bandung, Depok, Makassar, Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, serta Yogyakarta dengan jumlah peserta sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16. Lokasi dan Jumlah Peserta TOEFL Gelombang I

NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA TES
1	Bandung	29
2	Depok	236
3	Makassar	42
4	Medan	22
5	Padang	48
6	Palembang	23
7	Semarang	39
8	Surabaya	37
9	Yogyakarta	33
TOTAL		509

d. Seleksi Penempatan

Peserta yang berhak mengikuti seleksi penempatan gelombang II adalah peserta yang lulus TOEFL gelombang II. Peserta yang ditempatkan pada gelombang II ini sebanyak 410 peserta (peserta yang lulus gelombang II sebanyak 176 peserta ditambah peserta gelombang I *Intake* 2017 sebanyak 234).



Adapun peserta yang berhak mengikuti seleksi penempatan gelombang I adalah peserta yang lulus TOEFL gelombang I (*intake* 2018). Peserta yang ditempatkan pada *intake* 2018 adalah (a) 136 peserta ditempatkan pada program S2 *linkage* Jepang/AAS, dan program S2/S3 Jepang; dan (b) 182 peserta ditempatkan pada program S2 dalam negeri.

Alokasi program beasiswa PHRD IV Pusbindiklatren pada tahun 2017 sebanyak 448 orang dengan perincian (i) karyasiswa S2 luar negeri sebanyak 3 orang; (ii) S3 luar negeri sebanyak 3 orang; (iii) S3 dalam negeri sebanyak 7 orang; (iv) S2 *linkage* sebanyak 115 orang; (v) dan alokasi untuk S2 dalam negeri sebanyak 320 orang. Alokasi S2 *linkage* Australia sebanyak 20 orang, sedangkan untuk alokasi program SPIRIT sebanyak 2 orang.

Dalam realisasinya, peserta yang ditempatkan dalam program beasiswa PHRD-IV sebanyak 407 orang atau sekitar 91% dari target peserta dengan perincian (i) karyasiswa S2 Luar Negeri sebanyak 3 orang; (ii) S3 Luar Negeri sebanyak 3 orang; (iii) S3 dalam negeri sebanyak 6 orang; (iv) S2 *linkage* sebanyak 115 orang; dan (v) S2 Dalam Negeri sebanyak 280 orang.

Penempatan karyasiswa program *Split-Site* Australia sebanyak 10 orang. Adapun untuk program SPIRIT sebanyak 2 (dua) orang yang merupakan sisa penempatan tahun 2016. Penempatan karyasiswa sesuai dengan program studi dapat dilihat dalam **Diagram 4.1** berikut.

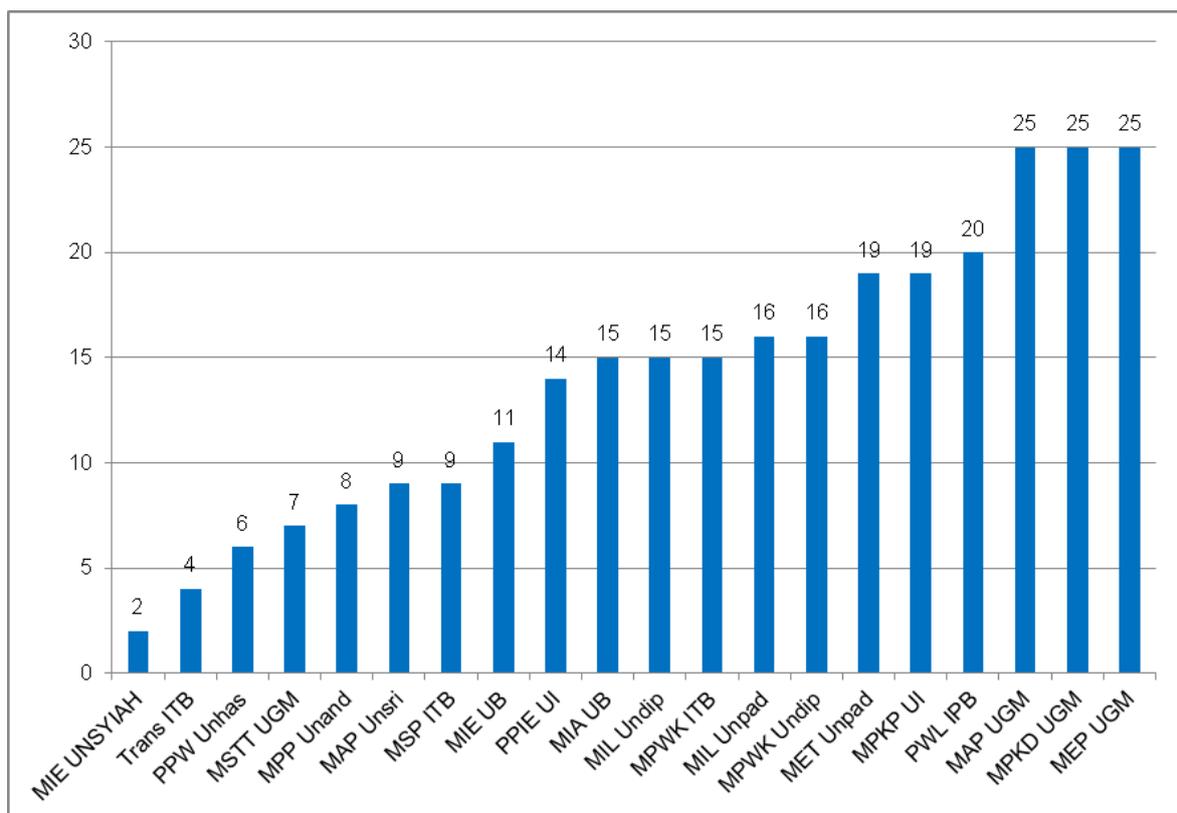


Diagram 4.1. Penempatan Karyasiswa Dalam Negeri Sesuai dengan Program Studi



Sementara itu, untuk sebaran karyasiswa *linkage* tahun anggaran 2017 dapat dilihat dalam **Diagram 4.2** di bawah ini.

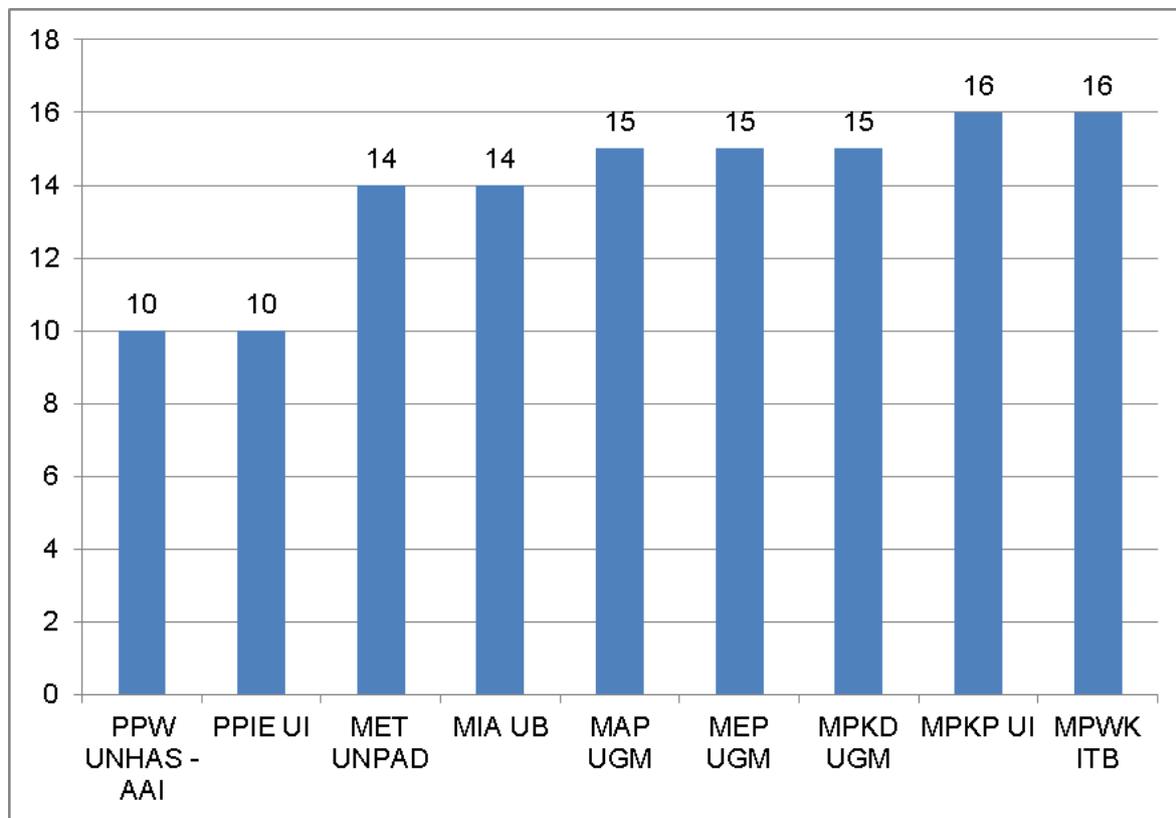


Diagram 4.2. Sebaran Karyasiswa *Linkage* Tahun Anggaran 2017

2. Pelaksanaan Diklat Bahasa

Kegiatan diklat bahasa yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren meliputi diklat bahasa Inggris/*English for Academic Purposes* (EAP) dan diklat bahasa Jepang/*Basic Japanese Language Training* (BJLT). Peserta yang berhak mengikuti diklat bahasa Inggris/EAP adalah peserta yang ditempatkan pada program S2/S3 luar negeri di Jepang dan S2 *linkage*. Sementara diklat bahasa Jepang/BJLT ditujukan untuk karyasiswa yang telah mendapatkan *letter of acceptance* (LOA) dari universitas di Jepang.

Durasi diklat bahasa Inggris/EAP selama 5,5–6 bulan atau minimal setara dengan 720 jam pelajaran, sedangkan untuk diklat bahasa Jepang/BJLT selama 2 bulan atau minimal setara dengan 320 jam pelajaran.

Karyasiswa yang mengikutidiklat bahasa Inggris/EAP pada tahun 2017 sebanyak 121 orang. Adapun karyasiswa yang mengikuti diklat bahasa Jepang/BJLT sebanyak 121 orang.

Pelaksanaan EAP dan BJLT pada tahun 2017 dilaksanakan di 5 (lima) pusat bahasa seluruh Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI),



Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Brawijaya (UB), dengan sebaran karyasiswa untuk pelaksanaan diklat bahasa seperti tertera pada **Diagram 4.3** berikut.

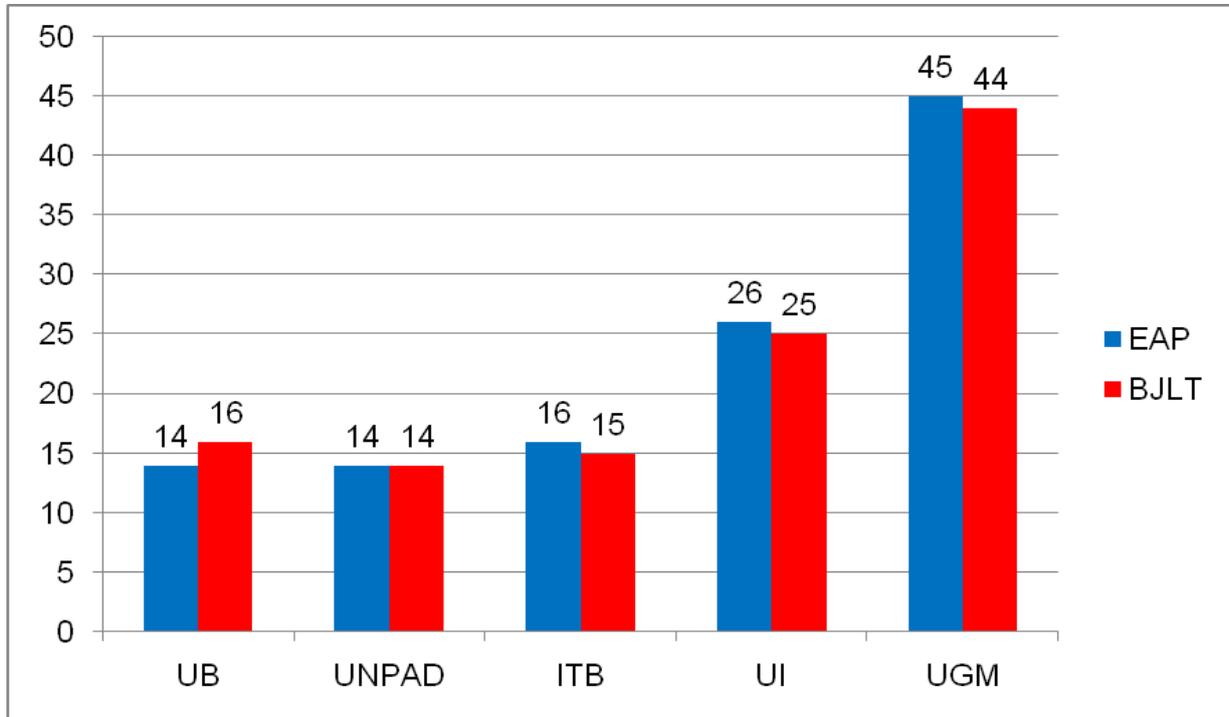


Diagram 4.3. Sebaran Karyasiswa Diklat Bahasa Tahun 2017

Berdasarkan laporan pelaksanaan diklat bahasa yang telah diselenggarakan di 5 (lima) pusat bahasa seluruh Indonesia, dapat diketahui juga bahwa masing-masing pusat bahasa memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan penyelenggaraan diklat bahasa. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan jumlah jam pelajaran di masing-masing pusat bahasa dengan jumlah paling banyak terdapat pada pusat bahasa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) dengan jumlah jam pelajaran mencapai 820 jam pelajaran. Perbedaan jumlah jam pelajaran tersebut dapat dimungkinkan mengingat masing-masing pusat bahasa memiliki metode dan materi pengajaran yang berbeda. Perbedaan jumlah jam pelajaran di tiap-tiap pusat bahasa terlihat pada **Diagram 4.4**.

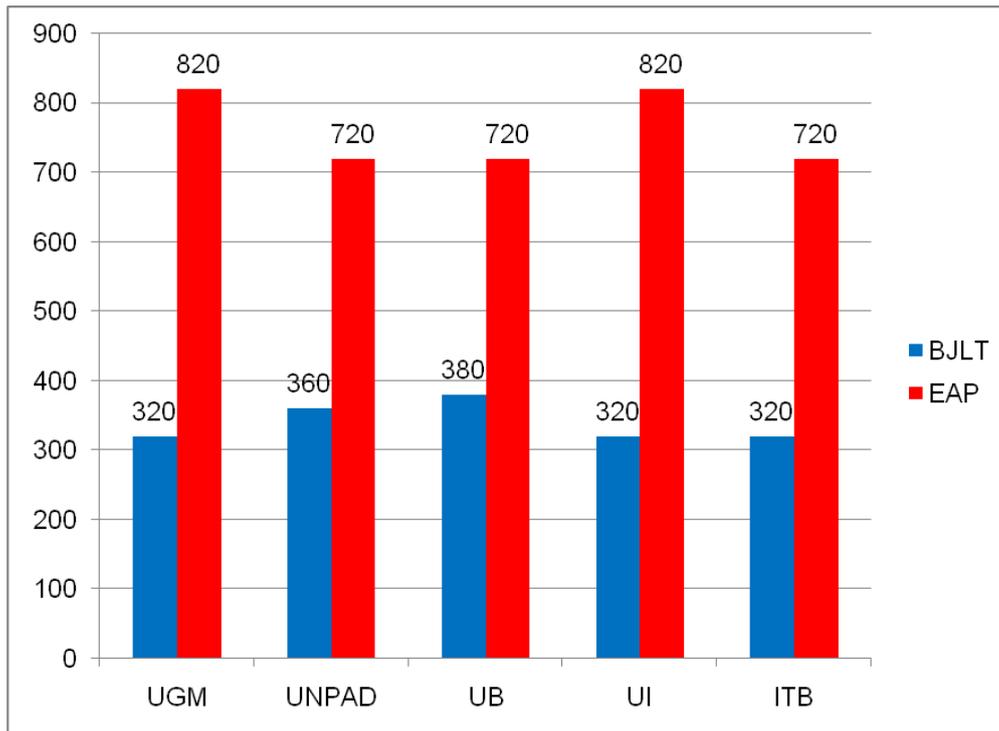


Diagram 4.4. Sebaran Jam Pelajaran Diklat Bahasa Tahun 2017

Dalam pelaksanaan diklat bahasa Inggris/EAP, dilakukan juga ujian IELTS *Practice Test* dan ujian ITP TOEFL. Sebaran nilai IELTS karyasiswa diklat bahasa tahun 2017 dari tiap-tiap prodi penyelenggara dapat dilihat pada **Diagram 4.5** berikut.

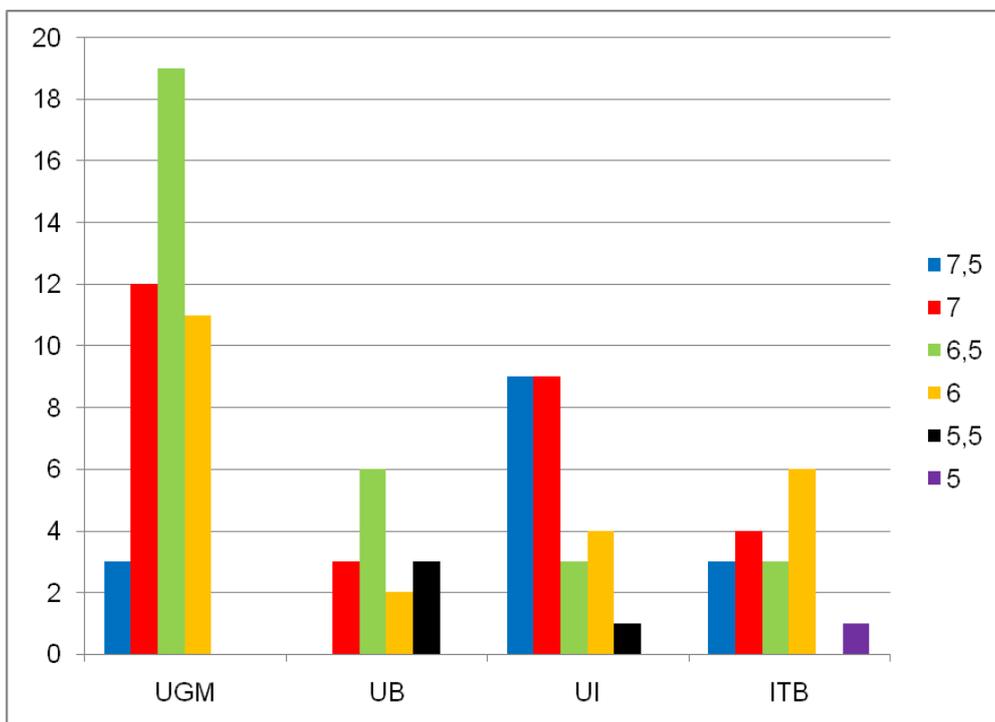


Diagram 4.5. Sebaran Nilai IELTS Karyasiswa Diklat Bahasa Tahun 2017



3. Penyelenggaraan Diklat Gelar

Penyelenggaraan Program Beasiswa yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren dilakukan bekerjasama dengan beberapa program studi yang tersebar di berbagai universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun program-program yang ditawarkan meliputi jenjang S2 dalam negeri, S2 *linkage* (Jepang), S2 *split-site* (Australia), dan S2/S3 luar negeri sebagaimana **Tabel 4.17** berikut.

Tabel 4.17. Program Beasiswa Pusbindiklatren Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENIS DIKLAT	KETERANGAN
1	S2 DALAM NEGERI	Perkuliahan akan ditempuh di universitas dalam negeri selama 15 bulan.
2	S2 <i>LINKAGE</i> (JEPANG)	Perkuliahan tahun pertama di universitas dalam negeri, sedangkan tahun kedua di universitas di Jepang.
3	S2/S3 LUAR NEGERI	Perkuliahan akan dilaksanakan di universitas di Jepang.
4	S2 <i>SPLIT SITE</i>	Biaya kuliah berasal dari rupiah murni dan biaya hibah dari Australia Awards for Indonesia (AAI). Peserta akan mengikuti perkuliahan di dalam negeri, diklat bahasa, dan perkuliahan di Australia.

Beberapa program studi dan universitas yang menjadi mitra Pusbindiklatren dalam penyelenggaraan diklat gelar seperti disebutkan dalam Bab II. Kerja Sama Pusbindiklatren dengan Lembaga/Institusi. Pemilihan program studi disesuaikan dengan program beasiswa yang diambil baik itu PHRD-IV, SPIRIT, *Split-Site*, maupun GPLP.

4. *Briefing*, Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian, serta Koordinasi

Kegiatan *briefing* dimaksudkan untuk menjelaskan terkait dengan seluruh hak dan kewajiban kepada karyasiswa Pusbindiklatren Bappenas angkatan 2017 melalui kunjungan langsung ke pusat bahasa maupun program studi penyelenggara diklat gelar yang telah menjalin kerjasama dengan Pusbindiklatren. Kegiatan *Briefing* dilaksanakan pada saat karyasiswa baru mulai melaksanakan perkuliahan ataupun pelatihan bahasa terutama untuk karyasiswa program *linkage* Jepang.

Pelaksanaan pemantauan bertujuan untuk melihat kemajuan akademis karyasiswa dan melihat kendala dalam pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke program studi penyelenggara diklat gelar yang telah menjalin kerjasama dengan Pusbindiklatren. Disamping melalui kunjungan lapangan, dalam melaksanakan pemantauan, Pusbindiklatren juga melihat perkembangan karyasiswa melalui kuesioner yang terdapat dalam Simdiklat Pemantauan.

Kegiatan Pemantauan pada tahun 2017 juga dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hasil kerja program studi yang dapat dilihat dari laporan perkembangan akademik (IPK), tingkat kelulusan serta ketepatan waktu penyelesaian studi karyasiswa tahun akademik



2015/2016serta evaluasi tingkat kepuasanpelaksanaan diklat gelar terhadap program studi melalui penyebaran kuesioner secara *online* kepada karyasiswa tahun 2016/2017. Hasil evaluasi pemantauan ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja program studi penyelenggara diklat gelar dimasa yang akan datang.

Kegiatan pengendalian dilakukan oleh Pusbindiklatren bertujuan untuk memitigasi kegagalan karyasiswa dalam menempuh pendidikan. Disamping itu dimaksudkan juga untuk menyampaikan kebijakan program beasiswa kepada program studi.

Sebagai hasil dari kegiatan pemantauan dan pengendalian, Pusbindiklatren melakukan kegiatan rapat koordinasi baik melalui rapat rutin maupun konsinyering dengan program studi, instansi sasaran maupun konsultan yang membantu Pusbindiklatren dalam pelaksanaan pendidikan gelar.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini ialah kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang akan dan sedang dijalani oleh karyasiswa, terutama untuk melihat pengaruh pelaksanaan kegiatan program beasiswa terhadap peningkatan kinerja instansi perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu,kuesioner ini juga dapat dijadikan sarana oleh karyasiswa dalam memberikan masukan dan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan program beasiswa. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi motivasi, penyelenggaraan program, penyelenggaraan proses perkuliahan, sistem basis data, serta manfaat pembelajaran.

Adapun koordinasi dilakukan melalui penyelenggaraan rapat-rapat konsinyering. Pada tahun 2017 kegiatan konsinyering dilaksanakan 4 (empat) kali, yaitu untuk program SPIRIT dan program PHRD IV dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsinyering Perkembangan Karyasiswa SPIRIT yang dilaksanakan pada tanggal 12–14 April 2017 bertempat di Grand Swisbell Hotel, Medan. Pemutakhiran data dan koordinasi yang menjadi tema dari konsinyering program SPIRIT menjadi salah satu upaya Pusbindiklatren dalam meminimalisir kegagalan program SPIRIT
2. Konsinyering Penyelenggaraan Diklat Gelar PHRD IV ini dilaksanakan pada tanggal 12–13 Juli 2017 yang bertempat di Hotel Arch, Bogor. Tujuan kegiatan ini adalah penyebaran/sosialisasi informasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ASN melalui program beasiswa yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan program beasiswa Pusbindiklatren 2018.
3. Konsinyering Pemantauan dan Evaluasi Diklat Gelar tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 19–21 Oktober 2017 bertempat di Hotel Aryaduta, Bandung. Rapat ini bertujuan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan diklat gelar, mendukung proses pengambilan kebijakan pimpinan serta menyusun tindak lanjut kegiatan pemantauan dan evaluasi diklat gelar.
4. Konsinyering yang dilaksanakan pada tanggal 20–22 Desember 2017 bertempat di Hotel Mercure, Bali tidak hanya membahas program SPIRIT namun program PHRD IV. Konsinyering diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh masukan dalam pengelolaan program beasiswa SPIRIT dari *participating agency* serta institusi dan alumni yang ada di daerah.



D. BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN NON-GELAR

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta diklat non-gelar di bidang perencanaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Secara umum, diklat perencanaan non-gelar Pusbindiklatren ditujukan bagi ASN di instansi pusat maupun daerah yang bekerja di unit perencanaan. Diklat dilaksanakan di dalam dan luar negeri, khususnya Jepang melalui kerja sama Pusbindiklatren dengan universitas/program studi, baik di Indonesia maupun di Jepang.

Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan Pusbindiklatren di antaranya Diklat Non-Gelar Substantif, Magang Dalam Negeri, *Staff Enhancement*, *Training of Trainers (ToT)*, *International Conference/Workshop/Seminar*, dan *Academic Exchange*. Beberapa diklat khusus juga diselenggarakan oleh Pusbindiklatren, yaitu Diklat *Government Think Tank* dan Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan dan Penganggaran Khusus Kabupaten Soppeng.

Diklat-diklat yang disebutkan di atas merupakan bagian dari program beasiswa PHRD-IV. Di samping itu, Pusbindiklatren juga mengadakan diklat non-gelar untuk program beasiswa SPIRIT yang khusus diperuntukkan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di 11 institusi pusat yang tergabung dalam *Participating Agencies (PA)*.

Pelaksanaan program diklat perencanaan non-gelar Pusbindiklatren tidak hanya bermanfaat bagi peserta dan instansi asalnya, tetapi juga bermanfaat bagi Bappenas. Program ini merupakan pembelajaran bagi para peserta untuk dapat mengembangkan kompetensi dalam menyusun dokumen perencanaan di instansi pusat dan daerah. Sebagai hasil pelaksanaan diklat non-gelar tahun 2017, telah terlatih sebanyak 810 peserta dari target 853 orang peserta (95%). Hal ini dikarenakan pada saat pemanggilan, 43 orang calon peserta mengundurkan diridan batal mengikuti diklat.

Berikut laporan pelaksanaan dari tiap-tiap diklat yang diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar pada tahun 2017.

1. Pelaksanaan Diklat Non-Gelar Substantif

Dalam tahun anggaran 2017, Pusbindiklatren telah menyelenggarakan pelatihan non-gelar substantif sebanyak 8 (delapan) topik, yaitu Kelayakan Proyek, *Local Economic Resources Development (LERD)*, *Planning and Budgeting*, PPD-RPJMD, *Monitoring* dan *Evaluasi*, Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan, Perencanaan Pengelolaan Bencana, dan *Public Private Partnership*.

Penyelenggaraan pelatihan non-gelar substantif ini, diperuntukkan bagi ASN yang bekerja di unit perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Peserta diutamakan dari pemerintah daerah, baik yang di Bappeda ataupun di satuan kerja pemerintah daerah yang lain. Terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan secara keseluruhan pelatihan substantif dan kepuasan terhadap kinerja Pusbindiklatren, perlu diketahui agar dapat ditingkatkan di masa yang mendatang.

Tujuan diklat non-gelar substantif adalah (1) Meningkatkan pemahaman peserta tentang proses perencanaan baik di tingkat nasional dan daerah; (2) Meningkatkan pengetahuan



dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen perencana; dan (3) menyinergikan/mengintegrasikan perencana daerah dengan perencana pusat.

Metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar pada pelatihan ini adalah metode pembelajaran untuk orang dewasa, dimana pelatihan dipacu berpartisipasi secara aktif (*participative and adult training method*). Metode yang digunakan dalam pelatihan ini merupakan kombinasi dari teknik-teknik berikut: (1) ceramah; (2) tanya jawab; (3) diskusi; (4) studi kasus; (5) kerja kelompok; dan (6) presentasi studi kasus.

Pelatihan non-gelar substantif dilaksanakan pada tahun 2017 selama 2 (dua) minggu, dengan tempat pelaksanaan di tiap-tiap program studi. Secara detail, jadwal pelatihan sesuai daftar **Tabel 4.18** di bawah ini.

Tabel 4.18. Pelaksanaan Pelatihan Substantif 2017

TOPIK PELATIHAN	PROGRAM STUDI	WAKTU PELAKSANAAN
PPD-RPJMD	Universitas Sebelas Maret	25 April–5 Mei 2017
	P3KM Universitas Hasanuddin	17–28 April 2017
	FEB-Universitas Trunojoyo Madura	9–19 Mei 2017
	FE Universitas Syiah Kuala	11–24 Mei 2017
	FE Universitas Andalas	4–18 September 2017
	Universitas Cendana	7–18 Agustus 2017
	Universitas Papua	21–31 Agustus 2017
	LP3E Universitas Padjajaran	24 Juli–5 Agustus 2017
Kelayakan Proyek (<i>Project Assessment</i>)	LEMTEK-UI	31 Juli–11 Agustus 2017
	MPWK ITB	24 Juli–4 Agustus 2017
Perencanaan Pengelolaan Bencana	PPS-UNSYIAH	14–25 Agustus 2017
	GEO-INFO-UGM	10–21 Juli 2017
<i>Monitoring dan Evaluasi</i> (<i>Monev</i>)	RCCP-UB	10–21 April 2017
	MPKD-UGM	17–28 April 2017
	MPWK ITB	16–27 Oktober 2017
Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	MIL-UNDIP	31 Juli–11 Agustus 2017
	MIL-UNPAD	17–28 Juli 2017
<i>Local Economic Resources Development (LERD)</i>	MPKD-UGM	31 Juli–11 Agustus 2017
	PPS-UNSRI	2–14 Oktober 2017
<i>Public Private Partnership</i> (<i>PPP</i>)	MPWK-ITB	24 Juli–4 Agustus 2017
	MPKD UGM	10–21 Juli 2017
<i>Planning and Budgeting</i>	MPWK UNDIP	17–28 April 2017
	MEP-UGM	16–27 Oktober 2017
	LP3E-UNPAD	25 September–6 Juni 2017

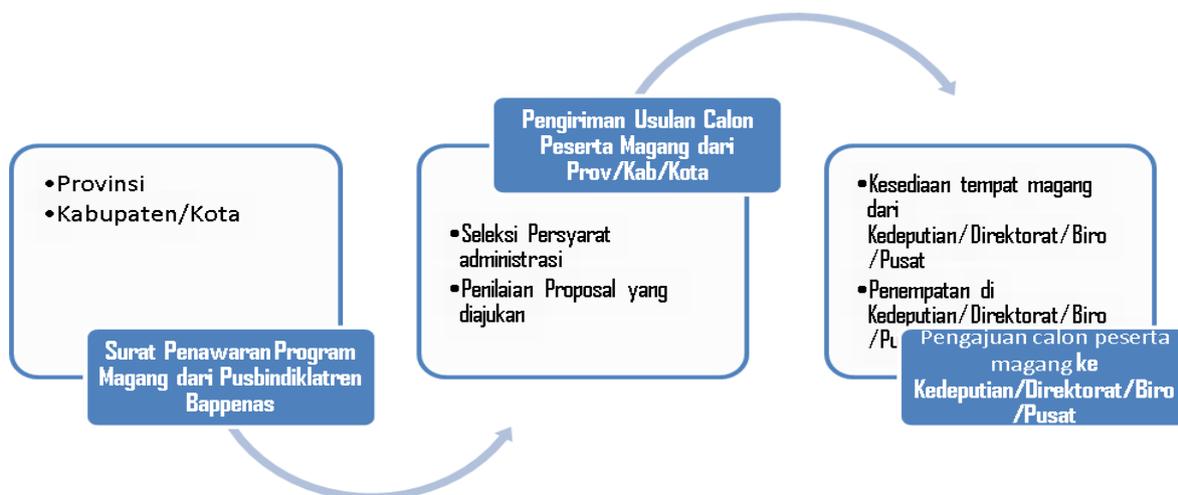
Merujuk pada rencana Pusbindiklatren tahun anggaran 2017, target peserta pelatihan substantif ini pada awalnya dialokasikan untuk 700 peserta, yang terdiri dari staf perencana dan calon perencana baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, pendidikan minimal S1 dan D3 khusus peserta dari Provinsi Papua. Namun, pada saat pemanggilan peserta pelatihan, 23 orang calon peserta mengundurkan diri dan batal mengikuti pelatihan. Dengan demikian, jumlah peserta pelatihan non-gelar substantif tahun 2017 adalah 678 orang dapat dilihat dalam **Tabel 4.19** berikut.

Tabel 4.19. Jumlah Peserta Diklat Non-Gelar Substantif Tahun 2017

JENIS DIKLAT NON-GELAR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Diklat Non-Gelar Substantif	700	677	97%

2. Pelaksanaan Magang Dalam Negeri

Pelaksanaan program Magang Dalam Negeri bertujuan untuk (1) meningkatkan pengalaman kerja bagi perencana daerah di instansi perencana pusat; (2) membangun jejaring kerja antara institusi perencanaan pusat dan daerah, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan instansi peserta magang; (3) memperluas pemahaman konsep yang terintegrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan di pusat dan daerah; serta (4) memperluas wawasan tentang sistem perencanaan antarpemerintah pusat, pusat-daerah, dan antarpemerintah daerah. Proses penyeenggaraan program Magang Dalam Negeri dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1. Proses Pelaksanaan Program Magang Dalam Negeri 2017



Pelaksanaan Magang 2017 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 29 Maret–16 Juni 2017. Peserta magang berjumlah 6 (enam) orang dari Pemerintah Daerah yang bertempat magang di 6 (enam) unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Peserta Magang Dalam Negeri ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengalaman yang didapat tentang perencanaan dan kebijakan publik untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan di daerah yang berkualitas, bersinergi, sinkron, serta terintegrasi antarsektor, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah pusat dan daerah. **Tabel 4.20** menunjukkan daftar peserta Magang Dalam Negeri 2017 beserta penempatannya di unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 4.20. Daftar Penempatan Peserta Program Magang Dalam Negeri 2017

NO.	NAMA PESERTA	INSTANSI ASAL	TEMPAT MAGANG
1	Indra Yadi Putra	Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Pusbindiklatren
2	Happy Risdian	Bapelitbangda Kota Salatiga	Direktorat Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
3	Rizky Rachmawati	Bappeda Provinsi Riau	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
4	Mayhayati	Bappeda Provinsi Riau	Direktorat Pendidikan dan Agama
5	Hendri Fajri	Bappeda Provinsi Riau	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
6	Firman Purnawan	Bappeda Provinsi Riau	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan

3. Pelaksanaan *Staff Enhancement*

Kegiatan magang/*internship* luar negeri yang dikemas dalam program *Staff Enhancement* bertujuan (1) memberikan pengalaman kepada para perencana untuk memahami dan bekerja dalam bidang perencanaan pembangunan secara langsung di negara maju, khususnya Jepang; dan (2) memberikan pembelajaran kepada peserta magang untuk menyusun *action plan* sebagaimana pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran.

Peserta program *Staff Enhancement* diharapkan dapat memahami langkah-langkah lembaga pemerintah Jepang dalam melakukan perencanaan, mampu merintis kerja sama antarlembaga di dalam dan luar negeri, serta mampu menerapkan rencana aksi pascamagang.

Program *Staff Enhancement* dilaksanakan pada tahun 2017 selama 1 (satu) bulan di Jepang untuk topik-topik sebagai berikut:



- Topik *Public Private Partnership* di Miyazaki University (25 September–20 Oktober 2017);
- Topik *Waste Management* di Temple University (2–27 Oktober 2017);
- Topik *Urban Planning* di Ritsumeikan University (30 Oktober–24 November 2017);
- Topik *Local Economic Resources Development* di International University of Japan (6 November–1 Desember 2017).

Adapun total peserta dalam program *Staff Enhancement tahun 2017* sebanyak 22 orang dari instansi pusat dan daerah. Rincian peserta serta sebaran wilayah asal peserta dapat dilihat pada **Tabel 4.21** dan **Diagram 4.6**.

Tabel 4.21. Daftar Peserta Program *Staff Enhancement 2017*

No.	NAMA	INSTANSI	TOPIK
1	Dwi Rahayuningsih	Bappenas	PPP
2	Hidayaturrohman	Dinas Perhubungan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	PPP
3	Ika Yuniarti	Bappeda Kota Metro	PPP
4	Teguh Iman	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	PPP
5	Suryani Eka Wijaya	Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	PPP
6	Windiasti Kartika	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kota Banjarmasin	<i>Waste Management</i>
7	Yanse Arfinando	Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Barito Utara	<i>Waste Management</i>
8	Jatmiko Wahyudi	Bappeda Kabupaten Pati	<i>Waste Management</i>
9	Mayang Rahmi Novita Sari	Bappenas	<i>Waste Management</i>
10	Fifella Aziza	Bappeda Kota Payakumbuh	<i>Waste Management</i>
11	Riki Ahmadi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Barat	<i>Urban Planning</i>
12	Radyus Ramli Hindarman	Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Urban Planning</i>
13	Baiq Musfiatin	Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	<i>Urban Planning</i>
14	Tatang Kurniawan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi	<i>Urban Planning</i>
15	Asri Samsu	Bappelitbangda Kabupaten Soppeng	<i>Urban Planning</i>
16	Fitri Zakiah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	<i>Urban Planning</i>



No.	NAMA	INSTANSI	TOPIK
17	Adhi Rachman Prana	Bappenas	LERD
18	Adywarsyah Toar	Bappeda Kabupaten Konawe Selatan	LERD
19	Siti Maftukah	Bappenas	LERD
20	Fahmi Riadi	Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara	LERD
21	Mochamad Nurhestitunggal	Bappeda Provinsi Banten	LERD
22	Utri Dianniar	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak	LERD

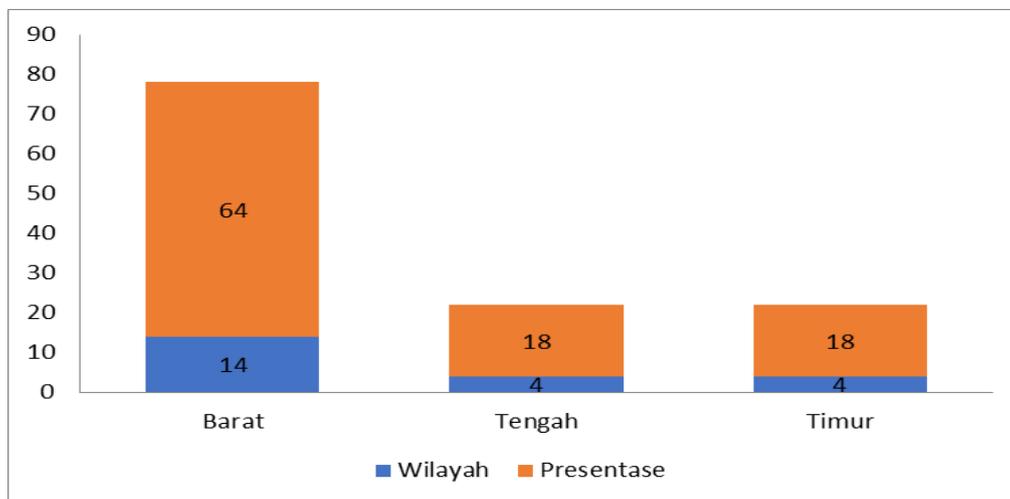


Diagram 4.6. Penyebaran Wilayah Peserta Program *Staff Enhancement* tahun 2017

4. Pelaksanaan *International Conference/Workshop/Seminar, Training of Trainers, Academic Exchange*, dan Diklat Khusus

Program *International Conference/Workshop/Seminar* diperuntukkan bagi ASN di unit kerja perencanaan untuk menjadi pembicara dan memaparkan hasil karya tulis/penelitian/tesis/disertasinya dalam forum konferensi/*workshop*/seminar internasional yang diselenggarakan di Jepang. Pada tahun 2017, konferensi yang diikuti adalah *The 3rd International Conference on Public Health in Asia*, di Hiroshima Jepang.

Program *Training of Trainers* (ToT) bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada calon-calon pengajar diklat Pusbindiklatren. Kegiatan ini khusus diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Program ToT dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri dengan skema *linkage* bekerja sama dengan universitas di Indonesia dan di Jepang. Pada tahun 2017, program ToT diselenggarakan untuk 3(tiga) topik diklat, yaitu ToT *Monitoring* dan Evaluasi, ToT *Planning and Budgeting*, dan ToT Jabatan Fungsional Perencana.



Program *Academic Exchange* ditujukan sebagai sarana pertukaran pengajar dari universitas di Indonesia dan di Jepang yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren. Pengajar dari universitas di Indonesia dapat memperoleh kesempatan mengajar di universitas di Jepang dan juga sebaliknya. Program ini dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.

Adapun diklat khusus yang diselenggarakan pada tahun 2017 adalah Diklat *Government Think Tank* khusus untuk ASN perencana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Khusus untuk ASN perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Tenggara, yang menjalin kerja sama khusus dengan Pusbindiklatren dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang perencanaan setempat. Diklat *Government Think Tank* dilaksanakan di Ritsumeikan University Jepang, sedangkan Bimtek Sistem Perencanaan dan Penganggaran Khusus Kabupaten Soppeng dilaksanakan di Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jakarta.

Data mengenai jumlah peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaan dari diklat-diklat tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.22**.

Tabel 4.22. Data Pelaksanaan *International Conference/Workshop/Seminar, Training of Trainers, Academic Exchange*, dan Diklat Khusus

NO.	JENIS DIKLAT	LOKASI PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
				TARGET	REALISASI
1	<i>International Conference/ Workshop/Seminar</i>	<i>The 3rd International Conference on Public Health in Asia</i> , di Hiroshima Jepang	28 Apr–1 Mei 2017	5	1
2	ToT <i>Monitoring and Evaluation</i>	MPKD UGM dan Takushoku University	27 Jul–5 Agt 2017	25	23
3	ToT <i>Planning and Budgeting</i>	MEP dan GRIPS	7 Agt–12 Agt; 19 Agt–1 Sep 2017	25	25
4	ToT Jabatan Fungsional Perencana	LPEM UI dan Ritsumeikan University	23 Okt–10 Nov 2017	25	24
5	<i>Academic Exchange</i>	Peserta mengadakan program ini tergantung di universitas di Jepang atau di Indonesia yang memiliki kerja sama dengan universitas peserta berasal	14–21 Mei 2017 5–10 Mei 2017 5–12 Mei 2017 9–15 Juli 2017 19–26 Agt 2017	16	7
6	Diklat <i>Government Think Tank</i>	Ritsumeikan University	17–28 Jul 2017	25	24
7	Bimtek Sistem Perencanaan dan Penganggaran Khusus Kabupaten Soppeng	Gedung Pusbindiklatren Bappenas, Jakarta	24–28 Jul 2017	56	56



5. Pelaksanaan Diklat Non-Gelar Program SPIRIT

Pengelolaan beasiswa SPIRIT ini dilakukan oleh *Project Implementation Unit* (PIU) yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PIU Bappenas mengelola beasiswa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di 11 instansi/*participating agencies* (PA). PIU Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pelaksanaan diklat non-gelar program SPIRIT tahun anggaran 2017 telah berjalan sesuai dengan rencana dan *Project Operation Manual* (POM) SPIRIT. Total pencapaian pelaksanaan sebanyak 81 program yang dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2017, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengajuan usulan pelatihan (topik, waktu, lokasi, anggaran) yang diajukan oleh PA kepada PIU Bappenas dalam bentuk *Annual Working Plan* (AWP) akan diseleksi oleh PIU Bappenas. Berikut hasil seleksi program diklat tahun 2017:

- Komponen 2 (dua) untuk pelatihan dalam negeri sebanyak 33 pelatihan dengan jumlah peserta 600 orang peserta;
- Komponen 2 (dua) untuk pelatihan luar negeri sebanyak 41 pelatihan dengan jumlah peserta 402 orang;
- Komponen 3 (tiga) untuk pelatihan dalam negeri sebanyak 2 pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang,
- Komponen 3 (tiga) untuk pelatihan di luar negeri sebanyak 5 pelatihan dengan jumlah peserta 106 orang peserta.

Total pencapaian keseluruhan pelaksanaan diklat di dalam negeri sebanyak 35 program dengan jumlah peserta 640 orang, dan diklat di luar negeri sebanyak 46 program dengan jumlah peserta 508 orang. Dengan demikian, total realisasi peserta sebanyak 1.148 orang target AWP sebanyak 1.186 orang sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4.23**.

Tabel 4.23. Pelaksanaan Diklat Non-Gelar SPIRIT 2017

PROGRAM DIKLAT NON-GELAR SPIRIT TAHUN 2017	TARGET AWP	REALISASI
Komponen 2 (Diklat Dalam Negeri)	621	600
Komponen 2 (Diklat Luar Negeri)	420	402
Komponen 3 (Diklat Dalam Negeri)	40	40
Komponen 3 (Luar Negeri)	105	106
TOTAL	1.186	1.148
TOTAL PERSENTASE		96.7%



6. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev)

Pelaksanaan monev dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan diklat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pimpinan Pusbindiklatren. Selain itu, monev juga dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dari peserta atas pelaksanaan diklat, baik dari sisi program studi selaku pelaksana maupun Pusbindiklatren sebagai penyelenggara diklat. Secara teknis, pelaksanaan monev dilakukan dengan berkunjung langsung ke tempat pelaksanaan diklat dan pengisian kuesioner. Secara umum, hasil dari pelaksanaan monev menunjukkan bahwa peserta puas dengan pelaksanaan maupun penyelenggaraan diklat, terutama dari segi pelayanan.

E. SUB-BAGIAN TATA USAHA

Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusbindiklatren.

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2017, Sub-Bagian Tata Usaha telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Persuratan

Pada tahun 2017, Sub-Bagian Tata Usaha belum menggunakan aplikasi persuratan. Namun, telah dilakukan koordinasi dengan pihak Pusdatin Bappenas untuk menggunakan aplikasi persuratan tersebut dalam sistem aplikasi *e-Government* Bappenas. Jumlah surat yang bisa diidentifikasi sebagai capaian surat masuk dikelola per bulan dengan jumlah surat yang masuk mulai dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 berjumlah 3.712 surat. Sementara itu, jumlah surat keluar untuk periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 sebanyak 453 surat keluar dan dari bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 mencapai 261 surat keluar. Dengan demikian, total surat keluar mencapai 814 surat keluar.

Selain mengelola surat keluar dan surat masuk, Sub-Bagian Tata Usaha juga melakukan pendataan terhadap nota dinas dan memo yang bersifat internal di lingkungan Pusbindiklatren dan Bappenas secara keseluruhan. Jumlah yang ada dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 1.170 nota dinas dan memo sebagaimana **Tabel 4.24** berikut.

Tabel 4.24. Hasil Penghitungan Nota Dinas dan Memo Tiap Bidang di Pusbindiklatren

NO.	BULAN	RENBANG DIKLAT	PP JFP	GELAR	NON-GELAR	TU	JUMLAH
1	JANUARI	27	11	23	1	7	69
2	FEBRUARI	27	19	22	5	8	81
3	MARET	25	27	43	51	10	156
4	APRIL	32	18	19	48	8	125



NO.	BULAN	RENBANG DIKLAT	PP JFP	GELAR	NON- GELAR	TU	JUMLAH
5	MEI	31	19	25	29	7	111
6	JUNI	18	17	13	15	2	65
7	JULI	23	7	24	26	20	100
8	AGUSTUS	26	14	30	28	6	104
9	SEPTEMBER	28	13	20	41	10	112
10	OKTOBER	39	13	43	30	1	126
11	NOVEMBER	35	12	18	12	15	92
12	DESEMBER	10	2	13	2	2	29
JUMLAH		321	172	293	288	96	1.170

2. Kearsipan

Kegiatan tata usaha yang lainnya adalah kearsipan yang terbagi dua kegiatan, yaitu penataan arsip dan alih media arsip. Adapun tujuan pengelolaan kearsipan adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan kearsipan yang baik dan teratur secara menyeluruh sehingga apabila diperlukan untuk suatu kepentingan akan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Adapun cara untuk mencapainya adalah dengan melakukan penataan dan alih media arsip, menyajikan arsip yang lengkap dan akurat, menyelamatkan arsip, mengurangi penumpukan arsip di bidang-bidang, serta memudahkan pegawai dalam temu balik arsip.

Tabel 4.25 menyajikan hasil rekapitulasi jumlah boks arsip dari tiap unit kerja/bidang yang telah teridentifikasi dalam proses pengarsipan.

Tabel 4.25. Rekapitulasi Jumlah Boks Arsip Tiap Bidang di Pusbindiklatren

NO.	UNIT KERJA	TAHUN ARSIP	JUMLAH BOX
1	BIDANG RENBANG	2005–2014	105
2	BIDANG JFP	2010–2015	63
3	BIDANG GELAR	2011–2014	293
4	BIDANG NON GELAR	2011–2013	45
5	TATA USAHA	2011–2015	147
6	PPK/PROYEK	2004–2015	1.304
7	TESIS	2003–2017	308
JUMLAH BOX			2.265



Kegiatan kearsipan juga mencakup digitalisasi/alih media dengan metode *scanning*. Dokumen tercetak dapat dialihkan ke dalam bentuk digital dengan bantuan program pendukung *scanning* dokumen seperti Adobe Acrobat dan Omnipage. Hasil kegiatan digitalisasi/alih media yang dilaksanakan pada tahun 2017 tercantum pada **Tabel 4.26**.

Tabel 4.26. Hasil Digitalisasi/Alih Media Arsip Pusbindiklatren Tahun 2017

NO.	KETERANGAN	TAHUN	VOLUME	SATUAN
1	Arsip Tata Usaha	2008–2011	36.656	lembar
2	Arsip Bidang Renbang Diklat	1987– 2010	37.963	lembar
3	Arsip Bidang PP JFP	2001–2007	23.988	lembar
4	Arsip Bidang Gelar	1983–2010	75.756	lembar
5	Arsip Bidang Non-Gelar	1990–2013	20.097	lembar
6	Arsip PPK/Proyek	1983–1997	34.454	lembar

3. Pendokumentasian

Dalam pendokumentasian yang dilakukan, Sub-Bagian Tata Usaha melakukan kegiatan yang mendukung bidang/sub-bidang unit kerja lainnya. Sub-Bagian Tata Usaha juga melakukan inventarisasi jenis foto kegiatan (seminar, sosialisasi, FGD, rapat pimpinan) yang juga sangat diperlukan dalam salah satunya penyusunan Majalah Simpul Perencana yang diterbitkan oleh Pusbindiklatren. Tugas lain yang terkait penerbitan majalah tersebut adalah membantu dalam menyebarluaskan majalah dan informasi yang ada untuk dapat dipergunakan oleh *stakeholder* terkait, khususnya para alumni penerima beasiswa, baik gelar maupun non-gelar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

4. Kerumahtangaan

Salah satu kegiatan yang tidak kalah penting dalam Sub-Bagian Tata Usaha adalah mengelola kerumahtangaan. Kerumahtangaan ini antara lain meliputi penyediaan kebutuhan staf dan pimpinan dalam kebutuhan sehari-hari, misalnya jamuan rapat dalam hal penyediaan minuman dan makanan (*snack* ataupun konsumsi makan siang). Selain itu, Sub-Bagian Tata Usaha juga menyediakan air minum bagi staf setiap harinya. Semua hal tersebut sangat diperlukan untuk menunjang keperluan dalam pelaksanaan tugas keseharian pegawai Pusbindiklatren yang dilaksanakan dari pagi sampai sore (sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan). Dengan demikian, anggaran kebutuhan kerumahtangaan ini pun menjadi sangat penting untuk diadakan.





BAB V

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017, Pusbindiklatren banyak menemui masalah dan kendala, baik dari sisi substansi maupun administrasi. Ada beberapa permasalahan yang langsung dapat ditangani, tetapi ada pula beberapa permasalahan yang masih memerlukan upaya-upaya lebih lanjut. Untuk menghindari dan mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut, kami merekomendasikan upaya-upaya untuk ditindaklanjuti. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang muncul dan rekomendasi upaya-upaya untuk ditindaklanjuti.

A. PERMASALAHAN

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

- Koordinasi program/kegiatan dengan bidang, JFP/widyaiswara, serta unit kerja non-Pusbindiklatren kurang optimal. Yang dimaksud kurang optimal adalah kurang intensifnya koordinasi dan rapat pertemuan yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini kemungkinan disebabkan tiap-tiap bidang dan unit kerja lain di Bappenas cukup sibuk.
- Integrasi jadwal kegiatan dengan bidang/unit kerja lain kurang optimal. Akibat kurang optimalnya koordinasi dengan bidang lain maka terjadi ketidaksinkronan jadwal kegiatan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain.
- Sistem penganggaran dan administrasi keuangan belum terintegrasi. Sebagai akibat dari permasalahan ini adalah tiap-tiap pelaksana kegiatan tidak dapat mengetahui secara pasti sisa atau penggunaan anggaran dalam suatu kegiatan. Hal ini juga menyebabkan tidak bisa dilakukan kontrol penggunaan anggaran secara cepat dan akurat.
- Masih adanya beberapa pedoman/panduan/SOP yang belum selaras. Dengan adanya masalah ini maka sering terjadi kebingungan dari pengguna pedoman untuk acuan pelaksanaan.
- Belum seluruh pihak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Pusbindiklatren seperti e-Registration, e-Monev, WIFAST, dan lainnya. Hal ini menyebabkan adanya data-data yang harus ditangani secara manual sehingga memberikan waktu dan perhatian yang lebih.

2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana

- Belum seragamnya prodi dalam memberikan materi Pembagunan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Diklat Fungsional Perencana (FP) Pertama dan Diklat FP Muda.
- Terdapat perbedaan format sertifikat diklat dan sertifikat hasil uji kompetensi di antara prodi penyelenggara diklat.



- Penyertaan formulir pernyataan pengembalian biaya bagi calon peserta diklat yang sudah terpanggil dan ditempatkan diklat.
- Pemberian sesi materi penyusunan angka kredit perencanaan.
- Fasilitas penginapan bagi para peserta diklat.
- Kurang berperan aktif dalam penyampaian informasi dan penyebaran kuesioner pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat.
- Memeriksa kembali spesifikasi data-data peserta yang akan didiklatkan baik dari sisi usia, golongan/pangkat, dan lain-lain.
- Penyerahan rekapitulasi daftar peserta diklat yang terkadang terlalu mepet dari pelaksanaan diklat sehingga menghambat proses pembuatan nota persejutan dan akan berimbas terhadap proses pembayaran.
- Keterlambatan penyerahan rekapitulasi hasil uji kompetensi para peserta diklat ke Pusbindiklatren yang mengakibatkan terlambatnya proses pembuatan Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) bagi peserta diklat.
- Adanya peserta diklat yang berubah golongan/pangkatnya ketika sedang mengikuti diklat.
- Penyampaian laporan diklat fungsional perencanaan baik laporan awal, pelaksanaan dan akhir.
- Perlu merevisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Perencana terkait penambahan kurikulum materi pembangunan berbasis HAM.
- Perlu adanya sanksi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah penempatan.
- Banyak peserta yang kurang memahami mekanisme pendaftaran secara *online* dan lebih memilih menggunakan formulir manual.
- Banyak peserta yang ketika mendaftar syarat 1 (satu) tahun masa kerja dari PNS 100% belum terpenuhi.
- Banyak peserta yang mendaftar diklat dengan melampirkan SK PNS sebagai Fungsional Perencana, namun yang bersangkutan belum diklat.
- Banyak peserta yang keberatan terhadap kebijakan penempatan diklat, sedangkan pemilihan, penempatan, dan penggantian peserta diklat adalah hak Pusbindiklatren.
- Adanya peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan.

3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar

a. Pelaksanaan Seleksi

- Perubahan sasaran unit kerja beasiswa Pusbindiklatren dari seluruh unit kerja yang ada pada instansi pemerintah menjadi unit kerja/instansi yang terkait dengan perencanaan sesuai dengan sasaran dari Program PHRD IV;
- Nilai TPA dan TOEFL calon karyasiswa yang berasal dari wilayah timur Indonesia serta dari OPD Daerah Luar Pulau Jawa yang tidak memenuhi persyaratan beasiswa Pusbindiklatren sehingga tingkat keterwakilan dengan rasio 20%:80% belum dapat tercapai;



- Calon karyasiswa yang mengundurkan diri dikarenakan alasan tidak sesuai dengan program studi, atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perizinan di instansi;
- Ketentuan proses penerimaan beasiswa Pusbindiklatren yang berbeda dengan kebijakan pada beberapa instansi, sehingga mengakibatkan adanya pengunduran diri karyasiswa yang sudah ditempatkan oleh Pusbindiklatren;
- Tidak adanya dukungan biaya dari instansi asal saat pelaksanaan seleksi berlangsung sehingga berdampak pada masih terdapatnya calon karyasiswa yang mengikuti proses seleksi; serta
- Konsentrasi pilihan karyasiswa hanya pada program studi yang ada di Pulau Jawa khususnya di Universitas Gadjah Mada.
- Dari 3.241 orang yang mendaftar, hanya 2.085 orang yang memenuhi syarat administrasi program beasiswa Pusbindiklatren. Pada tahun 2017, peserta yang ditempatkan hanya 425 orang dari 548 orang yang lulus atau jumlah yang ditempatkan hanya sekitar 20,38 persen dari jumlah pendaftar yang memenuhi syarat administrasi. Hal ini disebabkan oleh (i) ketidakcocokan pilihan yang diambil dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki; (ii) tidak memenuhi standar nilai TOEFL yang ditetapkan oleh program studi yang dipilih; (iii) tingginya minat terhadap program studi tertentu; serta (iv) faktor internal lainnya seperti faktor keluarga maupun faktor pekerjaan yang membuat calon karyasiswa tersebut mengundurkan diri dari program gelar.
- Tingkat pengunduran diri karyasiswa yang relatif tinggi setelah proses penempatan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan prioritas pilihan karyasiswa tidak sesuai dengan hasil penempatan.
- Perbedaan kalender akademik pada tiap-tiap program studi yang mengakibatkan perbedaan waktu kelulusan karyasiswa.
- Adanya perbedaan jadwal pelaksanaan seleksi khusus untuk program *Split-Site* Australia mengakibatkan karyasiswa yang tidak diterima dalam beasiswa *Split-Site* Australia tidak dapat dipindahkan ke program PHRD.

b. Pelaksanaan Diklat Bahasa

- Perbedaan dalam durasi pelaksanaan diklat bahasa, karena panduan dalam pelaksanaan diklat menggunakan *range* jam pelajaran (*jampel*), sehingga diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing pusat bahasa. Hal ini berimbas terhadap pemberian *allowance* yang berbeda-beda di satu pusat bahasa dengan karyasiswa di pusat bahasa lainnya;
- Perbedaan penggunaan buku literatur dalam pelatihan bahasa;
- Pelaksanaan pelatihan BJLT bersamaan dengan pengurusan dokumen keberangkatan dan pencarian data;
- Di masa awal program, tingkat kehadiran peserta pelatihan cukup tinggi. Namun mulai pertengahan program, tingkat kehadiran mengalami penurunan dan beberapa peserta keluar masuk kelas tidak secara kontinyu sehingga mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelatihan;
- Kesibukan pengajar yang memiliki tugas sebagai dosen kadang kala tidak bisa mengajar sesuai jadwal..



c. Penyelenggaraan Diklat Gelar

- Dari 3,241 orang yang mendaftar, hanya 2,085 orang yang memenuhi syarat administrasi program beasiswa Pusbindiklatren. Peserta yang ditempatkan untuk tahun 2017 hanya 425 orang dari 548 orang yang lulus atau jumlah yang ditempatkan hanya sekitar 20,38 persen dari jumlah pendaftar yang memenuhi syarat administrasi. Hal ini disebabkan oleh: (i) ketidakcocokan pilihan yang diambil dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, (ii) tidak memenuhi standar nilai TOEFL yang ditetapkan oleh program studi yang dipilih, (iii) tingginya minat terhadap program studi tertentu, serta (iv) faktor internal lainnya seperti faktor keluarga maupun faktor pekerjaan yang membuat calon karyasiswa tersebut mengundurkan diri dari program gelar;
- Tingkat pengunduran diri karyasiswa yang relatif tinggi setelah proses penempatan dilaksanakan, dikarenakan prioritas pilihan karyasiswa tidak sesuai dengan hasil penempatan;
- Perbedaan kalender akademik di masing-masing program studi yang mengakibatkan perbedaan waktu kelulusan karyasiswa;
- Adanya perbedaan jadwal pelaksanaan seleksi khusus untuk program *split-site* Australia mengakibatkan karyasiswa yang tidak diterima dalam beasiswa *split-site* Australia tidak dapat dipindahkan ke program PHRD;

d. Briefing, Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian, serta Koordinasi

- Belum adanya kesadaran karyasiswa untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pusbindiklatren, salah satunya pengisian kuesioner;
- Belum sepenuhnya kebijakan Pusbindiklatren dilaksanakan oleh program studi pelaksana *linkage* terkait dengan proses pemilihan universitas di Jepang;
- Belum standarnya proses penulisan tesis di masing-masing program studi *linkage*.

4. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar

a. Kendala Pelaksanaan Program PHRD-IV

- Tingkat pengunduran diri peserta masih cukup tinggi.
- Pengusulan calon peserta masih secara individu, walaupun dalam persyaratan diklat telah diminta pengusulan peserta secara berkelompok (minimal 2 orang dan maksimal 5 orang).
- Kewenangan penunjukan/pengusulan calon peserta, khususnya dari Pemda di banyak daerah, masih belum jelas sehingga koordinasi pembentukan kelompok peserta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, peserta yang berkelompok hanya berasal dari 1 (satu) SKPD saja, yaitu Bappeda, sehingga tujuan dari diklat kurang optimal.
- Biaya *cost sharing* dari instansi asal tidak teralokasi.



b. Kendala Program SPIRIT

- Keterlambatan pengusulan daftar nama peserta, keterlambatan dokumen pembayaran, dan keterlambatan dokumen keberangkatan.
- PA belum menyeleksi peserta secara baik.
- Pergantian topik diklat yang berulang kali.
- Masih ada PA yang mengusulkan AWP melewati batas waktu yang ditetapkan atau perubahan AWP.
- Pembiayaan diklat yang diusulkan untuk diklat *Leadership for Alumni* yang dilaksanakan oleh Tanri Abeng University (TAU) terlalu tinggi.

5. Sub-Bagian Tata Usaha

a. Persuratan

- Dalam pengelolaan surat masuk masih sering terlambat dalam pendistribusian.
- Dalam pengelolaan surat keluar, penomoran, pengiriman, dan pengarsipan masih belum tertib.
- Dalam pendokumentasian persuratan sering terhambat karena adanya pekerjaan yang lain.

b. Dokumentasi Kearsipan

- Tempat, standarisasi pengkodean, aplikasi, dan SDM yang belum tersedia.
- Dalam penataan dokumen arsip bidang-bidang 2008 s.d. 2010 banyak ditemukan dokumen duplikasi dan dokumen di luar tahun 2008 s.d. 2010.
- Dalam Alih Media Dokumen Arsip Keproyekan banyak ditemukan dokumen duplikasi dan dokumen di luar tahun 2008 s.d. 2010.
- penyusutan dokumen arsip tidak dapat terlaksana.

c. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

- Untuk pengelolaan kendaraan operasional masih terjadi masalah dalam hal pembiayaan service rutin dan penggantian suku cadang (*spare part*).
- Untuk perawatan gedung, penanganan kerusakan seperti kebocoran, tembok retak-retak, ataupun masalah saluran air masih sering terlambat.

d. Kerumahtanggaan

- Masalah kebersihan sebagai dampak kegiatan rapat *online*.
- Keamanan masih belum optimal dalam tugas pekerjaannya.
- Dalam hal pemeliharaan dan instalasi lampu, AC, listrik, genset, dan telepon, penanganannya masih kerusakan/masalah.



B. REKOMENDASI

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

- Untuk mengatasi kurang optimalnya koordinasi program/kegiatan dengan bidang, JFP/widyaiswara, dan unit kerja non-Pusbindiklatren maka yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi secara informal atau langsung kepada perorangan. Meskipun dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi, pendekatan ini memerlukan upaya ekstra dari seluruh staf di bidang. Rekomendasi ke depan adalah perlu dilakukan koordinasi sejak awal dan perlu penambahan staf di bidang.
- Hal yang sama juga dilakukan untuk mengatasi kelemahan dalam hal integrasi jadwal kegiatan dengan bidang/unit kerja lain. Untuk mengatasi masalah ini maka telah dilakukan upaya-upaya koordinasi secara informal untuk mencocokkan jadwal antarbidang yang berbeda. Adapun rekomendasinya adalah perlu dilakukan koordinasi sejak awal.
- Untuk mengatasi sistem penganggaran dan administrasi keuangan yang belum terintegrasi maka hal yang selama ini dilakukan adalah dengan menunjuk satu orang khusus di tiap-tiap bidang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menangani khusus pencairan kegiatan. Adapun rekomendasinya adalah Pusbindiklatren bersama-sama dengan Biro Umum (bagian verifikasi) mengembangkan sistem aplikasi penganggaran dan pencairan dana yang dapat dipantau sehingga pengajuan dan pencairan dana kegiatan lebih cepat dan akurat.
- Dalam rangka mengurangi masalah adanya ketidaksinkronan beberapa pedoman/panduan/SOP maka dilakukan upaya revisi pedoman/panduan/SOP secara terpadu. Selain itu, dalam menyusun dan merevisi panduan tersebut dilakukan dengan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi lainnya adalah perlu ditunjuk satu orang atau tim untuk melihat beberapa kebijakan/aturan/mekanisme yang mungkin tidak selaras atau bertentangan.
- Untuk mengatasi masih adanya pengguna yang belum menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Pusbindiklatren seperti e-Registration, e-Monev, WIFAST, dan lainnya maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan memberikan panduan yang lebih mudah bagi pengguna.

2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana

- Ke depan, prodi diharuskan memasukkan memberikan materi Pembangunan Berbasis HAM untuk diklat FP pertama dan FP muda.
- Perlunya penyeragaman format sertifikat diklat dan sertifikat hasil uji kompetensi di antara prodi penyelenggara diklat.
- Melampirkan formulir pernyataan pengembalian biaya dalam surat pemanggilan bagi calon peserta diklat yang sudah terpanggil dan ditempatkan diklat.
- Menyisipkan materi penyusunan angka kredit perencana dalam diklat.



- Pemilihan dan penyediaan fasilitas penginapan yang memadai dan representative bagi peserta diklat.
- Diharapkan peran aktif dalam penyampaian informasi dan penyebaran kuesioner pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat.
- Memastikan kembali spesifikasi data-data peserta yang akan didiklatkan, baik dari sisi usia, golongan/pangkat, dan lain-lain.
- Penyerahan rekapitulasi daftar peserta diklat maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan diklat untuk proses pengajuan nota persetujuan.
- Terkait dengan wacana perlunya merevisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Perencana belum dapat dilakukan dengan segera dan memerlukan kajian panjang. Hal tersebut dikarenakan materi Pembangunan Berbasis HAM belum tentu akan dijadikan bahan ajar seterusnya.

3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar

a. Pelaksanaan Seleksi

- Memberikan kesempatan kepada ASN di luar unit kerja perencanaan untuk bisa mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren mengingat perubahan atau rotasi ASN sangat fleksibel sehingga memungkinkan mereka ditempatkan pada unit kerja perencanaan setelah selesai mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren.
- Pusbindiklatren perlu menyelenggarakan program afirmasi untuk instansi yang berada di wilayah timur Indonesia dan bekerjasama dengan Program Studi yang sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas SDM asal kawasan timur Indonesia.
- Membuat daftar hitam (*black list*) untuk instansi calon karyasiswa yang mengundurkan diri khususnya tanpa alasan yang kuat. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada calon karyasiswa dan instansi asal calon karyasiswa tersebut;
- Menambah jumlah lokasi pelaksanaan ujian sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan ASN berbasis wilayah yang bekerja sama dengan program studi yang berdekatan di wilayah tersebut.

b. Pelaksanaan Diklat Bahasa

- Adanya batas minimal waktu pelaksanaan pelatihan, yakni selama 5 bulan.
- Melakukan review kurikulum pelatihan bahasa program Pusbindiklatren sehingga ada persamaan persepsi antar penyelenggara bahasa.
- Melakukan review terkait dengan jangka waktu pelaksanaan BJLT.
- Adanya ketentuan batas minimal kehadiran karyasiswa pada pelaksanaan EAP dan BJLT.
- Komitmen pengajar untuk memprioritaskan karyasiswa Pusbindiklatren.



c. Penyelenggaraan Diklat Gelar

- Memberi sanksi, baik kepada calon karyasiswa maupun instansi asal calon karyasiswa, untuk tidak diprioritaskan pada proses seleksi selanjutnya.
- Menetapkan masa studi selama 3 semester dan atau 18 bulan serta mengevaluasi program studi dengan tingkat kelulusan karyasiswa di atas 18 bulan.
- Koordinasi dengan pihak AAS untuk dapat menyelaraskan jadwal seleksi khusus Bappenas pada kemudian hari.

d. *Briefing*, Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian, serta Koordinasi

- Kewajiban Pusbindiklatren untuk menghentikan sementara biaya hidup selama karyasiswa belum mengisi kuesioner;
- Keputusan penempatan karyasiswa pada program studi di Jepang menjadi wewenang Pusbindiklatren dengan memperhatikan pilihan karyasiswa, latar belakang penelitian, keseimbangan dan pemerataan karyasiswa di masing-masing universitas di Jepang;
- Program studi dalam menetapkan format penulisan tesis memperhatikan hasil tesis pada universitas di Jepang.

4. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar

a. Program PHRD-IV

- Sosialisasi pelaksanaan diklat perencanaan non-gelar Pusbindiklatren masih sangat diperlukan, agar tujuan program Pusbindiklatren tercapai untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil Negara di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Progam SPIRIT

- Penetapan batas waktu pengumpulan *Annual Work Program* (AWP). pengusulan jenis diklat, peserta, dan pengumpulan dokumen keberangkatan
- Penetapan batas maksimal *tuition fee* untuk diklat non-gelar.

5. Sub-Bagian Tata Usaha

a. Persuratan

- Surat masuk akan dikelompokkan berdasarkan kepentingan surat tersebut.
- Perlunya SOP untuk pengelolaan surat keluar.
- Dalam proses dokumentasi perlu dilakukan pemilahan prioritas dokumentasi persuratan.



b. Dokumentasi Kearsipan

- Perlunya sewa tempat kearsipan, rekrutmen tenaga ahli kearsipan, dan pembuatan aplikasi.
- Agar bidang-bidang dapat mengurangi duplikasi dokumen disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam proses penyerahan, dokumen terlebih dahulu dipilah berdasarkan tahun.
- Pekerjaan alih media dan penyusutan dokumen arsip akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

c. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

- Pembiayaan servis rutin dan penggantian suku cadang (*spare part*) kendaraan akan diusulkan dalam anggaran.
- Pengadaan tenaga teknis untuk perawatan gedung.

d. Kerumahtanggaan

- Pengaturan ruang rapat yang konsisten untuk pelaksanaan rapat *online*.
- Akan dilakukan pembagian tugas kepada tiap-tiap petugas keamanan (*security*).
- Penyediaan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan instalasi lampu, AC, listrik, genset, dan telepon.





BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa tugas dan fungsi Pusbindiklatren adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Perencana Pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah. Pada tahun 2017, hasil kegiatan yang telah dicapai oleh Pusbindiklatren adalah (1) persentase jumlah perencana yang dibina mencapai 121% dari target 100%; (2) jumlah orang terdidik dan terlatih sebanyak 1.728 orang dari target 1.300 orang; (3) jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi mencapai 22 dokumen dari target 15 dokumen; dan (4) tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan hasil sangat baik.

Untuk meningkatkan pencapaian Pusbindiklatren pada masa yang akan datang maka diperlukan upaya-upaya melalui (1) pemantauan dan *monitoring* yang lebih ketat kepada para peserta; (2) adanya surat perjanjian dengan atas langsung peserta diklat non-gelar apabila membatalkan keikutsertaannya secara mendadak; (3) meningkatkan komunikasi dengan *stakeholders* baik di pusat dan daerah dalam forum tertentu; dan (4) memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* dan karyasiswa.

Demikian laporan kegiatan ini disusun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Pusbindiklatren Bappenas sangat diharapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM perencana yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas perencanaan.



LAMPIRAN



- TAPKIN KAPUSBINDIKLATREN
- LAPORAN PELAKSANAAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- LAPORAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
- LAPORAN PELAKSANAAN BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN GELAR
- LAPORAN PELAKSANAAN BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANAAN NON-GELAR
- LAPORAN PELAKSANAAN SUB-BAGIAN TATA USAHA

*) Lampiran disampaikan dalam file terpisah